## KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

### DIREKTORAT PENDANAAN BILATERAL

NOTA DINAS NOMOR 76/PR.04.03/01/2023

Yth. : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Dari : Direktur Pendanaan Bilateral

Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) UKE II Direktorat Pendanaan Bilateral Tahun 2022

Tanggal : 31 Januari 2023

Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 1680/PR.04.03/SES/T/12/2022, tanggal 29 Desember 2022, perihal Penyampaian Laporan Kinerja Kementerian, UKE I dan UKE II Tahun 2022 serta Nota Dinas Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan Nomor 32/PA.02.01/01/2023 tanggal 27 Januari 2023, berikut kami sampaikan Laporan Kinerja (LKj) UKE II Direktorat Pendanaan Pembangunan Tahun 2022 yang telah direvisi berdasarkan hasil reviu IBKK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

LAPORAN KINERJA



**Direktorat Pendanaan Bilateral**

**TAHUN 2022**

# KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

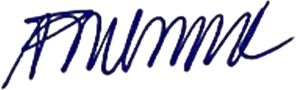
## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena dengan izin-Nya kami dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pendanaan Bilateral pada tahun 2022. Pada tahun 2022 Laporan Kinerja (LKj) 2022 Direktorat Pendanaan Bilateral telah selesai disusun sebagai cerminan dalam mewujudkan capaian kinerja yang efisien dan akuntabel.

Penyusunan LKj merupakan kewajiban bagi Direktorat Pendanaan Bilateral Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf dan tenaga pendukung lainnya di lingkungan Direktorat Pendanaan Bilateral yang telah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi direktorat selama tahun 2022, sehingga sasaran kinerja yang ditargetkan dapat tercapai. Harapan kami, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 31 Januari 2023 Direktur Pendanaan Bilateral,



Kurniawan Ariadi

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Pendanaan Bilateral menyusun LKj tahun 2022 yang memuat informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sebagaimana pula amanat yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Direktorat Pendanaan Bilateral sesuai dengan Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN / Bappenas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan luar negeri bilateral.

Laporan Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel, serta dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktur Bilateral bermuara pada Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Rencana Strategis Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan periode tahun 2020-2024. Sasaran Strategis/Program Kementerian PPN/Bappenas tersebut antara lain:

1. Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional
3. Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner

Laporan ini memberikan gambaran kinerja Direktorat Pendanaan Bilateral selama tahun 2022 dan juga disertai analisis kinerja dan capaian kinerja masing-masing indikator. Terdapat perbedaan antara indikator kinerja dan anggaran antara tahun 2021 dengan tahun 2022 pada Direktorat Pendanaan Bilateral. Berbeda dengan tahun 2021 di mana hanya terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja, pada tahun 2022 terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja pada Direktorat Pendanaan Bilateral. Perubahan indikator kinerja ini mencerminkan *cascading* indikator kinerja yang telah mengalami penyesuaian dan pemutakhiran dengan struktur organisasi serta tugas dan fungsi Direktorat Pendanaan Bilateral yang terkini sesuai Permen PPN / Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN / Bappenas.

Selain itu, dari sisi anggaran, pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) kali perubahan (*refocusing*) besaran anggaran kegiatan. Selain itu terdapat satu kali perubahan Perjanjian Kinerja yang berimplikasi pada perubahan alokasi anggaran direktoratMeskipun demikian, persentase penyerapan anggaran tahun 2022 masuk kategori memuaskan dengan angka yang sangat mendekati 100%. Dengan adanya refocusing tersebut alokasi anggaran Direktorat Pendanaan Bilateral berubah dari Rp 12.533.000.000 menjadi Rp 12.116.692.000,00. Jumlah tersebut dialokasikan untuk membiayai 11 (sebelas) kegiatan termasuk sewa kantor program Compact II, anggaran lintas bidang perjalanan dinas, dan Sekretariat PPK PPN XVI Compact II. Realisasi anggaran Direktorat Pendanaan Bilateral pada tahun 2022 mencapai Rp 12.108.453.304 atau 99,93% dari alokasi. Demikian pula halnya dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2022 yang mencapai 97,63% atau lebih tinggi dari target sebesar 87,7%. Laporan kinerja tahun 2022 ini menunjukkan bahwa Direktorat Pendanaan Bilateral mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan perkembangan terkini dengan baik sekali dalam rangka memenuhi target-target kinerja yang telah disepakati untuk tahun 2022.

## DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR i](#_TOC_250038)

[IKHTISAR EKSEKUTIF ii](#_TOC_250037)

[DAFTAR ISI iv](#_TOC_250036)

[DAFTAR TABEL vi](#_TOC_250035)

[DAFTAR GAMBAR vii](#_TOC_250034)

[BAB 1 PENDAHULUAN 1](#_TOC_250033)

* 1. [Latar Belakang 1](#_TOC_250032)
  2. [Maksud dan Tujuan 1](#_TOC_250031)
  3. [Dasar Hukum 1](#_TOC_250030)
  4. [Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2](#_TOC_250029)
     1. [Tugas dan Fungsi 2](#_TOC_250028)
     2. [Struktur Organisasi 3](#_TOC_250027)
  5. [Sumber Daya Manusia 4](#_TOC_250026)
     1. [SDM Direktorat Pendanaan Bilateral di Gd. Bappenas Lt. 12 (Wisma Bakri 2) 4](#_TOC_250025)
     2. [SDM Sekretariat Persiapan Proyek Hibah MCC dan PPK DM XVI 5](#_TOC_250024)
  6. [Potensi dan Permasalahan Strategis 7](#_TOC_250023)
     1. [Potensi/Peran Strategis 7](#_TOC_250022)
     2. [Permasalahan Strategis 7](#_TOC_250021)

[BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 9](#_TOC_250020)

* 1. [Rencana Strategis 2020 - 2024 9](#_TOC_250019)
  2. [Perjanjian Kinerja Tahun 2022 9](#_TOC_250018)
  3. [Kamus Indikator/Formula Perhitungan Capaian Indikator Direktorat Pendanaan Bilateral Tahun 2022 12](#_TOC_250017)
  4. [Rencana Kerja Tahun 2022 12](#_TOC_250016)
  5. [Alokasi Anggaran Tahun 2022 19](#_TOC_250015)

[BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 20](#_TOC_250014)

* 1. [Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Nasional 20](#_TOC_250013)
     1. [Evaluasi Paruh Waktu 20](#_TOC_250012)
     2. [Evaluasi Paruh Waktu Renstra Kementerian PPN/Bappenas 22](#_TOC_250011)
  2. [Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2022 26](#_TOC_250010)
     1. [Capaian Indikator Kinerja 26](#_TOC_250009)
     2. [Perbandingan Capaian Kinerja 2021-2022 116](#_TOC_250008)
     3. [Capaian Kinerja Lainnya 118](#_TOC_250007)
     4. [Realisasi Anggaran Tahun 2022 124](#_TOC_250006)
     5. [Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 - 2022 125](#_TOC_250005)
     6. [Analisis Efisiensi Anggaran 126](#_TOC_250004)

[3.2.7 Evaluasi Internal 129](#_TOC_250003)

[BAB 4 PENUTUP 132](#_TOC_250002)

* 1. [Kesimpulan 132](#_TOC_250001)
  2. [Tindak Lanjut 132](#_TOC_250000)

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Nama dan Jabatan PNS dan CPNS Direktorat Pendanaan Bilateral Periode Januari - Desember 2022 5

Tabel 1. 2 Distribusi PNS, CPNS dan PPNPN berdasarkan Jabatan/Peran, Gender dan Pendidikan di Direktorat Pendanaan Bilateral Tahun 2022 6

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktorat Pendanaan Bilateral 10

Tabel 2. 2 Alokasi Anggaran pada Dit Pendanaan Bilateral Tahun 2022 19

Tabel 3. 1 Daftar Proyek Pinjaman Luar Negeri Bilateral dalam DRPLN-JM 20

Tabel 3. 2 Sandingan Target dan Realisasi Kinerja Direktorat Pendanaan Bilateral yang tercantum dalam 24

Tabel 3. 3 Keselarasan Project Pipeline Pendanaan Bilateral dan Kredit Ekspor Tahunan dengan Prioritas dan/atau dengan Major Project RPJMN 26

Tabel 3. 4 Datar Proyek/Kegiatan yang Masuk dalam Pagu Indikatif 2023 43

Tabel 3. 5 Rekapitulasi Persentase Kegiatan yang Masuk dalam Pagu Indikatif 2023 60

Tabel 3. 6 Sandingan Rencana Strategis 2024 - 2024 dengan Rencana Kerja TA 2023

Sekretariat Kabinet 63

Tabel 3. 7 Daftar Kegiatan 2022 Mitra Pembangunan Pendanaan Bilateral 80

Tabel 3. 8 Tindak Lanjut Daftar Kegiatan 2022 Mitra Pembangunan Direktorat Pendanaan Bilateral 81

Tabel 3. 9 Daftar Pemantauan dan Evaluasi Proyek On-Going Mitra Pembangunan Pendanaan Bilateral 83

Tabel 3.10 Summary Pemantauan Lapangan 2022 90

Tabel 3.11 Rekomedasi Pengendalian dan Pelancaran Kegiatan Pendanaan Bilateral 99

Tabel 3.12 Penandatanganan Kesepakatan Bilateral Tahun 2022 109

Tabel 3.13 Perbandingan Proposal Proyek 2021 dan Investment Memo IMC Meeting 114

Tabel 3.14 Pencapaian kegiatan-kegiatan Persiapan dan Pengembangan Compact-2 tahun 2022 115

Tabel 3.15 Perbandingan Capaian Kinerja 2021 dan 2022 117

Tabel 3.16 Daftar Usulan Pinjaman Komersial Luar Negeri 2022 121

Tabel 3.17 Capaian Realisasi Anggaran tahun 2022 124

Tabel 3.18 Realisasi Penyerapan Anggaran Direktorat Pendanaan Bilateral Tahun 2021 125

Tabel 3.19 Daftar Korespondensi yang Dilaksanakan oleh Direktorat Pendanaan Bilateral berdasarkan Sumber Pendanaan selama Tahun 2022 130

## DAFTAR GAMBAR

[Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Pendanaan Bilateral 3](file://localhost/C:/Users/Bappenas/OneDrive/Documents/Bilateral/Laporan%20Kinerja%20(LKj)/2022/LkJ%202022%20Dit%20Pendanaan%20Bilateral%20(1).docx%23_Toc124489388)

Gambar 3. 1 Alur Evaluasi Internal 129

## BAB 1 PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap unit kerja di kementerian/lembaga menyusun sebuah laporan kinerja (LKj) setiap tahunnya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja tersebut. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pendanaan Bilateral menyusun LKj tahun 2022 yang memuat informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022.

### Maksud dan Tujuan

Penulisan LKj 2022 adalah untuk memaparkan rencana dan capaian kinerja Direktorat Pendanaan Bilateral sepanjang tahun 2022 dalam rangka mewujudkan:

1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
2. Keselarasan antara RKP dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)

### Dasar Hukum

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 merupakan wujud dari pemenuhan kewajiban Direktorat Pendanaan Bilateral sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas. Penulisan LKj 2022 disusun dengan mengacu kepada landasan hukum yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN / Bappenas
5. Pedoman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian PPN/ Bappenas.

### Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

### Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas RI No. 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas Direktorat Pendanaan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan luar negeri bilateral. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendanaan Bilateral menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan luar negeri bilateral dan kredit ekspor;
2. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan luar negeri bilateral dan kredit ekspor;
3. Penyusunan rencana dan penyiapan usulan kerjasama pendanaan luar negeri bilateral dan kredit ekspor untuk pelaksanaan pembangunan;
4. Koordinasi kerjasama pendanaan pembangunan bilateral dalam rangka pencarian sumber pendanaan luar negeri bilateral;
5. Penyusunan rencana kerja sama pendanaan luar negeri bilateral dan kredit ekspor dalam rangka perumusan rancangan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kementerian Keuangan;
6. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang pendanaan luar negeri bilateral dan kredit ekspor;
7. koordinasi pengendalian dan percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pendanaan luar negeri bilateral dan kredit ekspor;
8. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendanaan luar negeri bilateral dan kredit ekspor;
9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan luar negeri bilateral dan kredit ekspor; dan
10. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Pendanaan Bilateral.

### Struktur Organisasi

Struktur organisasi Direktorat Pendanaan Bilateral di tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 3 Tahun 2022 pasal 174 yang berbunyi Susunan organisasi Direktorat Pendanaan Bilateral terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dibentuk tim-tim kecil yang terdiri atas koordinator dan anggota tim. Pada tahun 2022 telah dibentuk 7 tim kecil untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pendanaan Bilateral yang terdiri atas:

1. Tim Pendanaan Bilateral Asia
2. Tim Pendanaan Bilateral Eropa
3. Tim Pendanaan Bilateral Amerika, Pasifik dan Timur Tengah dan Kajian
4. Tim Mitra Kerja Setkab dan Evaluasi
5. Tim Pemantauan
6. Tim Persiapan Proyek MCC dan PPK
7. Tim Manajemen Internal

Tiap-tiap tim memiliki koordinator/PIC dan anggota. Seorang staf dapat berada dalam lebih dari 1 tim. Koordinator di satu tim dapat menjadi anggota di tim lainnya. Selain tim yang bersifat regular (ada sepanjang tahun) terdapat pula tim yang bersifat adhoc, sesuai dengan kebutuhan di Direktorat Pendanaan Bilateral.

**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Pendanaan Bilateral**

Direktur Pendanaan Bilateral

**Kelompok Jabatan Fungsional Perencana**

Tim Pendanaan Bilateral Amerika, Pasifik, Timteng dan Kegiatan Kajian

Tim Pemantauan

Tim Adhoc

Tim Manajemen Internal

Tim Penyiapan Kegiatan MCC dan PPK

Tim Mitra Setkab dan Kegiatan Evaluasi

Tim Pendanaan Bilateral Eropa

Tim Pendanaan Bilateral Asia

**PPNPN Pengolah Data dan Kesekretariatan**

### Sumber Daya Manusia

Jumlah total Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pendanaan Bilateral mencapai 54 orang. Dalam hal ini, para pegawai tersebut dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu (1) SDM yang bekerja langsung di bawah Direktorat Pendanaan Bilateral yang bertempat di Lantai 12 Gedung Bappenas (Wisma Bakri 2) Jl. HR. Rasuna Said sebanyak 23 orang dan (2) SDM yang bekerja pada Proyek Persiapan dan Pengembangan MCC dan Sekretariat PPK DM XVI sebanyak 31 orang.

#### SDM Direktorat Pendanaan Bilateral di Gd. Bappenas Lt. 12 (Wisma Bakri 2)

Direktorat Pendanaan Bilateral memiliki 12 (dua belas) aparatur sipil negara berstatus pegawai negeri sipil (PNS) pada awal tahun 2022. Kemudian pada bulan Februari tahun 2022, Direktorat Pendanaan Bilateral memperoleh tambahan sumber daya manusia sebanyak 2 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain PNS dan CPNS, pelaksanaan tugas dan fungsi harian di Direktorat Pendanaan Bilateral dibantu juga oleh 8 orang tenaga pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) yang terdiri atas 1 orang Koordinator Administrasi dan Pelaksanaan Anggaran, 4 orang Tenaga Pengolah Data, 1 orang Sekretaris Bilingual, 1 orang arsiparis, 1 orang supir dan 1 orang pramubakti.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Menteri PPN / Sestama Bappenas Nomor: KEP.7/SES/HK/01/2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kementerian PPN/Bappenas, pada tahun 2022 Direktorat Pendanaan Bilateral membutuhkan pegawai sebanyak 37 orang. Apabila dilihat dari total kebutuhan pegawai tersebut, maka dapat dikatakan bahwa jumlah pegawai di Direktorat Pendanaan Bilateral masih belum sesuai dengan beban kerja yang ada dimana saat ini masih sejumlah 14 PNS dan CPNS serta 8 orang PPNPN. Selain itu terdapat kecenderungan meningkatnya beban pekerjaan pada sebagian Tim, seperti Tim Mitra Setkab, yang mana masih diperlukan tambahan pegawai dengan kompetensi sesuai kebutuhan. Dari sisi administrasi, saat ini pengelolaan administrasi dan kesekretariatan juga masih dilaksanakan oleh staf non PNS sehingga belum dapat dijamin keberlanjutannya. Tabel berikut berisi rincian PNS dan CPNS aktif yang bekerja pada tahun 2022 di Direktorat Pendanaan Bilateral:

**Tabel 1. 1 Nama dan Jabatan PNS dan CPNS Direktorat Pendanaan Bilateral Periode Januari - Desember 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan (Januari 2022)** | **Jabatan (Februari-Des 2022)** |
| 1 | Kurniawan Ariadi,  S. IP, M.Com | Direktur Kerja Sama Pendanaan Bilateral | Direktur Pendanaan Bilateral |
| 2 | Nursyaf Rullihandia S., ST, MM | Perencana Madya/ Koordinator Fungsi Subdit Pendanaan Bilateral Asia | Perencana Madya/ Koordinator Fungsi Subdit Pendanaan Bilateral Asia |
| 3 | Uthami Sary, S.Sos, MSc. | Perencana Madya/ Koordinator Fungsi Subdit Pendanaan Bilateral Amerika, Pasifik dan Timur Tengah | Perencana Madya/ Koordinator Fungsi Subdit Pendanaan Bilateral Amerika, Pasifik dan Timur Tengah |
| 4 | M. Firda Fauzan, S.T, MPA | Perencana Madya/ Koordinator Fungsi Subdit Pendanaan Bilateral Eropa | Perencana Madya/ Koordinator Fungsi Subdit Pendanaan Bilateral Eropa |
| 5 | Deti Kusmalawati, S.IP, MA, Ph.D | Staf Perencana Tk 1 (PIC Mitra Kerja Setkab dan Kegiatan Evaluasi) | Staf Perencana Tk 1 (PIC Mitra Kerja Setkab dan Kegiatan Evaluasi) |
| 6 | Afrian Iskandar, S.Kom, MSE, MA | Perencana Madya (PIC Kegiatan Pemantauan) | Perencana Madya (PIC Kegiatan Pemantauan) |
| 7 | Ahmad Fitriyadi, ST | Staf Perencana Tk 1 (PIC Penyiapan Proyek MCC dan PPK) | Staf Perencana Tk 1 (PIC Penyiapan Proyek MCC dan PPK) |
| 8 | Mesi Purnamasari, S.Sos, MA | Perencana Madya (PIC) Manajemen Internal | Perencana Madya (PIC) Manajemen Internal |
| 9 | Wiwit Widodo, S.Sos, M.E | Perencana Madya | Perencana Madya |
| 10 | Dimas Hartanto Effendy, ST | Staf Perencana | Perencana Ahli Pertama |
| 11 | Rian Wicaksana, ST | Staf Perencana | Perencana Ahli Pertama |
| 12 | Zahra Mufidah, ST | Staf Perencana | Perencana Ahli Pertama |
| 13 | Rayhan Rahmanda, ST | - | Calon Perencana Ahli Pertama |
| 14 | Krisdayanti Aprilia, ST | - | Calon Perencana Ahli Pertama |

#### SDM Sekretariat Persiapan Proyek Hibah MCC dan PPK DM XVI

Salah satu penugasan yang diberikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Direktorat Pendanaan Bilateral adalah mengkoordinasikan kegiatan persiapan Proyek Hibah Millenium Challenge Corporation (MCC). Untuk melaksanakan tugas tersebut telah dibentuk

sekretariat persiapan Proyek MCC yang bertempat di Jalan Lembang No. 26 Menteng, Jakarta Pusat dengan sumber daya manusia sebanyak 23 orang yang terdiri atas 14 orang tenaga ahli (konsultan), 4 orang program officer, dan 5 orang tenaga administrasi dan keuangan. Adanya Sekretariat MCC membuat dana yang dikelola Direktorat Pendanaan Bilateral berjumlah lebih dari Rp 10 milyar sehingga dibentuklah PPK tersendiri yaitu PPK DM

XVI. Di tahun 2022, staf yang bekerja di PPK DM XVI berjumlah 3 orang adapun lokasi sekretariat PPK DM XVI berada di bangunan yang sama dengan Sekretariat Persiapan Proyek MCC yaitu di JL. Lembang No. 26 Menteng Jakarta Pusat. Selain itu terdapat pula 1 orang kurir, 2 orang pramubakti, 1 orang petugas keamanan (*security*) serta 1 orang pengemudi yang bertugas di sekretariat. Dengan demikian jumlah total SDM di Sekretariat Persiapan Proyek Hibah MCC dan PPK DM XVI adalah 31 orang.

Adapun pengkategorian PNS, CPNS dan PPNPN berdasarkan jabatan/peran, gender dan Pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Distribusi PNS, CPNS dan PPNPN berdasarkan Jabatan/Peran, Gender dan Pendidikan di Direktorat Pendanaan Bilateral Tahun 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jabatan/Peran** | **Jumlah** | **Gender** | | **Pendidikan** | | | |
| **Pria** | **Wanita** | **SMA- D3** | **S1** | **S2** | **S3** |
| 1 | Direktur | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 3 | Perencana Ahli Madya/Koord. | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 | - |
| 5 | Perencana Ahli Madya | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 | - |
| 6 | Perencana Ahli Pertama | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - |
| 7 | Staff Perencana | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 8 | Calon Perencana Ahli Pertama | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 9 | Staf Pendukung/ PPNPN Substansi | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 10 | Staf Pendukung/ PPNPN Administrasi | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 11 | Pramu Bakti | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 12 | Supir | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| **Jumlah** | | **23** | **16** | **7** | **4** | **8** | **10** | **1** |

### Potensi dan Permasalahan Strategis

### Potensi/Peran Strategis

Direktorat Pendanaan Bilateral memiliki sejumlah potensi yang dapat mendukung kelancaran tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan adaptif terhadap kebutuhan dalam perencanaan pembangunan nasional.

Mayoritas PNS di Direktorat Pendanaan Bilateral mempunyai kualifikasi pendidikan tertinggi Strata 2. Di samping itu, staf pendukung/PPNPN substansi merupakan lulusan dari universitas negeri ternama di Indonesia. Faktor ini merupakan potensi mengingat substansi pekerjaan di lingkungan Direktorat Pendanaan Bilateral membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan menganalisis data dengan cermat dan teliti untuk menghasilkan rekomendasi bagi penyusunan kebijakan pemerintah yang lebih baik di bidang pendanaan pembangunan.

1. Jaringan koordinasi atau Interaksi (*engagement)* yang luas dengan berbagai stakeholder pendanaan pembangunan bilateral, seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, organisasi non pemerintah/organisasi sipil masyarakat, akademisi, sektor swasta dan donor/lender internasional.
2. Fasilitas kerja yang memadai

Selama 2022, mengingat Pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia, para pegawai Direktorat Pendanaan Bilateral lebih sering melaksanakan tugasnya secara virtual. Namun, kondisi ini tidak menghambat kualitas pekerjaan karena setiap pegawai mendapat fasilitas kerja yang memadai seperti laptop dan paket data. Dengan adanya fasilitas kerja yang memadai tersebut, para pegawai juga tetap mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kompetensi masing-masing dengan mengikuti berbagai pelatihan yang dilaksanakan secara virtual.

### Permasalahan Strategis

Selama tahun 2022, terdapat satu permasalahan strategis utama yang dihadapi Direktorat Pendanaan Bilateral yaitu refocusing anggaran. Refocusing anggaran menyebabkan pembatasan atau penghapusan sejumlah kegiatan yang krusial untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat. Akibat refocusing anggaran tersebut, total alokasi anggaran Dit Pendanaan Bilateral (di luar alokasi yang bersumber dari PPK DM I dan PPK DM III) yang semula mencapai Rp 10.733.000.000,00 berkurang sekitar 9% menjadi Rp 9.780.284.000,00. Pengurangan anggaran ini menimbulkan dampak-dampak sebagai berikut:

1. Kegiatan pemantauan lapangan dan evaluasi proyek-proyek yang dibiayai pinjaman dan hibah luar negeri bilateral hanya bisa dilakukan secara terbatas atau secara virtual saja.
2. Pengadaan konsultan Compact Development Team untuk melaksanakan kegiatan persiapan dan pengembangan program Compact II tidak bisa dilakukan secara maksimal. Akibatnya, sebagian besar staf terpaksa merangkap pekerjaan.
3. Koordinasi dengan stakeholders di daerah hanya bisa dilakukan secara terbatas atau secara virtual saja.
4. Penurunan spesifikasi konsultan.
5. Pembatasan jumlah hari dan orang dalam melakukan koordinasi ke daerah atau menghadiri workshop/rapat, termasuk yang dilaksanakan instansi lain.
6. Ditiadakannya kegiatan bilateral meeting secara tatap muka dengan para mitra pembangunan bilateral.

## BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

### Rencana Strategis 2020 - 2024

Sebagai bagian dari Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Pendanaan Bilateral menyusun indikator kinerja tahun 2022 yang berasal dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan periode tahun 2020-2024. Dalam Renstra Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan, Direktorat Pendanaan Bilateral berkontribusi dalam pencapaian 3 (tiga) indikator tersebut terpetakan dalam 11 indikator kinerja Direktorat Pendanaan Bilateral tahun 2022. Adapun 3 (tiga) indikator tersebut terdiri dari:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan;
2. Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan; dan
3. Persentase Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan *Stakeholder* Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan.

### Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja tahun 2022 Direktorat Pendanaan Bilateral terdiri atas indikator-indikator kinerja yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan tahun 2022. Perjanjian Kinerja Direktorat Pendanaan Bilateral Ditandatangani oleh Direktur Pendanaan Bilateral dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terdapat 11 indikator kinerja Direktorat Pendanaan Bilateral yang terbagi atas 5 indikator kinerja di bidang Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan; 3 indikator kinerja di bidang Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan dan 3 indikator kinerja bidang Persentase Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan Stakeholder Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan.

Sepanjang tahun 2022 terdapat 1 (satu) kali revisi pada Perjanjian Kinerja Direktorat Pendanaan Bilateral yang dilakukan untuk menyesuaikan indikator kinerja direktorat dengan revisi Renstra Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan 2020-2024 serta Peraturan Menteri PPN/Bappenas nomor 3 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas. Dalam peraturan mengenai SOTK tersebut, terdapat penambahan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kredit ekspor. Selain itu, berdasarkan Surat Tugas No. 58/ST/SES/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 Direktorat Pendanaan Bilateral ditugaskan sebagai penanggung jawab program, penanggung jawab kegiatan, dan pelaksanaan teknis penyusunan RKP, Rencana Kerja K/L, dan RKA K/L Sekretariat Kabinet (Setkab) tahun 2023. Sesuai dengan penunjukkan tersebut, pada tahun 2022, Direktorat Pendanaan Bilateral menjadi mitra kerja Setkab dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Setkab TA 2022.

Sehubungan dengan perubahan SOTK dan penunjukkan Direktorat Pendanaan Bilateral sebagai mtitra kerja Setkab, maka terjadi penyesuaian PK yang telah mengakomodir pula perubahan anggaran Direktorat Pendanaan Bilateral dari yang semula Rp 11.733.000.000 di Perjanjian Kinerja Awal menjadi Rp. 13.069.408.000. Tabel 2.1 berikut ini merupakan rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktorat Pendanaan Bilateral yang telah dimutakhirkan.

**Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Direktorat Pendanaan Bilateral**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN KEGIATAN/OUTPUT** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I. | **Sasaran Strategis/Program 1:**  Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional | | |
| **Indikator SS 1:**  Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan | | |
| 1. | Rencana Pembangunan Jangka Menengah | a. % Keselarasan bidang pada project pipeline pendanaan bilateral tahunan dengan prioritas dan/atau dengan major project RPJMN | 85% |
| 2. | Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) | a. % Rekomendasi rencana penarikan PHLN yang digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif | 85% |
| b. % Keselarasan sasaran program Renja K/L mitra kerja dengan sasaran Renstra K/L mitra kerja | 85% |
| c. % Keselarasan sasaran program Renja K/L mitra kerja dengan RKA mitra kerja | 85% |
| d. % Daftar kegiatan yang ditindaklanjuti oleh | 85% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN KEGIATAN/OUTPUT** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** |
|  |  | Kementerian Keuangan untuk proses Loan Agreement dalam rangka pembiayaan RKP |  |
| II. | **Sasaran Strategis/Program 2:**  Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional | | |
| **Indikator SS 2:**  Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan | | |
| 1. | Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan | a. % ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup pendanaan bilateral dan kredit ekspor terhadap proyek-proyek on-going | 88-91% |
| b. % ketersediaan hasil analisis terhadap pemantauan lapangan dan evaluasi proyek- proyek pendanaan bilateral dan kredit ekspor | 88-91% |
| 2. | Kebijakan Percepatan Pembangunan | a. % rekomendasi pengendalian dan pelancaran rencana kegiatan pendanaan bilateral yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait | 88-91% |
| III. | **Sasaran Strategis/Program 3:**  Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner | | |
| **Indikator SS 3.2:**  Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L Bidang Pendanaan Pembangunan | | |
| 1. | Kebijakan Inovasi Pembangunan | a. % rekomendasi hasil telaah/analisis pendanaan bilateral dan kredit ekspor yang diterima oleh Deputi | 85-89,9% |
| b. % prakarsa pengembangan pendanaan bilateral dan kredit ekspor yang diterima dan didukung oleh stakeholders terkait | 85-89,9% |
| c. % tercapainya target penyiapan Program Compact II terhadap rencana kerja tahunan | 85-89,9% |

Kegiatan:

Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Bilateral

Anggaran:

Rp 13,069,408,000,00

### Kamus Indikator/Formula Perhitungan Capaian Indikator Direktorat Pendanaan Bilateral Tahun 2022

Sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja Direktorat Pendanaan Bilateral tahun 2022 maka disusun kamus indikator/formula perhitungan capaian. Di tahun 2022 Direktorat Pendanaan Bilateral memiliki 11 IKU yang kemudian dijabarkan formulasi perhitungan berdasarkan masing-masing IKU sebagaimana dijelaskan pada lampiran.

### Rencana Kerja Tahun 2022

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pendanaan Bilateral sepanjang tahun 2022 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022 yang disusun dengan mengkombinasikan antara 11 indikator kinerja direktorat dan kegiatan yang telah dikodifikasi pada aplikasi IDW/Bitrix. Dalam Dokumen RKT 2022 dipetakan kegiatan dan sub kegiatan di Direktorat Pendanaan Bilateral selama kurun waktu 12 bulan, serta alokasi sumber daya manusia yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan yang terdiri atas koordinator kegiatan dan anggota tim.

Pada tahun 2022 terdapat 9 kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pendanaan Bilateral yang dapat dikelompokan dalam

* + 1. Perencanaan dan Penganggaran (3 kegiatan),
    2. Pengendalian (2 kegiatan),
    3. Enabler (2 kegiatan),
    4. Penugasan Khusus (1 kegiatan) dan
    5. Manajemen Internal (1 kegiatan).

Kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan tasking-tasking dalam aplikasi IDW/Bitrix, sehingga pelaksanaan dapat dipantau secara harian, bulanan dan tahunan.

**RENCANA KERJA TAHUNAN DIREKTORAT PENDANAAN BILATERAL TAHUN 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENCANA KERJA TAHUNAN** | | | | **WAKTU/BULAN PELAKSANAAN** | | | | | | | | | | | | **ALOKASI SDM** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |  |  |
| IKU ES II | No | Kegiatan | Sub Kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Koord.** | **Anggota Tim** |
|  | **A** | **PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| % Keselarasan bidang pada project pipeline pendanaan bilateral dan kredit ekspor tahunan dengan prioritas dan/atau dengan major project RPJMN  % prakarsa pengembangan pendanaan bilateral dan kredit ekspor yang diterima dan didukung oleh stakeholders terkait  % Rekomendasi rencana penarikan PHLN yang digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif  % Daftar Kegiatan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan untuk proses Loan Agreement dalam rangka pembiayaan RKP  % rekomendasi pengendalian dan pelancaran rencana kegiatan pendanaan bilateral yang ditindaklanjuti oleh K/L | 1 | Koordinasi Penyusunan dan Pengembangan Kerjasama dan Pendanaan Bilateral serta Aktifitas Pengembangan Proyek | Mengkoordinasikan pertemuan bilateral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NR (Asia)  (Eropa)  US (Asik Timteng)  DK( PKLN) | Asia: AI, WW, RW, DH  Eropa: MP, ZM  Asik Timteng: IA  PKLN: MF, FA |
| Mengkoordinasikan pertemuan konsultasi/koordinasi reguler dengan mitra pembangunan/pelaksana kegiatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keikutsertaan pada forum pengembangan kerjasama bilateral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Koordinasi Rencana Kegiatan Kerjasama Pendanaan Bilateral | Mengkoordinasikan penyusunan rencana pendanaan luar negeri bilateral dalam rangka pembiayaan RKP dan RAPBN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mengkoordinasikan persiapan dan/atau penilaian rencana kegiatan proyek-proyek pinjaman bilateral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menyiapkan Daftar Kegiatan pinjaman bilateral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mengkoordinasikan Rekomendasi Pinjaman Komersial LN BUMN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| terkait | 3 | Koordinasi pengendalian dan pelancaran pelaksanaan rencana kegiatan pendanaan luar negeri bilateral | Mengkoordinasikan pengendalian dan pelancaran pelaksanaan rencana kegiatan pendanaan luar negeri bilateral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **B** | **PENGENDALIAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| % ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup kerjasama pendanaan bilateral dan kredit ekspor terhadap proyek-proyek on-going | 4 | Pemantauan proyek-proyek yang dibiayai pendanaan luar negeri bilateral | Melakukan pemantauan PHLN triwulanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AI | NR, US, MFF, DK, AF, MP,  WW, DH,  RW, ZM, AA, IA |
| Melakukan pemantauan lapangan dan penyusunan laporan serta rekomendasi pelancaran proyek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % ketersediaan hasil analisis terhadap pemantauan lapangan dan evaluasi proyek- proyek pendanaan bilateral | 5 | Evaluasi Peran Usaha Nasional dalam Proyek Infrastruktur yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri | Pembentukan Tim Kajian dan rekrutmen tenaga ahli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DK | NR, MFF, DK, AI,  MP, WW,  ZM, DH, RW, IA |
| Pembuatan Outline dan penulisan laporan Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mengumpulkan data dan analisis data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menyelenggarakan pertemuan Koordinasi/FGD/sejenisnya yang melibatkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Membuat dan mengumpulkan laporan evaluasi (draft 1, draft 2, draft 3 dan draft final) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **C** | **ENABLER** | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % rekomendasi hasil telaah/analisis pendanaan bilateral dan kredit ekspor yang diterima oleh Deputi | 6 | Kajian Pengembangan Pembiayaan Model Delivery Inovatif sebagai Lesson Learnt Proyek Hibah Luar negeri | Pembentukan Tim Kajian dan rekrutmen tenaga ahli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | US | NR, MFF, DK, AI, MP,  WW, ZM, DH,  RW, IA, FA |
| Penyusunan outline kajian dan rencana kerja kajian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengumpulan data, informasi dan dokumen pendukung lainnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konsinyering/FGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Penulisan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % tercapainya target penyiapan Program Compact II terhadap rencana kerja tahunan | 7 | Koordinasi Khusus Lingkup Kerjasama Pendanaan Bilateral : Program Compact II | Amandemen Dokumen Compact Development Funding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AF | DK |
| Menyiapkan dan menetapkan proyek- proyek/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Compact-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menetapkan dan membentuk Lembaga Wali Amanat Pengelola Hibah MCC 2 termasuk pembentukan Majelis Wali Amanat (MWA) dan Pengelola Dana Amanah (PDA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembentukan Organisasi MCA Indonesia (MCAI) sebagai pelaksana program, yaitu merumuskan dan menyeleksi Procurement Agent (PA) dan Financial Agent (FA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Membentuk *Technical Working Committee (TWC)* Transportasi serta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sekretariat/ perwakilan di 5 (lima) lokasi pelaksanaan program; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pendampingan *Due Diligence* MCC Amerika Serikat atas usulan proyek dalam Program Compact 2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Membuat, membahas dan negosiasi *Grant Agremeent* Hibah Program Compact 2 bersama MCC Amerika Serikat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **D.** | **PENUGASAN KHUSUS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| % Keselarasan sasaran program Renja K/L mitra kerja dengan sasaran Renstra K/L mitra kerja  % Keselarasan sasaran program Renja K/L mitra kerja dengan RKA mitra kerja | 8 | Penugasan menjadi mitra Sekretariat Kabinet dalam penyusunan RKP | Bilateral Meeting Revisi Renstra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DK | FA |
| Review Baseline dan penyusunan angka dasar TA 2023 (APP masih koordinir karena surat penugasan belum terbit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pengusulan dan penilaian usulan baru TA 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rancangan Awal RKP & SB Pagu Indikatif TA 2023 Maret (Rakorbangpus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Musrenbangnas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Memonitor penyampaian Rancangan Renja K/L kepada Bappenas & Kemenkeu paling lambat Minggu ke-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trilateral Meeting Penelaahan Rancangan Renja K/L dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rancangan RKP sampai dengan Minggu ke-1 Juni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro (KEM), Pemutakhiran Ketersediaan Anggaran, Trilateral Meeting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perpres RKP, SB Pagu Anggaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trilateral Meeting Penelaahan/pemutakhiran Rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L dan RKA K/L (dimulai paling lambat 2 minggu setelah SB Pagu Angaran) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Memonitor penyampaian Renja K/L (hasil penelahaan) kepada Bappenas dan Kemenkeu paling lambat Juli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Memonitor follow up penerbitan Surat Menkeu tentang alokasi Anggaran K/L untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan Penyesuaian Renja K/L dan RKA K/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trilateral Meeting Penelaahan RKA K/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Memonitor penyusunan dan penetapan DIPA K/L dan DIPA BUN setelah Perpres Rincian APBN ditetapkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pemutakhiran RKP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **E** | **MANAJEMEN INTERNAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 9 | Melaksanakan manajemen internal (RB, SPIP, SAKIP) | Koordinasi Penyusunan LKj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | US (LKj  Direktorat)  DK (LKj  Kedeputian) | ZM, RW, DH, IA  PD, AR, SB |
| Koordinasi Persiapan Penilaian Evaluasi RB oleh MenPANRB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MP  (IDW,  Penilaian Kinerja dan Kearsipan  , SPIP)  AF  (kegiatan dan anggaran) | AS, IA |
| Koordinasi Evaluasi SAKIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinasi IDW, Penilaian Kinerja dan Kearsipan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinasi Kegiatan dan Anggaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinasi Penilaian Maturitas SPIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Alokasi Anggaran Tahun 2022

Jumlah alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran Direktorat Pendanana Bilateral pada tahun 2022 pada awalnya adalah Rp 10.733.000.000 Kemudian terdapat 2 (dua) kali *refocusing* anggaran hingga akhirnya menjadi sebesar 9.780.294.000,00. Jumlah tersebut dialokasikan untuk membiayai 8 kegiatan direktorat sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2. 2 Alokasi Anggaran pada Dit Pendanaan Bilateral Tahun 2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kegiatan** | **PAGU AWAL** | **REFOCUSING I** | **REFOCUSING II** | **PAGU MENJADI** |
| **A. Koordinasi Umum** | |  |  |  |  |
| 1 | Kajian Pengembangan Pembiayaan Model Delivery Inovatif sebagai Lesson Learn Proyek Hibah Luar Negeri | 170.225.000 | - | 90.000.000 | 80.225.000 |
| 2 | Koordinasi Rencana Kegiatan Pendanaan Luar Negeri Bilateral | 469.234.000 | - | 10.996.000 | 458.238.000 |
| 3 | Koordinasi Penyusunan dan Pengembangan Kerjasama dan Pendanaan Bilateral serta Aktivitas Pengembangan Proyek | 433.923.000 | 30.000.000 | - | 403.923.000 |
| 4 | Koordinasi Peningkatan Kesiapan Pendanaan Luar Negeri Bilateral | 63.105.000 | 14.100.000 | - | 49.005.000 |
| 5 | Koordinasi Mitra Sekretariat Kabinet | 73.890.000 |  | 6.500.000 | 67.390.000 |
| 6 | Pemantauan Proyek- Proyek Yang Didanai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Bilateral | 333.670.000 | - | 7.000.000 | 326.670.000 |
| 7 | Evaluasi Peran Usaha Nasional dalam Proyek Infrastruktur yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri | 56.300.000 | - | 6.900.000 | 49.400.000 |
| **B. Koordinasi Khusus** | |  |  |  |  |
| 8 | Koordinasi Persiapan dan Pengembagan Program Hibah Compact II | 9.132.653.000 | 777.210.000 | 10.000.000 | 8.345.443.000 |
|  | **TOTAL** | **10.733.000.000** | **821.310.000** | **131.396.000** | **9.780.294.000** |

## BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

### Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Nasional

#### Evaluasi Paruh Waktu

Evaluasi Paruh Waktu perlu dilakukan untuk seluruh dokumen perencanaan, termasuk terhadap Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) / Blue Book tahun 2020-2024. Pada dokumen DRPLN-JM sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: KEP.149/M.PPN/HK/12/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: KEP.80/M.PPN/HK/10/2020 tentang Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) tahun 2020-2024 terdapat 84 proyek yang merupakan proyek prioritas berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024.

Hingga tahun 2022 telah terdapat 15 proyek yang diampu oleh Direktorat Pendanaan Bilateral yang tercantum dalam DRPLN-JM 2020-2024 dimana saat ini proses perencanaan dan pematangannya telah diselesaikan, dan siap untuk memasuki tahap pelaksanaan. Proses perencanaan proyek dinyatakan telah selesai saat *loan agreement* dari proyek tersebut telah diterbitkan. Pada tabel di bawah ini, tercantum keterangan lebih lanjut dari 15 proyek yang *Loan Agreement-*nya telah diterbitkan.

#### Tabel 3. 1 Daftar Proyek Pinjaman Luar Negeri Bilateral dalam DRPLN-JM yang Telah Tanda Tangan *Loan Agreement*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul Kegiatan** | **Payung Program Dalam *Blue Book*** | **Nilai Pinjaman** | **Tanggal Loan Agreement** | **Pemberi Pinjaman** |
| **KEMENTERIAN PUPR – DITJEN BINA MARGA** | | | | | |
| 1. | *Development of Serang - Panimbang Toll Road (Cileles*  *- Panimbang Section)* | *Toll Road Development Program* | USD 251.275.159 | 09/07/2022 | Tiongkok |
| **KEMENTERIAN PUPR – DITJEN CIPTA KARYA** | | | | | |
| 2. | *The Development of Regional Water Supply System in Wosusokas* | *Water Supply System Development Program* | EUR 85.700.000 | 17/02/2021 | Jerman (KfW) |
| **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN** | | | | | |
| 3. | *Patimban Port Development Project (Phase I-2)* | *Marine Connectivity Infrastructure Development Program* | JPY 70.195.000.000 | 20/05/2022 | Jepang |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul Kegiatan** | **Payung Program Dalam *Blue Book*** | **Nilai Pinjaman** | **Tanggal Loan Agreement** | **Pemberi Pinjaman** |
| 4. | *Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation* | *Transportation Safety and Security Improvement Program* | USD 67.255.000 | 27/04/2021 | Korea (EDCF) |
| **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI** | | | | | |
| 5. | *The Quality Improvement Academic Hospital of Brawijaya University* | *Improvement of National Capability for Science and Technology*  *Adaption and Innovation Creation Program* | EUR 37.000.000 | 30/12/2021 | Jerman (KfW) |
| **KEMENTERIAN PERTAHANAN** | | | | | |
| 6. | *Upgrading Medical Equipment and Supporting Facilities for Air Force Hospital Suhardi Hardjolukito-Yogyakarta* | *Health Services Improvement Program* | EUR 9.950.000 | 20/05/2022 | Austria |
| 7. | *Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities for dr. Ramelan Naval Hospital - Surabaya* | *Health Services Improvement Program* | EUR 10.000.000 | 11/12/2020 | Austria |
| 8. | *Improvement of Capabilities and Capacities of Muhammad Sutomo Air Force Hospital - Pontianak* | *Health Services Improvement Program* | EUR 12.000.000 | 11/12/2020 | Austria |
| 9. | *Upgrading Medical Equipment and Supporting Facilities for Army Hospital Udayana* | *Health Services Improvement Program* | EUR 8.000.000 | 10/01/2022 | Austria |
| 10. | *Upgrading Medical Equipment and Supporting Facilities for Naval Hospital Dr. R. Oetojo Sorong* | *Health Services Improvement Program* | EUR 15.000.000 | 10/01/2022 | Austria |
| **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | |
| 11. | *Strengthening e-Government Infrastructure (Development of Data Center in Jabodetabek Area)* | *Information and Communication Technology Infratructure Development Program* | EUR 140.250.000 | 30/12/2020 | Perancis |
| **KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN** | | | | | |
| 12. | *Maritime Vocational Training Center in Makasssar* | *Vocational Training Enhancement Program* | EUR 12.599.493 | 25/02/2021 | Austria |
| 13. | *Development of Maritime Vocational Training Centers - Serang* | *Vocational Training Enhancement Program* | EUR 14.883.000 | 11/08/2020 | Austria |
| **LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul Kegiatan** | **Payung Program Dalam *Blue Book*** | **Nilai Pinjaman** | **Tanggal Loan Agreement** | **Pemberi Pinjaman** |
| 14. | *Procurement of Multi Purposes Research Vessel* | *Improvement of National Capability for Science and Technology*  *Adaption and Innovation Creation Program* | USD 89.008.005,3 | 08/06/2021 | Perancis (AFD) |
| **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | |
| 15 | *Outer Ring Fishing Ports Development (Eco Fishing Port)* | *Fisheries and Marine Management Program* | USD 105.000.000 | 23/12/2022 | (AFD) |

#### Evaluasi Paruh Waktu Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Sesuai dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (tahun) pelaksanaan Renstra.

Dalam rangka penjabaran tujuan Kementerian PPN/Bappenas tersebut, selanjutnya Rencana Strategis Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan 2020-2024 menetapkan tujuan dan sasaran Kedeputian ini sebagai berikut:

* 1. **Tujuan-1**, mewujudkan perencanaan pembangunan bidang pendanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia, yang meliputi 2 (dua) **sasaran** sebagai berikut:
     1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional bidang pendanaan pembangunan.
     2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional lingkup bidang pendanaan pembangunan.
  2. **Tujuan-2,** mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan bidang pendanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang meliputi 1 (satu) **sasaran** sebagai berikut:
     1. Terwujudnya kebijakan pendanaan pembangunan nasional yang visioner.
  3. **Tujuan-3,** mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan bidang pendanaan pembangunan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien, yang meliputi 1 (satu) **sasaran** sebagai berikut:
     1. Terwujudnya kinerja Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Dari keempat sasaran Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan tersebut, Direktorat Pendanaan Bilateral mendukung pencapaian 3 (tiga) sasaran yaitu:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional;
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional; dan
3. Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner.

Tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan mengingat Renstra tersebut baru ditetapkan pada tahun 2021. Dengan demikian, evaluasi waktu ini dilakukan dengan melihat pencapaian target pada masing-masing IKU yang tertera pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan 2022 yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan 2020-2024. Untuk melihat kesesuaiannya dengan Renstra Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan, maka disusun matriks sandingan sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Secara umum, dapat dilihat bahwa kinerja Direktorat Pendanaan Bilateral telah memenuhi bahkan melampaui beberapa target yang telah ditetapkan pada Renstra Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan.

**Tabel 3. 2 Sandingan Target dan Realisasi Kinerja Direktorat Pendanaan Bilateral yang tercantum dalam Rencana Strategis Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan 2020-2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kedeputian**  **Bidang Pendanaan Pembangunan** | | **Direktorat Pendanaan Bilateral** | | | | | |
| **Sasaran Strategis Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan** | **Indikator Kinerja Kedeputian** | **Indikator Kinerja Direktorat Tahun 2021** | **Target** | **Realisasi** | **Indikator Kinerja Direktorat Tahun 2022** | **Target** | **Realisasi** |
| Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional | Indeks Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan | % Keselarasan bidang pada project pipeline pendanaan bilateral tahunan dengan prioritas dan/atau dengan  major project RPJMN | 80% | 100%\*) | Persentase (%) keselarasan bidang pada project pipeline pendanaan bilateral dan kredit ekspor tahunan dengan prioritas dan/atau dengan  major project RPJMN | 85% | 100% |
| % Rekomendasi rencana penarikan PHLN yang digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif | 80% | 84% | Persentase (%) rekomendasi rencana penarikan PHLN yang digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif | 85% | 93,89% |
|  |  | -\*\*) | Persentase (%) keselarasan sasaran program Renja K/L mitra  kerja dengan sasaran Renstra K/L mitra kerja | 85% | 95% |
|  |  | -\*\*) | Persentase (%) keselarasan sasaran program Renja K/L mitra kerja dengan RKA mitra kerja | 85% | 100% |
| % Daftar Kegiatan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan untuk proses Loan Agreement dalam rangka  pembiayaan RKP | 80% | 100% | % Daftar kegiatan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan untuk proses *Loan Agreement* dalam rangka pembiayaan RKP | 85% | 100% |
| Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional | Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan | % ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup kerjasama pendanaan bilateral terhadap proyek-proyek on- going | 84% | 100%\*) | % Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup pendanaan bilateral dan kredit ekspor terhadap proyek-proyek on-going | 88-91,0% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kedeputian**  **Bidang Pendanaan Pembangunan** | | **Direktorat Pendanaan Bilateral** | | | | | |
| **Sasaran Strategis Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan** | **Indikator Kinerja Kedeputian** | **Indikator Kinerja Direktorat Tahun 2021** | **Target** | **Realisasi** | **Indikator Kinerja Direktorat Tahun 2022** | **Target** | **Realisasi** |
|  |  | % ketersediaan hasil analisis terhadap pemantauan lapangan dan evaluasi proyek-proyek pendanaan bilateral | 84% | 100%\*) | % ketersediaan hasil analisis terhadap pemantauan lapangan dan evaluasi proyek-proyek pendanaan bilateral dan kredit ekspor | 88-91,0% | 100% |
| Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional | Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan | % rekomendasi pengendalian dan pelancaran rencana kegiatan pendanaan bilateral yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait | 84% | 100% | % rekomendasi pengendalian dan pelancaran rencana kegiatan pendanaan bilateral yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait | 88-91,0% | 95% |
| Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner | Persentase Rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L dan Stakeholders Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan | % rekomendasi hasil kajian pendanaan bilateral yang diterima oleh Deputi | 80% | 100%\*) | % rekomendasi hasil telaah/analisis pendanaan bilateral dan kredit ekspor yang diterima oleh Deputi | 85-89,9% | 100% |
| % prakarsa pengembangan pendanaan bilateral yang diterima dan didukung oleh stakeholders terkait | 80% | 100%\*) | % prakarsa pengembangan pendanaan bilateral dan kredit ekspor yang diterima dan didukung oleh stakeholders terkait | 85-89,9% | 100% |
| % kesesuaian lingkup kegiatan Program Compact II terhadap concept note Bappenas | 80% | 100% | % tercapainya target penyiapan Program Compact II terhadap rencana kerja tahunan | 85-89,9% | 90% |

### Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2022

Informasi singkat mengenai capaian 11 (sebelas) Indikator Kinerja Direktorat Pendanaan Bilateral sesuai Perjanjian Kinerja 2022, telah disampaikan sebelumnya dalam Tabel 3.2. Bagian 3.2.1. di bawah ini akan menjelaskan lebih rinci mengenai capaian untuk masing-masing indikator kinerja di Direktorat Pendanaan Bilateral tersebut.

#### Capaian Indikator Kinerja

* + - 1. **Indikator Kinerja 1**

***% Keselarasan bidang pada project pipeline pendanaan bilateral dan kredit ekspor tahunan dengan prioritas dan/atau dengan major project RPJMN***

Berdasarkan tabel 3.3 di bawah ini, terdapat total 64 proyek pinjaman Bilateral yang tercantum pada DRPPLN (*Green Book*) periode tahun 2022. Seluruh proyek tersebut berkaitan dengan Proyek Prioritas dan/atau *Major Project* RPJMN 2020 - 2024. Dengan demikian terdapat 100% keselarasan bidang pada project *pipeline* pendanaan bilateral tahunan dengan prioritas dan/atau dengan *major project* RPJMN. Capaian tersebut berhasil melampaui target pada indikator kinerja tahun 2022.

**Tabel 3. 3 Keselarasan *Project Pipeline* Pendanaan Bilateral dan Kredit Ekspor Tahunan dengan Prioritas dan/atau dengan *Major Project* RPJMN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kegiatan** | **Instansi** | **Indikasi Pendanaan** | **Keselarasan dengan PN/PP RPJMN Tahun 2020-2024** |
| 1 | Strengthening Flight Information Region and Development of Aviation Meteorology Services | BMKG | Finlandia | * PN 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim * PP 6.1: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup * KP 6.1.1 - Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup * Proyek Prioritas - Pemantauan Kualitas Udara, Air dan Air Laut * Mendukung MP 39 - Penguatan sistem peringatan dini bencana |
| 2 | Development of Vocational Training Center in Banyuwangi | Kementerian Ketenagakerjaan | Austria | * PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing * PP 3.7 - Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing * KP 3.7.1 - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kegiatan** | **Instansi** | **Indikasi Pendanaan** | **Keselarasan dengan PN/PP RPJMN Tahun 2020-2024** |
|  |  |  |  | * Proyek Prioritas - Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi * MP 17 - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 |
| 3 | Countering Terrorism and Preventing Violent Extremism (Penanggulangan Terorisme dan Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan) | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | LPKE/KSA | * PN 7: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam), dan Transformasi Pelayanan Publik * PP 7.5: Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional * KP 7.5.1 - Penguatan Keamanan dalam Negeri * Proyek Prioritas - Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme * Tidak ada MP yang terkait |
| 4 | Strengthening Cyber Security Ecosystem in Indonesia | Badan Siber dan Sandi Negara | Spanyol | * PN 7 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik * PP 7.5 - Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional * KP 7.5.5 - Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber * Proyek Prioritas - Pembangunan Pertahanan Siber * Mendukung MP 40 - Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT |
| 5 | Karian Dam- Serpong Water Conveyance System (Komp. Ditjen SDA) | Kementerian PUPR | Korea | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.1 - Infrastruktur Pelayanan Dasar * KP 5.1.3 - Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi * Proyek Prioritas - Pembangunan dan rehabilitasi bendungan * Tidak ada MP yang terkait |
| 6 | Additional Loan for Karian Dam Project (Komp.  Ditjen SDA) | Kementerian PUPR | Korea | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.1 - Infrastruktur Pelayanan Dasar * KP 5.1.3 - Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi * Proyek Prioritas - Pembangunan dan |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kegiatan** | **Instansi** | **Indikasi Pendanaan** | **Keselarasan dengan PN/PP RPJMN Tahun 2020-2024** |
|  |  |  |  | rehabilitasi bendungan   * Tidak ada MP yang terkait |
| 7 | Pelosika Multipurpose Dam Construction Project (Komp.  Ditjen SDA) | Kementerian PUPR | Tiongkok | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.1 - Infrastruktur Pelayanan Dasar * KP 5.1.3 - Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi * Proyek Prioritas - Pembangunan dan rehabilitasi bendungan * MP 28 - 18 Waduk Multiguna |
| 8 | Jenelata Dam Construction Project (Komp. Ditjen SDA) | Kementerian PUPR | Tiongkok | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.1 - Infrastruktur Pelayanan Dasar * KP 5.1.3 - Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi * Proyek Prioritas - Pembangunan dan rehabilitasi bendungan * MP 28 - 18 Waduk Multiguna |
| 9 | Riam Kiwa Multipurpose Dam Construction Project (Komp.  Ditjen SDA) | Kementerian PUPR | Tiongkok | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.1 - Infrastruktur Pelayanan Dasar * KP 5.1.3 - Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi * Proyek Prioritas - Pembangunan dan rehabilitasi bendungan * MP 28 - 18 Waduk Multiguna |
| 10 | Urgent Disaster Reduction of Mt. Semeru, Mt.  Kelud, Mt. Agung and other Erupted Volcanoes in Indonesia | Kementerian PUPR | Jepang | * PN 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim * PP 6.2 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim * KP 6.2.1 - Penanggulangan Bencana * Proyek Prioritas - Penguatan Penanganan Darurat Bencana * Tidak ada MP yang terkait |
| 11 | Development of Serang- Panimbang Toll Road Project, Cileles – | Kementerian PUPR | Tiongkok | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.3 - Infrastruktur Ekonomi * KP 5.3.1 - Konektivitas Jalan |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kegiatan** | **Instansi** | **Indikasi Pendanaan** | **Keselarasan dengan PN/PP RPJMN Tahun 2020-2024** |
|  | Panimbang Section (Komp. Ditjen BM) |  |  | * Proyek Prioritas - Pembangunan Jalan Tol   + Bagian dari Jalan Tol Trans Jawa (Dukungan KPBU), tapi pada pelaksanaannya dibutuhkan dukungan pemerintah. * Tidak ada MP yang terkait |
| 12 | Development of Semarang – Demak Toll Road Project Integrated with Sea Dike (Toll Road Development of Semarang Demak 1a) (Komp. Ditjen BM) | Kementerian PUPR | Tiongkok | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.3 - Infrastruktur Ekonomi * KP 5.3.1 - Konektivitas Jalan * Proyek Prioritas - Pembangunan Jalan Tol * MP 27 - Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa |
| 13 | Development of Semarang – Demak Toll Road Project Integrated with Sea Dike (Toll Road Development of Semarang Demak 1b) (Komp. Ditjen BM) | Kementerian PUPR | Tiongkok | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.3 - Infrastruktur Ekonomi * KP 5.3.1 - Konektivitas Jalan * Proyek Prioritas - Pembangunan Jalan Tol * MP 27 - Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa |
| 14 | Development of Semarang – Demak Toll Road Project Integrated with Sea Dike (Toll Road Development of Semarang Demak 1c) (Komp. Ditjen BM)) | Kementerian PUPR | Tiongkok | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.3 - Infrastruktur Ekonomi * KP 5.3.1 - Konektivitas Jalan * Proyek Prioritas - Pembangunan Jalan Tol * MP 27 - Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa |
| 15 | Toll Road Development in Sumatera Islands/JTTS (Betung-Tempino- Jambi Toll Road Segmen 1) (Komp. Ditjen BM) | Kementerian PUPR | KSA | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.3 - Infrastruktur Ekonomi * KP 5.3.1 - Konektivitas Jalan * Tidak ada Proyek Prioritas dan MP yang langsung terkait, tetapi mendukung:   + Proyek Prioritas- Pembangunan Jalan Tol - Jalan Tol Trans |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kegiatan** | **Instansi** | **Indikasi Pendanaan** | **Keselarasan dengan PN/PP RPJMN Tahun 2020-2024** |
|  |  |  |  | Sumatera   * MP 19 - Jalan Tol Trans Sumatera Aceh - Lampung |
| 16 | Toll Road Development in Sumatera Islands/JTTS (Jambi-Rengat Toll Road Segmen 1 Sp Ness-Cinto Kenang) (Komp. Ditjen BM) | Kementerian PUPR | KSA | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.3 - Infrastruktur Ekonomi * KP 5.3.1 - Konektivitas Jalan * Tidak ada Proyek Prioritas dan MP yang langsung terkait, tetapi mendukung:   + Proyek Prioritas- Pembangunan Jalan Tol - Jalan Tol Trans Sumatera   + MP 19 - Jalan Tol Trans Sumatera Aceh - Lampung |
| 17 | Patimban Access Toll Road (Komp. Ditjen BM) | Kementerian PUPR | Jepang | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.3 - Infrastruktur Ekonomi * KP 5.3.1 - Konektivitas Jalan * Proyek Prioritas - Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (Pelabuhan, Bandara, Terminal) * Mendukung MP 22 - Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu |
| 18 | Development of New Tunnels Alignment in Payakumbuh – Pangkalan Toll Road (Komp.  Ditjen BM) | Kementerian PUPR | Jepang | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.3 - Infrastruktur Ekonomi * KP 5.3.1 - Konektivitas Jalan * Tidak ada Proyek Prioritas dan MP yang langsung terkait, tetapi mendukung:   + Proyek Prioritas- Pembangunan Jalan Tol - Jalan Tol Trans Sumatera   + MP 19 - Jalan Tol Trans Sumatera Aceh - Lampung |
| 19 | Acquisition of Indonesia Biodiversity as Fundamental Sources for Research and Innovation | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Jerman | * PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing * PP 3.7 - Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing * KP 3.7.3 - Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi * Mendukung Proyek Prioritas - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kegiatan** | **Instansi** | **Indikasi Pendanaan** | **Keselarasan dengan PN/PP RPJMN Tahun 2020-2024** |
|  |  |  |  | Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di bidang0bdang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017- 2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan   * Tidak ada MP yang terkait |
| 20 | Patimban Port Development Project (Phase I-2) | Kementerian Perhubungan | Jepang | * PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.3 - Infrastruktur Ekonomi * KP 5.3.2 - Konektivitas Laut * Proyek Prioritas - Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut * Mendukung MP 22 - Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu |
| 21 | Engineering Services of Jakarta Mass Rapid Transit East  - West Line Project Phase I Stage II | Kementerian Perhubungan | Jepang | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.3 - Infrastruktur Perkotaan * PP 5.3.1 - Transportasi Perkotaan * Proyek Prioritas - Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang) * MP 23 - Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar) |
| 22 | Surabaya Regional Railway Line (Phase I) | Kementerian Perhubungan | Jerman | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.3 - Infrastruktur Perkotaan * PP 5.3.1 - Transportasi Perkotaan * Proyek Prioritas - Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang) * MP 23 - Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar) |
| 23 | Implementation Project Of National | Kementerian | Perancis | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendorong Pengembangan |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kegiatan** | **Instansi** | **Indikasi Pendanaan** | **Keselarasan dengan PN/PP RPJMN Tahun 2020-2024** |
|  | Mass Transit Program | Perhubungan | (AFD) | Ekonomi dan Pelayanan Dasar   * PP 5.3 - Infrastruktur Perkotaan * PP 5.3.1 - Transportasi Perkotaan * Proyek Prioritas - Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang) * MP 23 - Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar) |
| 24 | Patimban Port Development Project II | Kementerian Perhubungan | Jepang | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.3 - Infrastruktur Ekonomi * KP 5.3.2 - Konektivitas Laut * Proyek Prioritas - Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut * Mendukung MP 22 - Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu |
| 25 | Construction/ Procurement of Class I Patrol Vessel | Kementerian Perhubungan | Denmark/ Korea | * PN 7 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik * PP 7.5 - Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional * KP 7.5.3 - Penguatan Keamanan Laut * Proyek Prioritas - Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut * Dapat dikaitkan dengan MP 41 - Penguatan Keamanan Laut di Natuna |
| 26 | Outer Ring Fishing Ports Development (Eco Fishing Port) | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Perancis (AFD) | * PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas * PP 1.4 - Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan * KP 1.4.3 - Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan * Proyek Prioritas - Peningkatan Produksi Perikanan * MP 7 - Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kegiatan** | **Instansi** | **Indikasi Pendanaan** | **Keselarasan dengan PN/PP RPJMN Tahun 2020-2024** |
| 27 | Integrated of Fishing Ports and International Fish Markets Phase I | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Jepang | * PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas * PP 1.4 - Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan * KP 1.4.3 - Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan * Proyek Prioritas - Peningkatan Produksi Perikanan * MP 7 - Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional |
| 28 | Integrated of Fishing Ports and International Fish Markets Phase I | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Perancis (AFD) | * PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas * PP 1.4 - Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan KP 1.4.3 - Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan * Proyek Prioritas - Peningkatan Produksi Perikanan * MP 7 - Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional |
| 29 | Integrated of Fishing Ports and International Fish Markets Phase II | Kementerian Kelautan dan Perikanan | KSA | * PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas * PP 1.4 - Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan KP 1.4.3 - Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan * Proyek Prioritas - Peningkatan Produksi Perikanan * MP 7 - Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional |
| 30 | Integrated Revitalization Shrimp Farming Program | Kementerian Kelautan dan Perikanan | KSA | * PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas * PP 1.4 - Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan KP 1.4.3 - Peningkatan produksi, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kegiatan** | **Instansi** | **Indikasi Pendanaan** | **Keselarasan dengan PN/PP RPJMN Tahun 2020-2024** |
|  |  |  |  | produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan   * Proyek Prioritas - Peningkatan Produksi Perikanan * MP 6 - Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng |
| 31 | Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Spanyol | * PN 7 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik * PP 7.5 - Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional * KP 7.5.3 - Penguatan Keamanan Laut * Proyek Prioritas - Peningkatan Produksi Perikanan * Mendukung MP 41 - Penguatan Keamanan Laut di Natuna |
| 32 | Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System Phase II | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Spanyol / Perancis | * PN 7 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik * PP 7.5 - Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional * KP 7.5.3 - Penguatan Keamanan Laut * Proyek Prioritas - Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut * Mendukung MP 41 - Penguatan Keamanan Laut di Natuna |
| 33 | Development of the System for Monitoring and Controlling of Marine Space Utilization | Kementerian Kelautan dan Perikanan | KSA /  Perancis (AFD) | * PN 7 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik * PP 7.5 - Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional * KP 7.5.3 - Penguatan Keamanan Laut * Proyek Prioritas - Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut * Mendukung MP 41 - Penguatan Keamanan Laut di Natuna |
| 34 | Strengthening of e-Government Infrastructure (Development of Data Center in Jabodetabek Area) | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Perancis | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.5 - Transformasi Digital * KP 5.5.1 - Penuntasan Infrastruktur TIK * Proyek Prioritas - Pengembangan |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kegiatan** | **Instansi** | **Indikasi Pendanaan** | **Keselarasan dengan PN/PP RPJMN Tahun 2020-2024** |
|  |  |  |  | infrastruktur TIK pemerintahan   * MP 26 - Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital |
| 35 | Strengthening of e-Government Infrastructure (Development of Data Center in Batam) | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Korea | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.5 - Transformasi Digital * KP 5.5.1 - Penuntasan Infrastruktur TIK * Proyek Prioritas - Pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan * MP 26 - Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital |
| 36 | Digitalization of Broadcasting System (DBS) | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Perancis | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.5 - Transformasi Digital * KP 5.5.1 - Penuntasan Infrastruktur TIK * Proyek Prioritas - Pengembangan infrastruktur penyiaran * Mendukung MP 26 - Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital |
| 37 | Procurement of Multifunctional Satellite- 2 (SATRIA-2) | Kementerian Komunikasi dan Informatika | UKEF  dan/atau AIIB | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.5 - Transformasi Digital * KP 5.5.1 - Penuntasan Infrastruktur TIK * Proyek Prioritas - Pengembangan infrastruktur pitalebar * Mendukung MP 26 - Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital |
| 38 | Integrated Intelligence System of Attorney General Indonesia | Kejakasaan Agung | KSA | * PN 7 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik * PP 7.5 - Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional * KP 7.5.5 - Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber * Proyek Prioritas - Pembangunan Pertahanan Siber * Mendukung MP 40 - Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kegiatan** | **Instansi** | **Indikasi Pendanaan** | **Keselarasan dengan PN/PP RPJMN Tahun 2020-2024** |
| 39 | National Maritime Security System | Badan Keamanan Laut | LPKE/ UKEF | * PN 7 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik * PP 7.5 - Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional * KP 7.5.3 - Penguatan Keamanan Laut * Proyek Prioritas - Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut * Dapat dikaitkan dengan MP 41 - Penguatan Keamanan Laut di Natuna |
| 40 | Pengadaan Rigid Buoyancy Boat (Procurement of Rigid Buoyancy Boat) | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) | Spanyol dan/atau LPKE/KSA | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.1 - Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar * KP 5.1.4 - Keselamatan dan Keamanan Transportasi * Proyek Prioritas - Pemenuhan fasiitas keselamatan dan keamanan transportasi dan SAR * Tidak ada MP Khusus |
| 41 | Pengadaan Pesawat Helikopter Pencarian dan Pertolongan Kelas Medium (Procurement of Search and Rescue Helicopter Medium Class and Procurement of Rigid Buoyancy Boat) | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) | Spanyol dan/atau LPKE/KSA | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.1 - Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar * KP 5.1.4 - Keselamatan dan Keamanan Transportasi * Proyek Prioritas - Pemenuhan fasiitas keselamatan dan keamanan transportasi dan SAR * Tidak ada MP Khusus |
| 42 | Strengthening Apparatus Management and Development (SMART) | Kementerian perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas | Jepang | * PN 7 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik * PP 7.4 - Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola * KP 7.4.1 - Penguatan Implementasi Manajemen ASN * Proyek Prioritas - Peningkatan Penerapan Sistem Merit ASN * Tidak ada MP spesifik |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kegiatan** | **Instansi** | **Indikasi Pendanaan** | **Keselarasan dengan PN/PP RPJMN Tahun 2020-2024** |
| 43 | Upgrading Med Equipment & Supporting Facilities for Army Hospital Pelamonia- Makassar | Kementerian Pertahanan / TNI | Austria | * PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing * PP 3.3 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan * KP 3.3.5 - Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan * Proyek Prioritas - Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan * Tidak ada MP spesifik |
| 44 | Upgrading Med Equipment & Supporting Facilities for Army Hospital Soedjono- Magelang | Kementerian Pertahanan / TNI | Austria | * PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing * PP 3.3 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan * KP 3.3.5 - Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan * Proyek Prioritas - Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan * Tidak ada MP spesifik |
| 45 | Upgrading Med Equipment & Supporting Facilities for Army Hospital Dustira Cimahi | Kementerian Pertahanan / TNI | Austria | * PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing * PP 3.3 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan * KP 3.3.5 - Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan * Proyek Prioritas - Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan * Tidak ada MP spesifik |
| 46 | Procurement of Med Equipment for Army Hospital Marthen Indey- Jayapura | Kementerian Pertahanan / TNI | Austria | * PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing * PP 3.3 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan * KP 3.3.5 - Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan * Proyek Prioritas - Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan * Tidak ada MP spesifik |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kegiatan** | **Instansi** | **Indikasi Pendanaan** | **Keselarasan dengan PN/PP RPJMN Tahun 2020-2024** |
| 47 | Procurement Medical Equipment for Army Hospital dr. AK Gani- Palembang | Kementerian Pertahanan / TNI | Austria | * PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing * PP 3.3 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan * KP 3.3.5 - Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan * Proyek Prioritas - Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan * Tidak ada MP spesifik |
| 48 | Procurement Medical Equipment for Army Hospital Salak Bogor | Kementerian Pertahanan / TNI | Austria | * PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing * PP 3.3 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan * KP 3.3.5 - Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan * Proyek Prioritas - Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan * Tidak ada MP spesifik |
| 49 | Procurement Medical Equipment for Army Hospital Moh. Ridwan Meuraksa-Jakarta | Kementerian Pertahanan / TNI | Austria | * PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing * PP 3.3 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan * KP 3.3.5 - Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan * Proyek Prioritas - Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan * Tidak ada MP spesifik |
| 50 | Upgrading Medical Equipments for Army Hospital dr. R Hardjanto Balikpapan | Kementerian Pertahanan / TNI | Austria | * PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing * PP 3.3 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan * KP 3.3.5 - Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan * Proyek Prioritas - Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan * Tidak ada MP spesifik |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kegiatan** | **Instansi** | **Indikasi Pendanaan** | **Keselarasan dengan PN/PP RPJMN Tahun 2020-2024** |
| 51 | Upgrading Medical Equipments for Army Hospital Kartika Husada Pontianak | Kementerian Pertahanan / TNI | Austria | * PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing * PP 3.3 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan * KP 3.3.5 - Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan * Proyek Prioritas - Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan * Tidak ada MP spesifik |
| 52 | Upgrading Medical Equipments for Army Hospital Prof. Dr. J. A. Latumeten Ambon | Kementerian Pertahanan / TNI | Austria | * PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing * PP 3.3 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan * KP 3.3.5 - Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan * Proyek Prioritas - Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan * Tidak ada MP spesifik |
| 53 | Upgrading Medical Equipments for Army Hospital Iskandar Muda Aceh | Kementerian Pertahanan / TNI | Austria | * PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing * PP 3.3 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan * KP 3.3.5 - Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan * Proyek Prioritas - Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan * Tidak ada MP spesifik |
| 54 | Upgrading Medical Equipment and Supporting Facilities for Naval Hospital dr.  Midiyato Suratani and Naval Hospital dr. Komang Makes-Belawan | Kementerian Pertahanan / TNI | Austria | * PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing * PP 3.3 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan * KP 3.3.5 - Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan * Proyek Prioritas - Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan * Tidak ada MP spesifik |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kegiatan** | **Instansi** | **Indikasi Pendanaan** | **Keselarasan dengan PN/PP RPJMN Tahun 2020-2024** |
| 55 | Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities for Naval Hospital dr.  Mintohardjo- Jakarta | Kementerian Pertahanan / TNI | Austria | * PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing * PP 3.3 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan * KP 3.3.5 - Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan * Proyek Prioritas - Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan * Tidak ada MP spesifik |
| 56 | Upgrading Med Equipment for Air Force Hospital dr.  S. Hardjolukito Jogja | Kementerian Pertahanan / TNI | Austria | * PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing * PP 3.3 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan * KP 3.3.5 - Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan * Proyek Prioritas - Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan * Tidak ada MP spesifik |
| 57 | Improvement of Capabilities and Capacities Medical Services at Air Force Hospital dr. Kresno Manuhua- Biak | Kementerian Pertahanan / TNI | Austria | * PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing * PP 3.3 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan * KP 3.3.5 - Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan * Proyek Prioritas - Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan * Tidak ada MP spesifik |
| 58 | Establishment Infectious Hospital for Air Force- Jakarta | Kementerian Pertahanan / TNI | Austria | * PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing * PP 3.3 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan * KP 3.3.5 - Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan * Proyek Prioritas - Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan * Tidak ada MP spesifik |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kegiatan** | **Instansi** | **Indikasi Pendanaan** | **Keselarasan dengan PN/PP RPJMN Tahun 2020-2024** |
| 59 | Mass Rapid Transit (MRT) Fase 2 | Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | Jepang | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.3 - Infrastruktur Perkotaan * PP 5.3.1 - Transportasi Perkotaan * Proyek Prioritas - Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang) * MP 23 - Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar) |
| 60 | Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction Project (II) | Pinjaman Luar Negeri yang Diteruspinjamkan  - PT. PLN | Jepang | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.4 - Energi dan Ketenagalistrikan * PP 5.4.1 - Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan * Proyek Prioritas - Perbaikan efisiensi dan emisi energi dan ketenagalistrikan * MP 25 - Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA |
| 61 | Additional Loan PLTA Asahan 3 (2  x 87 MW) | Pinjaman Luar Negeri yang Diteruspinjamkan  - PT. PLN | Jepang | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.4 - Pembangunan energi dan ketenagalistrikan * PP 5.4.1 - Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan * Proyek Prioritas - Perbaikan efisiensi dan emisi energi dan ketenagalistrikan * MP 25 - Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA |
| 62 | Hululais Geothermal Power Plant Project | Pinjaman Luar Negeri yang Diteruspinjamkan  - PT. PLN | Jepang | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.4 - Pembangunan energi dan ketenagalistrikan * PP 5.4.1 - Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kegiatan** | **Instansi** | **Indikasi Pendanaan** | **Keselarasan dengan PN/PP RPJMN Tahun 2020-2024** |
|  |  |  |  | * Proyek Prioritas - Perbaikan efisiensi dan emisi energi dan ketenagalistrikan * MP 25 - Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA |
| 63 | Construction of Hajj General Hospital Medan to International Standard | Pinjaman Luar Negeri yang Diteruspinjamkan  - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | Korea | * PN 3 ; Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing * PP 3.3 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan * KP 3.3.5 - Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan * Proyek Prioritas - Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan * Tidak ada MP spesifik |
| 64 | Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project North- South Phase 2 | Pinjaman Luar Negeri yang Diteruspinjamkan  - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | Jepang | * PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar * PP 5.3 - Infrastruktur Perkotaan * PP 5.3.1 - Transportasi Perkotaan * Proyek Prioritas - Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang) * MP 23 - Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar) |

#### Indikator Kinerja 2

##### Persentase (%) rekomendasi rencana penarikan PHLN yang digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif

Indikator Kinerja 2 diukur melalui persentase rekomendasi rencana penarikan PHLN yang digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif. Terkait dengan pengukuran indikator kinerja tersebut, Direktorat Pendanaan Bilateral telah merekomendasikan 311 kegiatan untuk masuk dalam rencana penarikan PHLN yang digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif tahun 2023. Berbeda halnya dengan tahun 2021, sebagai konsekuensi dari adanya perubahan SOTK Direktorat Pendanaan Bilateral, IKU ini juga mencakup proyek-proyek yang dibiayai melalui pinjaman Kreditor Swasta Asing sehingga jumlah proyek tahun ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 71 proyek.

Mengacu pada rekomendasi tersebut, kegiatan yang berhasil masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 mencapai 292 dari 311 kegiatan atau **93,89% dari total kegiatan** yang direkomendasikan. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 84%. Dengan demikian, untuk rekomendasi kegiatan pada Pagu Indikatif 2023, Direktorat Pendanaan Bilateral berhasil melampaui target kinerja untuk Indikator Kinerja 2, yaitu 85%. tabel 3.4 berikut merupakan detail dari kegiatan yang direkomendasikan oleh Direktorat Pendanaan Bilateral, dan tabel 3.5 merupakan rekapitulasi persentase dari kegiatan yang dimasukkan dalam Pagu Indikatif 2023, berdasarkan instansi pelaksana dan status proyek/kegiatan.

**Tabel 3. 4 Datar Proyek/Kegiatan yang Masuk dalam Pagu Indikatif 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Lender** | **Kode Loan** | **Nama Kegiatan** | **Kegiatan** |
| **Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika** | | | | |
| ***Ongoing*** | | | | |
| 1 | Natixis | 22461500 | Strengthening Climate and Weather Service Capacity-Phase II (SIMM-1) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 2 | Natixis | 22461800 | Strengthening Climate and Weather Service Capacity-Phase II (Scaling UP) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 3 | AFD | 22461900 | Strengthening Climate and Weather Service Capacity-Phase II (SIMM-2) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| ***Pipeline*** | | | | |
| 1 | Finlandia | XXXX | Strengthening Flight Information Region and Development of Aviation Meteorology Services in Eastern Indonesia | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 2 | Finlandia | XXXX | Enhancement of Indonesian Weather Radar Network for Extreme Weather | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Lender** | **Kode Loan** | **Nama Kegiatan** | **Kegiatan** |
|  |  |  | Warning Capabilities |  |
| **Kementerian Ketenagakerjaan** | | | | |
| ***Ongoing*** | | | | |
| 1 | AUSTRIA | 237,575 | Maritim Vocational Training Center in Medan | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 2 | AUSTRIA | 238,271 | Maritim Vocational Training Center in Serang | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 3 | AUSTRIA | CA25.02. 21 | Maritim Vocational Training Center in Makassar | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| ***Pipeline*** | | | | |
| 1 | AUSTRIA | XXXXXX XX | Development of Vocational Training Center in Banyuwangi | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** | | | | |
| ***On Going*** | | | | |
| **Ditjen Sumber Daya Air** | | | | |
| 1 | JICA | IP-567 | Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir Slice (II) (Komp. Ditjen SDA) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 2 | JICA | IP-573 | Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP) (Komp. Ditjen SDA) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 3 | JICA | IP-574 | Komering Irrigation Project Stage III (Komp. Ditjen SDA) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 4 | JICA | IP-575 | Bali Beach Conservation Project II (Komp. Ditjen SDA) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 5 | JICA | IP-580 | Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL in Central Sulawesi) (Komp. Ditjen SDA) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 6 | JICA | IP-582 | Urban Flood Control System Improvement in selected Cities Phase II (Komp. Ditjen SDA) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 7 | EXIM BANK KOREA | INA-19 | Construction of Karian Multipurpose Dam Project (Komp. Ditjen SDA) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 8 | EXIM BANK KOREA | INA-22 | Engineering Service Project for Multipurpose Dams, Rivers and Coastal (Komp. Ditjen SDA) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 9 | EXIM BANK KOREA | INA-23 | The Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation for Western Region of Indonesia (Komp. Ditjen SDA) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **Ditjen Bina Marga** | | | | |
| 10 | JICA | IP-577 | Patimban Port Development (Phase 1) (Komp. Ditjen BM) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 11 | JICA | IP-580 | Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL in Central Sulawesi) (Komp. Ditjen BM) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Lender** | **Kode Loan** | **Nama Kegiatan** | **Kegiatan** |
| **Ditjen Cipta Karya** | | | | |
| 12 | JICA | IP-565 | Metropolitan Sanitation Management Investment Program:  Engineering Services for Sewerage System Development in DKI Jakarta (Komp. Ditjen CK) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 13 | JICA | IP-580 | Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL in Central Sulawesi) (Komp. Ditjen CK) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 14 | JICA | IP-579 | Jakarta Sewerage Dev Project Zone 6 Phase 1 (Komp. Ditjen CK) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 15 | JICA | IP-581 | Jakarta Sewerage Dev Project Zone 1 (Komp. Ditjen CK) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 16 | KfW | 2010 66  471 | Emission Reduction in Cities-Solid Waste Management (Komp. Ditjen CK) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 17 | KfW | 30100073  6/38203 (KfW) | The Development of Regional Water Supply System in Wosusokas (Komp. Ditjen CK) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| ***Pipeline*** | | | | |
| **Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA)** | | | | |
| 1 | EDPF | INA-XXX | Karian Dam-Serpong Water Conveyance System (Komp. Ditjen SDA) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 2 | EDCF | INA-XXX | Additional Loan for Karian Dam Project (Komp. Ditjen SDA) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 3 | CHINA | PBC-XXX | Pelosika Multipurpose Dam Construction Project (Komp. Ditjen SDA) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 4 | CHINA | PBC-XXX | Jenelata Dam Construction Project (Komp. Ditjen SDA) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 5 | CHINA | PBC-XXX | Riam Kiwa Multipurpose Dam Construction Project (Komp. Ditjen SDA) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **Ditjen Bina Marga** | | | | |
| 6 | CHINA | PBC-XXX | Development of Serang-Panimbang Toll Road Project, Cileles – Panimbang Section (Komp. Ditjen BM) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 7 | CHINA | PBC-XXX | Development of Semarang-Demak Toll Road Integrated with Sea Dike (Toll Road Development of Semarang Demak 1A (Komp. Ditjen BM)) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 8 | CHINA | PBC-XXX | Development of Semarang-Demak Toll Road Integrated with Sea Dike (Toll Road Development of Semarang Demak 1B (Komp. Ditjen BM)) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 9 | CHINA | PBC-XXX | Development of Semarang-Demak Toll Road Integrated with Sea Dike (Toll Road Development of Semarang Demak 1C (Komp. Ditjen BM)) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Lender** | **Kode Loan** | **Nama Kegiatan** | **Kegiatan** |
| 10 | CHINA | PBC-XXX | Toll Road Development in Sumatera Islands - Betung-Tempino-Jambi Toll Road (Komp. Ditjen BM) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 11 | CHINA | PBC-XXX | Toll Road Development in Sumatera Islands - Jambi-Rengat Toll Road (Seksi 1) (Komp. Ditjen BM) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 12 | JEPANG | IP-XXX | Patimban Access Toll Road (Komp. Ditjen BM) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 13 | AIIB/CHINA | LN XXXXX- IND | Long Span Bridge Development for Selected Area: Batam- Bintan Bridge (Komp. Ditjen BM) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 14 | JEPANG | IP-XXX | Development of New Tunnels Alignment in Payakumbuh- Pangkalan Toll Road (Komp. Ditjen BM) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** | | | | |
| ***On Going*** | | | | |
| 1 | KfW | Ln-28458 | Pengembangan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Pendidikan Universitas Hasanuddin | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 2 | JICA | IP-576 | University Of Gadjah Mada Achieving World Class University With Socio- Entrepreneurial Spirit Project | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 3 | KfW | XXXX | The Quality Improvement Academic Hospital of Brawijaya University | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **Badan Riset dan Inovasi Nasional (Portofolio Pinjaman pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI))** | | | | |
| ***On Going*** | | | | |
| 1 | AFD | CID 1077  02 L | Procurement of Multipurposes Research Vessel | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **Kementerian Perhubungan** | | | | |
| ***On Going*** | | | | |
| 1 | JICA | IP-563 | Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 2 | JICA | IP-569 | Engineering Services for Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project (Phase I) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 3 | JICA | IP-577 | Patimban Port Development Project (I) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 4 | EDCF | INA-24 | Development and Improvement of Indonesia Aids to Navigation. | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| ***Pipeline*** | | | | |
| 1 | JICA | IP-XXX | Patimban Port Development Project (Phase I-2) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 2 | JICA | IP-XXX | Engineering Services of Jakarta Mass Rapid Transit East - West Line Project Phase I Stage II | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 3 | Jerman | XXXX | Surabaya Regional Railway Line | Kegiatan masuk dalam |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Lender** | **Kode Loan** | **Nama Kegiatan** | **Kegiatan** |
|  |  |  | (Phase I) | Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam** | | | | |
| ***On Going*** | | | | |
| 1 | Korea-EDCF | INA-20 | The Development of Sewerage System in Batam Island | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **Kementerian Kelautan dan Perikanan** | | | | |
| ***Pipeline*** | | | | |
| 1 | AFD | XXXXX | Outer Ring Fishing Ports Development (Eco Fishing Port) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 2 | JICA | IP-XXX | Integrated of Fishing Ports and International Fish Markets | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **Kementerian Komunikasi dan Informatika** | | | | |
| ***Pipeline*** | | | | |
| 1 | Pemerintah Prancis | XXXXXX XX | Strengthening of e-Government Infrastructure | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 2 | Pemerintah Korea | INA-XX | Strengthening of e-Government Infrastructure | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 3 | Pemerintah Prancis | XXXXXX XX | Digitalization of Broadcasting System | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **Kejaksaan Republik Indonesia** | | | | |
| ***Pipeline*** | | | | |
| 1 | KSA | XXXX | Integrated Intelligence System of Attorney General Indonesia | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **Badan Intelijen Negara** | | | | |
| ***Pipeline*** | | | | |
| 1 | - | XXXX | Satelit Citra Resolusi Tinggi (30 cm) (Tahap I) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas** | | | | |
| ***On Going*** | | | | |
| 1 | JICA | IP-568 | Professional Human Resource Development Project Phase IV | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 2 | JICA | IP-574 | Komering Irrigation Project (Phase III) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 3 | JICA | IP-573 | Rentang Irrigation Modernization Project (RIMP) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **Kepolisian Republik Indonesia** | | | | |
| ***On Going*** | | | | |
| 1 | EXIM BANK KOREA | INA-18 | Consulting Service Integrated Trunking Radio Communication for INP/INA-18 | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Lender** | **Kode Loan** | **Nama Kegiatan** | **Kegiatan** |
| 2 | EXIM BANK KOREA | INA-18 | Integrated Trunking Radio Communication for INP/INA-18 | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 3 | PT MANDIRI HONGKONG | BMHK.BD  /LA/0011/ 2019 | Peralatan Wanteror, SAR dan Wind Tunnel (KSA 2016) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 4 | PT MANDIRI HONGKONG | BMHK.BD  /LA/0012/ 2019 | Helikopter (KSA 2016) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 5 | PT MANDIRI HONGKONG | BMHK.BD  /LA/0009/ 2020 | Peralatan Taktis Pendukung Bareskrim (KSA 2019) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 6 | PT MANDIRI HONGKONG | BMHK.BD  /LA/0010/ 2020 | Peralatan Lidik Sidik beserta Kit Identifikasi Narkoba (KSA 2019) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 7 | BNPP SINGAPORE | FA.17.12. 2020 | Alsus Labfor Stasioner Kalbar dan Manado (KSA 2019) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 8 |  | KSA 2019 | APC Multifungsi Sabhara | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 9 |  | KSA 2019 | Armoured Water Cannon Brimob | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 10 |  | KSA 2019 | Peralatan PHH dan Gas Air Mata | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 11 |  | KSA 2019 | Peralatan Densus | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 12 |  | KSA 2019 | Peralatan KBR | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 13 |  | KSA 2019 | Puslabfor Mabes dan Kewilayahan | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 14 |  | KSA 2019 | Peralatan Pusinafis | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 15 |  | KSA 2019 | Peralatan Khusus Satwa | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 16 |  | KSA 2019 | Peralatan Khusus Pamobvit | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 17 |  | KSA 2019 | Peralatan Security Barrier | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 18 |  | KSA 2019 | Harsucad Kapal | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 19 |  | KSA 2019 | Sistem Komunikasi Bhabinkamtibmas | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 20 |  | KSA 2019 | Area Traffic Monitoring System (ATMS) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 21 |  | KSA 2019 | Peralatan DVI Dokpol | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 22 |  | DKK 2021 | Helikopter Ringan Double Engine | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| ***Pipeline*** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Lender** | **Kode Loan** | **Nama Kegiatan** | **Kegiatan** |
| 1 |  | DKK 2021 | Kapal Patroli Rawa (Swamp Boat Patrol) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 2 |  | DKK 2021 | Rantis Angkut Pasukan Brimob 15 Seat | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 3 |  | DKK 2021 | Peralatan DVI Dokpol dan Laboratorium DNA | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 4 |  | DKK 2021 | Peralatan Laboratorium Forensik | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 5 |  | DKK 2021 | Allabfor Stasioner Kewilayahan | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 6 |  | DKK 2021 | Peralatan Densus | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 7 |  | BBK 2020-  2024 | Ransus Water Cannon Brimob | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 8 |  | DKK 2021 | Peralatan EOD/Mole Programmer | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 9 |  | DKK 2021 | Peralatan Khusus Penjinak Bom | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 10 |  | DKK 2021 | Peralatan KBR | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 11 |  | DKK 2021 | Peralatan Khusus Intelijen | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 12 |  | DKK 2021 | Peralatan Khusus Kontra Intelijen | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 13 |  | DKK 2021 | Peralatan Tactical Response Monitoring and Vehicle Bareskrim | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 14 |  | DKK 2021 | Alserse Penginderaan Bareskrim | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 15 |  | DKK 2021 | Peralatan Cyber | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 16 |  | DKK 2021 | Peralatan Khusus dan Kit Identifikasi Narkoba | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 17 |  | DKK 2021 | Sarana Prasarana Komunikasi wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 18 |  | DKK 2021 | Pengembangan Sistem Komunikasi Wide Area Digital (WAD) Trunking Polri | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 19 |  | DKK 2021 | Infastruktur Komunikasi dan Aplikasi Pita Lebar Kota Besar | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 20 |  | DKK 2021 | Peralatan Pengamanan Jaringan IT | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 21 |  | DKK 2021 | Peralatan Peraga Terbang Helikopter Full Motion | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 22 |  | BBK 2020-  2024 | Pengembangan Laboratorium Teknologi Kepolisian | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Lender** | **Kode Loan** | **Nama Kegiatan** | **Kegiatan** |
| 23 |  | DKK 2021 | Human Security Radar | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 24 |  | DKK 2021 | Harsucad Helikopter | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **25** |  | **BBK 2020-**  **2024** | **Harsucad Pesawat** | **Kegiatan tidak dimasukkan dalam Pagu Indikatif 2023** |
| **26** |  | **BBK 2020-**  **2024** | **Harsucad Kapal** | **Kegiatan tidak dimasukkan dalam Pagu Indikatif 2023** |
| **27** |  | **BBK 2020-**  **2024** | **Harsucad Kendaraan Taktis Sabhara** | **Kegiatan tidak dimasukkan dalam Pagu Indikatif 2023** |
| **28** |  | **BBK 2020-**  **2024** | **Harsucad Kendaraan Taktis Brimob** | **Kegiatan tidak dimasukkan dalam Pagu Indikatif 2023** |
| 29 |  | DKK 2021 | Harsucad Information and Communication Technology | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 30 |  | DKK 2021 | Peralatan Laboratorium Fotografi Kepolisian | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 31 |  | DKK 2021 | Redundant Inafis Biometric System | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 32 |  | DKK 2021 | Peralatan Digital Forensik | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 33 |  | DKK 2021 | Surveillance Car with Portable Tracking and Monitoring Device | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **Kementerian Pertahanan/TNI** | | | | |
| ***On Going*** | | | | |
| **Mabes TNI** | | | | |
| 1 |  |  | System Interoperability Kodal | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 2 | PT MANDIRI HONGKONG | BMHK.BD  /LA/0011/ 2020 | Alpernika | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **TNI AD** | | | | |
| 3 | CREDIT AGRICOLE CIB | LA.22.05. 2017 | Rudal Thp I | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 4 | CZECH EXPORT BANK | 24759 | Alat Penyeberangan Amphibious Ponton Set | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 5 | BANK MANDIRI SIN | CIB/CR/1 14/2019 | Heli Serbu | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 6 | ERSTE BANK, VIENNA | ECFA02. 10.2019 | Upgrading Med Equipment for Gatot Subroto | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 7 | PT MANDIRI HONGKONG | 28752000 | Ranpur Infanteri | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Lender** | **Kode Loan** | **Nama Kegiatan** | **Kegiatan** |
| 8 | PT MANDIRI CAYMAN IS | CIB BDM- PK/007/2 020 | Ranpur Kavaleri | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 9 | CREDIT AGRICOLE CIB | BG00200 0995 | Rudal Thp II | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 10 | CREDIT AGRICOLE CIB | 0034778-  0001012 | 155 MM Self Propelled Howitzer | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **TNI AL** | | | | |
| 11 | COMMERZB ANK GERMANY | 25.11.201  9 | Kapal Mine Counter Measure | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 12 | CREDIT AGRICOLE CIB |  | Upgrade FCS SSM Exocet MM 40 Block 2 menjadi Block 3 MRLF | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 13 | PT MANDIRI CAYMAN IS |  | Kapal Selam Diesel Elektrik (Batch II) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 14 | CREDIT AGRICOLE CIB | 23587001 | Rudal Exocet MM40 Blok 3 + VL Mica | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 15 | PT MANDIRI CAYMAN IS | CIB BDM- PK/009/2 020 | Mid Life Modernization MRLF | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 16 | CREDIT AGRICOLE CIB | 20006580  04 | Mid Life Modernization MRLF | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 17 | PT MANDIRI CAYMAN IS | CIB BDM- PK/011/2 020 | FCS SAM pengganti Seawolf Kapal MRLF | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 18 | PT MANDIRI CAYMAN IS | CIB BDM- PK/012/2 020 | Rudal SAM Kapal MLRF | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 19 | UNICREDIT BANK AUSTR | 238,43 | Upgrading Med Equipment for Naval Hospital dr. Ramelan Surabaya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 20 | EXIM BANK KOREA | LA.06.07. 12 | Kapal Selam Diesel Elektrik | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 21 | BBVAIT | BBVA  Italy | Torpedo A 244 S. Mod 3 | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 22 |  |  | Kapal Frigate | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 23 | BBVAIT | SFA.2018  .10.25.1 | Procurement of Caliber 30 MM Gun | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 24 | BBVAIT | SFA.2018  .10.25.2 | Procurement of Caliber 40 MM Gun | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 25 | BANK MANDIRI SIN | CIB/CR/0 61/17 | PENGADAAN MUNISI TANK AMFIBI BMP-3F ALOKASI PSP 2011-2014 | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Lender** | **Kode Loan** | **Nama Kegiatan** | **Kegiatan** |
| **TNI AU** | | | | |
| 26 | EXIM BANK KOREA | LA 05 07  2019 | Pesawat KT-1B dan pendukungnya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 27 | EXIM BANK KOREA | LA 05 07  2019 | Radar dan Senjata Pesawat T-50i dan pemasangannya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 28 | CREDIT AGRICOLE CIB |  | Helikopter Angkut Kelas Berat dan pendukungnya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 29 | PT MANDIRI CAYMAN IS | CIB BDM- PK/008/2 020 | Pesawat Angkut Berat dan pendukungnya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 30 | CREDIT AGRICOLE CIB | BC/00200 08699 | Pesawat Angkut Berat dan pendukungnya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 31 | PT MANDIRI CAYMAN IS | CIB BDM- PK/010/2 020 | Modernisasi Pesawat C-130 H/HS | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 32 | UNICREDIT BANK AUSTR | 238,38 | Upgrading Med Equipment for Air Force Hospital dr. M Sutomo Pontianak | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 33 | PT MANDIRI CAYMAN IS | CIB BDM- PK/006/2 019 | Radar Pasif | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 34 | BNP PARIBAS, PARIS | ID7915AS | PSU dan pendukungnya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| ***Pipeline*** | | | | |
| **Mabes TNI** | | | | |
| 1 |  |  | Alpernika | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 2 |  |  | Alat Sandi | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 3 |  |  | Anti Drone dan Persenjataan | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 4 |  |  | Senapan Serbu 5,56 mm Marinir | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **TNI AD** | | | | |
| 5 |  |  | Heli Angkut Sedang | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 6 | Austria |  | Upgrading Med Equipment & Supporting Facilities for Army Hospital Pelamonia | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 7 | Austria |  | Hospital of Medical & Supporting Facilities for Army Hospital Udayana | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 8 | Austria |  | Upgrading Med Equipment & Supporting Facilities for Army Hospital dr Soejono Magelang | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 9 | Austria |  | Upgrading Med Equipment & Supporting Facilities for Army | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Lender** | **Kode Loan** | **Nama Kegiatan** | **Kegiatan** |
|  |  |  | Hospital Dustira Cimahi |  |
| 10 | Austria |  | Procurement Medical Equipment for Army Hospital  Marthen Indey-Jayapura | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 11 | Austria |  | Procurement Medical Equipment for Army Hospital  dr. AK Gani-Palembang | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 12 | Austria |  | Procurement Medical Equipment for Army Hospital Salak-Bogor | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 13 | Austria |  | Procurement Medical Equipment for Army Hospital Moh Ridwan Meuraksa-Jakarta | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 14 |  |  | Ranpur Infantri Roda Ban (AP) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 15 |  |  | Multipurpose Armored Vehicle | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 16 |  |  | Rantis Infantri Komando / Intai / PJD | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 17 |  |  | Senjata Kopassus 5,56mm+ NVG + teropong | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 18 |  |  | Upgrade senjata serbu M-16 A1 | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 19 |  |  | Mortir Sedang Kal 81 MM | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 20 |  |  | Mortir Sedang Kal 120 MM | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 21 |  |  | Pemenuhan Kesisteman MLRS Multi Kaliber | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 22 |  |  | Radar | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 23 |  |  | Simulator AV-LMU | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 24 |  |  | Roket AV-SS-09TS | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 25 |  |  | Ran Munisi | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 26 |  |  | Simulator CCTS | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 27 |  |  | Harwat Meriam 155mm Caesar | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 28 |  |  | Harwat Meriam 155mm M109GS | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 29 |  |  | Harwat Roket MLRS Astros II MK6 | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 30 |  |  | Retrofit Tank AMX - 13 | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 31 |  |  | Harwat Tank Scorpion | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Lender** | **Kode Loan** | **Nama Kegiatan** | **Kegiatan** |
| 32 |  |  | Harwat MBT Leopard | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 33 |  |  | Man Portable Air Defense Missile System (MANPADS) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 34 |  |  | Harwat Rudal Starstreak | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 35 |  |  | UCAV MALE Light & dukungannya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 36 |  |  | Yaptap Sena Paratroopers | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **37** |  |  | **Heli Angkut Serbaguna dan dukungannya (sejenis Bell-412)** | **Kegiatan tidak dimasukkan dalam Pagu Indikatif 2023** |
| 38 |  |  | Heli Angkut Serbaguna dan Dukungannya (sejenis AW-149) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 39 |  |  | Upgrade Helikopter Bell 412 | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 40 |  |  | Mukal 5,56 MM Mu 5 TJ | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 41 |  |  | Mukal 5,56 MM Link Mu 4 TJ | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 42 |  |  | Mukal 5,56 MM Link | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 43 |  |  | Mukal 12,7 MM Tajam | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 44 |  |  | Mukal 7,62 MM Link | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 45 |  |  | Mukal 12,7 MM Link HBFL | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **46** |  |  | **Mukal 57 MM HE-T S60** | **Kegiatan tidak dimasukkan dalam Pagu Indikatif 2023** |
| 47 |  |  | GMO 81 MM SB | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **48** |  |  | **120 MM HE Mortar Bomb** | **Kegiatan tidak dimasukkan dalam Pagu Indikatif 2023** |
| **49** |  |  | **120 MM Smoke Mortar Bomb** | **Kegiatan tidak dimasukkan dalam Pagu Indikatif 2023** |
| **50** |  |  | **120 MM HEAT MBT** | **Kegiatan tidak dimasukkan dalam Pagu Indikatif 2023** |
| **51** |  |  | **120 MM APFSDS.T MBT** | **Kegiatan tidak dimasukkan dalam Pagu Indikatif 2023** |
| **52** |  |  | **120 MM TPCSDS.T MBT** | **Kegiatan tidak dimasukkan dalam Pagu Indikatif 2023** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Lender** | **Kode Loan** | **Nama Kegiatan** | **Kegiatan** |
| **53** |  |  | **120 MM TP.T MBT** | **Kegiatan tidak dimasukkan dalam Pagu Indikatif 2023** |
| 54 |  |  | Mukal 120 MBT | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 55 |  |  | MANPADS Missile | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **TNI AL** | | | | |
| 56 |  |  | Tank/Ranpur Angkut Personel | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 57 |  |  | Tank Amfibi BMP-3F | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 58 | Austria |  | Upgrading Med Equipment for Naval Hospital dr. Oetojo Sorong | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 59 | Austria |  | Upgrading Medical Equipment and Supporting Facilities for Naval Hospital dr. Midiyato Suratani and Naval Hospital dr. Komang Makes- Belawan | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 60 | Austria |  | Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities for Naval Hospital dr. Mintohardjo- Jakarta | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 61 |  |  | Pengadaan PKR (Frigate) - Full Mission Combat Profile | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 62 |  |  | KCR - Full Combat Mission | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 63 |  |  | Kelengkapan FFBNW OPV | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 64 |  |  | Revitalisasi KRI Korvet Sigma | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 65 |  |  | Submarine Class 1800 - 2800 Tonage tanpa AIP Full Combat System berikut munisi | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 66 |  |  | (A) Interim Readiness Submarine Class 1800-2800 | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 67 |  |  | Upgrade Changbogo & CKA Class | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 68 |  |  | Submarine Rescue Vehicle System | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 69 |  |  | Kapal BHO (Ocean Going) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 70 |  |  | Rematerialisasi Senlek KRI BR Tripartite Kelas P.Rengat | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **71** |  |  | Rudal Gen 5 (40 Rudal, 4 Launcher)  > 250 km | Kegiatan tidak dimasukkan dalam Pagu Indikatif 2023 |
| **72** |  |  | Rudal subsonic 300 km (60 rudal, 4 launcher) | Kegiatan tidak dimasukkan dalam Pagu Indikatif 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Lender** | **Kode Loan** | **Nama Kegiatan** | **Kegiatan** |
| 73 |  |  | Senjata 40 mm Single Barrel | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 74 |  |  | Kendaraan Pendarat Amfibi | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 75 |  |  | Arhanud Gerak Sendiri | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 76 |  |  | Tank Amfibi Recovery | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 77 |  |  | Multipurpose High Speed Landing Craft 14,2 m (Marinir) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 78 |  |  | Multipurpose High Speed Landing Craft 19,9 m (Marinir) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 79 |  |  | Rudal SSM | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 80 |  |  | Rudal SAM Short Range < 10 mm | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 81 |  |  | Rudal SAM Short Range < 10 mm (Sigma Class) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 82 |  |  | SAM Long Range > 50 mm (Frigate) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 83 |  |  | SAM Medium Range 10-50 mm (Frigate) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 84 |  |  | Amunisi Decoy Cal 130 mm (anti rudal) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 85 |  |  | Amunisi Decoy Cal 130 mm (anti torpedo) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 86 |  |  | Amunisi Torpedo Counter Measure (TCM) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 87 |  |  | Amunisi Rudal Arhanud Gerak Sendiri | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **88** |  |  | Rudal Sub-Surface to Surface Kapal selam | Kegiatan tidak dimasukkan dalam Pagu Indikatif 2023 |
| 89 |  |  | Torpedo Lightweight | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 90 |  |  | Torpedo Heavyweight | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 91 |  |  | Torpedo Lightweight Kit Heli AKS | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 92 |  |  | EMD (Expandable Mine Disposal) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 93 |  |  | Munisi 20 mm GA-1 | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 94 |  |  | Munisi 20 mm GA-2 | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 95 |  |  | Munisi 20 mm Rheinmetal | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Lender** | **Kode Loan** | **Nama Kegiatan** | **Kegiatan** |
| 96 |  |  | Munisi 20 mm Shipborne | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 97 |  |  | Munisi 30 mm 7 Barrel | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 98 |  |  | Munisi 30 mm Otomerala | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 99 |  |  | Munisi 30 mm 6 Barrel | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 100 |  |  | Munisi 30 mm BMP-3F/BVP2 (Marinir) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 101 |  |  | Munisi 35 mm Millenium Gun AHEAD | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 102 |  |  | Munisi 35 mm Arhanud Marinir | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 103 |  |  | Munisi 37 mm | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 104 |  |  | Munisi 40 mm L70 | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 105 |  |  | Munisi 40 mm L60 | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 106 |  |  | Munisi 40 mm AGL/MGL/SPG | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 107 |  |  | Munisi 57 mm AK 725/S60 | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 108 |  |  | Munisi 57 mm Bofors | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **109** |  |  | **Munisi 100 mm (Ranpur Marinir)** | **Kegiatan tidak dimasukkan dalam Pagu Indikatif 2023** |
| 110 |  |  | Munisi 105 mm | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 111 |  |  | Munisi 122 mm (Marinir) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **TNI AU** | | | | |
| 112 |  |  | Pesawat Multi Purpose Amphibious dan pendukungnya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 113 |  |  | Helikopter VIP dan Dukungannya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 114 |  |  | Pesawat Pengganti F-5 dan pendukungnya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 115 | Austria |  | Upgrading Med Equipment for Air Force Hospital dr. S. Harjolukito Jogja | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 116 | Austria |  | Improvement of Capabilities and Capacities Medical Services at Air Force Hospital dr. Kresno Manuhua- Biak | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 117 | Austria |  | Infectious Hospital for Air Force- Jakarta | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Lender** | **Kode Loan** | **Nama Kegiatan** | **Kegiatan** |
| 118 |  |  | (A) Interim Multirole Combat Air Craft (MRCA) dan dukungannya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 119 |  |  | Upgrade Su-27/30 setara MK2 Batch 3 | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 120 |  |  | Overhaul Su-27/30 | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 121 |  |  | Upgrade Hawk 100/200 | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 122 |  |  | Pesawat Multirole Transport Tanker (MRTT) dan dukungannya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 123 |  |  | Pesawat AEW dan dukungannya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 124 |  |  | Pesawat Angkut Berat dan Dukungannya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 125 |  |  | Pesawat Angkut Sedang dan Dukungannya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 126 |  |  | (A) Pesawat VIP dan dukungannya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 127 |  |  | Overhaul Engine & Propeller Pswt C- 130 Hercules | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 128 |  |  | Modernisasi Pesawat C-130 | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 129 |  |  | Helikopter Angkut Berat dan Dukungannya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 130 |  |  | UCAV MALE Light | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 131 |  |  | Pemenuhan Kesisteman UCAV MALE CH4 | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 132 |  |  | Radar GCI dan Dukungannya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 133 |  |  | Rudal Jarak Sedang (110 km) dan Dukungannya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 134 |  |  | Rudal Jarak Sedang (Dual Mission Missile) dan duk | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 135 |  |  | Rudal Jarak Sedang (200 - 250 km) dan Dukungannya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 136 |  |  | Launcher Rudal Jarak Sedang (50 - 70 km) dan Dukungannya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 137 |  |  | Rudal R-73 (Air to Air) 20 - 30 km | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 138 |  |  | Rudal R-77 (Air to Air) 80 - 100 km | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 139 |  |  | Rudal R-27 (ER/ET (Air to Air) Up to 130 km | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 140 |  |  | KH-29TE (Air to Ground) 30 km | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Lender** | **Kode Loan** | **Nama Kegiatan** | **Kegiatan** |
| 141 |  |  | KH-31P (Air to Ground) Up to 110 km | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 142 |  |  | Tester OKA-E Complex | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 143 |  |  | Rudal AIM-120C (Air to Air) 105 km | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 144 |  |  | Rudal AIM - 9X-2 (Air to Air) 18 - 20 km | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 145 |  |  | Rudal AIM - 9P-5 (Air to Air) 18 - 21 km | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 146 |  |  | Rudal AGM - 65G-2/AGM-65-K-2 (27  km) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 147 |  |  | Tester TS217 | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 148 |  |  | Pesawat LIFT dan Dukungannya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 149 |  |  | Helikopter Pengganti B-47 Soloy dan Dukungannya | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Dana Transfer Khusus, DJPK (Penerushibahan)** | | | | |
| ***On Going*** | | | | |
| 1 | JICA | IP-578 | Mass Rapid Transit (MRT) Project | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi, DJPb (Peneruspinjaman)** | | | | |
| ***On Going*** | | | | |
| **SLA pada PT Pertamina (Persero)** | | | | |
| 1 | JICA | IP-557 | Lumut Balai Geothermal Power Plant Project |  |
| **SLA pada PT PLN (Persero)** | | | | |
| **1** | **Jepang** | **IP-538** | **Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction Project** | **Kegiatan tidak dimasukkan dalam Pagu Indikatif 2023** |
| 2 | JICA | IP-532 | Asahan No.3 Hydroelectric Power Plant Construction Project | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **3** | **JICA** | **IP-561** | **Indramayu Coal Fired Power Plant Project (E/S)** | **Kegiatan tidak dimasukkan dalam Pagu Indikatif 2023** |
| 4 | JICA | IP-572 | Hululais Geothermal Power Plant Project (E/S) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| **5** | **JICA** | **IP-560** | **Tulehu Geothermal Power Plant Project (E/S)** | **Kegiatan tidak dimasukkan dalam Pagu Indikatif 2023** |
| **SLA pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta** | | | | |
| 6 | JICA | IP-571 | Construction Of Jakarta Mass Rapid Transit Project | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Lender** | **Kode Loan** | **Nama Kegiatan** | **Kegiatan** |
| **SLA pada PT SMI (Persero)** | | | | |
| 7 | CTF | TF0B030 6 | Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| ***Pipeline*** | | | | |
| 1 | Jepang | IP-XXX | Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction Project (II) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 2 | Jepang | IP-XXX | Additional Loan PLTA Asahan 3 (2 x 87 MW) | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |
| 3 | Jepang | IP-XXX | Hululais Geothermal Power Plant Project | Kegiatan masuk dalam Pagu Indikatif tahun 2023 |

**Tabel 3. 5 Rekapitulasi Persentase Kegiatan yang Masuk dalam Pagu Indikatif 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Instansi Pelaksana** | **Jumlah Kegiatan yang Direkomendasikan** | | **Jumlah Kegiatan yang masuk dalam PI 2023** | | **Persentase** | |
| ***Ongoing*** | ***Pipeline*** | ***Ongoing*** | ***Pipeline*** | ***Ongoing*** | ***Pipeline*** |
| 1 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | 3 | 2 | 3 | 2 | 100% | 100% |
| 2 | Kementerian Ketenagakerjaan | 3 | 1 | 3 | 1 | 100% | 100% |
| 3 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 17 | 14 | 17 | 14 | 100% | 100% |
| 4 | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 3 | 0 | 3 | 0 | 100% | 100% |
| 5 | Badan Riset dan Inovasi Nasional (Portofolio Pinjaman pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)) | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 100% |
| 6 | Kementerian Perhubungan | 4 | 3 | 4 | 3 | 100% | 100% |
| 7 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 100% |
| 9 | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% | 100% |
| 10 | Kejaksaan Republik Indonesia | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 100% |
| 11 | Badan Intelijen Negara | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 100% |
| 12 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas | 3 | 0 | 3 | 0 | 100% | 100% |
| 13 | Kepolisian Republik Indonesia | 22 | 33 | 22 | 29 | 100% | 88% |
| 14 | Kementerian Pertahanan/TNI | 34 | 149 | 34 | 137 | 100% | 92% |
| 15 | Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Dana Transfer Khusus, DJPK  (Penerushibahan) | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 100% |
| 16 | Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi, DJPb  (Peneruspinjaman) | 7 | 3 | 4 | 3 | 57% | 100% |
| **Total** | | **99** | **212** | **96** | **196** | **96,97%** | **92,45%** |
| **311** | | **292** | | **93,89%** | |

#### Indikator Kinerja 3

##### % Keselarasan sasaran program Renja K/L mitra kerja dengan sasaran Renstra K/L mitra kerja

Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas a.n Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Surat Tugas No. 58/ST/SES/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 menugaskan Direktorat Pendanaan Bilateral sebagai penanggung jawab program, penanggung jawab kegiatan, dan pelaksanaan teknis penyusunan RKP, Rencana Kerja K/L, dan RKA K/L Sekretariat Kabinet (Setkab) tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2022, Direktorat Pendanaan Bilateral menjadi mitra kerja Setkab dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Setkab TA 2022.

Salah satu peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum penyusunan Renja Setkab TA 2022 adalah Peraturan Menteri PPN No. 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Renja K/L. Berdasarkan Permen PPN No. 1/2021 tersebut, penyusunan Renja TA 2022 dilaksanakan dengan mempertimbangkan Renstra Setkab 2020- 2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet pada bulan Maret 2021. Dokumen ini merupakan revisi dari Renstra yang diterbitkan Setkab pada tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Sekretaris Kabinet No. 1 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan penerapan konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Dengan adanya revisi tersebut, sebagian sasaran program hanya dilaksanakan pada Renstra tahun 2020.

Baik Renja maupun Renstra terdiri dari 2 (dua) program yaitu Dukungan Manajemen (WA) dan Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden (CA). Dengan demikian, terdapat keselarasan antara Renja dan Renstra menyangkut jumlah dan nomenklatur program. Selain itu, Renja dan Renstra juga selaras pada level Sasaran Program. Kedua dokumen sama-sama mempunyai 7 Sasaran Program, dengan rincian 1 Sasaran Program untuk Program WA dan 6 Sasaran Program untuk Program CA.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan sedikit mengenai jumlah Indikator Kinerja Program (IKP) pada Renstra dan Renja. Renstra memiliki 34 IKP yang terdiri dari 9 IKP untuk Program WA dan 25 IKP untuk Program CA, sedangkan jumlah IKP pada Renja mencapai 35 IKP, yang terdiri dari 8 IKP untuk Program Dukman dan 27 IKP untuk Program CA. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh adanya perubahan informasi kinerja pada Renja 2023 untuk menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2021. Tabel berikut menunjukkan sandingan secara rinci antara Renstra Setkab 2020-2024 dan Renja Setkab TA 2023.

#### Tabel 3. 6 Sandingan Rencana Strategis 2024 - 2024 dengan Rencana Kerja TA 2023 Sekretariat Kabinet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET 2020-2024** | | | | | | | **RENCANA KERJA SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **KETERANGAN** |
| **KODE** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2020** | **Target 2021** | **Target 2022** | **Target 2023** | **Target 2024** | **KODE** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2023** |
| **Program Dukungan Manajemen** | | | | | | | | | | |
| 01 | Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet |  |  |  |  |  | 01 | Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet |  | Selaras |
| 01.01 | Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet | 90% | 81% | 82% | 83% | 84% | 01.01 | Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet | 83% | Selaras |
| 01.02 | Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | 01.02 | Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet | WTP | Selaras |
| 01.03 | Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabinet | BB (73,50) | BB (74) | BB (74,50) | BB (75) | BB (75,50) | 01.03 | Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabinet | BB(75) | Selaras |
| 01.04 | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet | A (81,30) | A (81,40) | A (81,50) | A (81,60) | A (81,70) | 01.04 | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet | A (81,60) | Selaras |
| 01.05 | Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet | 86 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 01.05 | Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet | 86,5 | Selaras |
| 01.06 | Nilai hasil monev keterbukaan informasi publik |  | Menuju informatif (83) | Menuju informatif (85) | Menuju informatif (88) | Informat if  (90) | 01.06 | Nilai hasil monev keterbukaan informasi publik | Menuju informatif (88) | Selaras |
| 01.07 | Indeks Kematangan SPBE |  | 2,75 | 2,85 | 2,95 | 3,05 | - | - | - | Indeks Kematangan SPBE dialihkan menjadi bagian dari IKP 01.05 |
| 01.08 | Persentase tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang |  | 91% | 92% | 93% | 94% | 01.07 | Persentase tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet | 93% | Selaras |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET 2020-2024** | | | | | | | **RENCANA KERJA SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **KETERANGAN** |
| **KODE** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2020** | **Target 2021** | **Target 2022** | **Target 2023** | **Target 2024** | **KODE** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2023** |
|  | disebarluaskan melalui website dan media sosial |  |  |  |  |  |  | yang disebarluaskan melalui website dan media sosial |  |  |
| 01.09 | Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan |  | 91% | 92% | 93% | 94% | 01.08 | Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan | 93% | Selaras |
| **Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden** | | | | | | | | | | |
| 01 | Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi |  |  |  |  |  | 01 | Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi |  | Selaras |
| 01.01 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dimanfaatkan | 0 | 91% | 93% | 96% | 100% | 01.01 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dimanfaatkan | 96% | Selaras |
| 01.02 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti | 0 | 91% | 93% | 96% | 100% | 01.02 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan  kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti | 96% | Selaras |
| 01.03 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan | 0 | 91% | 93% | 96% | 100% | 01.03 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan | 96% | Selaras |
| 01.04 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | 0 | 91% | 93% | 96% | 100% | 01.04 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan  kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | 96% | Selaras |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET 2020-2024** | | | | | | | **RENCANA KERJA SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **KETERANGAN** |
| **KODE** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2020** | **Target 2021** | **Target 2022** | **Target 2023** | **Target 2024** | **KODE** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2023** |
| 01.05 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimanfaatkan | 0 | 91% | 93% | 96% | 100% | 01.05 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimanfaatkan | 96% | Selaras |
| 01.06 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti | 0 | 91% | 93% | 96% | 100% | 01.06 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan  kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti | 96% | Selaras |
| 01.07 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dimanfaatkan | 0 | 91% | 93% | 96% | 100% | 01.07 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dimanfaatkan | 96% | Selaras |
| 01.08 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti | 0 | 91% | 93% | 96% | 100% | 01.08 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan  kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti | 96% | Selaras |
| 02 | Terwujudnya rekomendasi kebijakan Utusan Khusus Presiden dan layanan khusus Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden yang berkualitas | 0 |  |  |  |  | 02 | Terwujudnya rekomendasi kebijakan Utusan Khusus Presiden dan layanan khusus Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden yang berkualitas |  | Selaras |
| 02.01 | Persentase laporan layanan khusus yang disampaikan kepada Presiden | 0 | 60% | 60% | 60% | 60% | 02.01 | Persentase laporan layanan khusus yang disampaikan kepada Presiden | 60% | SelaraS |
| 02.02 | Persentase laporan layanan khusus yang disampaikan kepada Wakil Presiden | 0 | 60% | 60% | 60% | 60% | 02.02 | Persentase laporan layanan khusus yang disampaikan kepada Wakil Presiden | 60% | Selaras |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET 2020-2024** | | | | | | | **RENCANA KERJA SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **KETERANGAN** |
| **KODE** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2020** | **Target 2021** | **Target 2022** | **Target 2023** | **Target 2024** | **KODE** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2023** |
| 02.03 | Persentase rekomendasi Utusan Khusus Presiden yang disetujui oleh Presiden | 0 | 60% | 60% | 60% | 60% | 02.03 | Persentase rekomendasi Utusan Khusus Presiden yang disetujui oleh Presiden | - | Nomenklatur selaras namun target tidak selaras karena sampai dengan November 2022, posisi UKP kosong. |
| 03 | Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi |  |  |  |  |  | 03 | Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi |  | Selaras |
| 03.01 | Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti | 0 | 91% | 93% | 96% | 100% | 03.01 | Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti | 96% | Selaras |
| 03.02 | Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti | 0 | 91% | 93% | 96% | 100% | 03.02 | Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti | 96% | Selaras |
| 03.03 | Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | 0 | 91% | 93% | 96% | 100% | 03.03 | Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | 96% | Selaras |
| 03.04 | Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan | 0 | 91% | 93% | 96% | 100% | 03.04 | Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan | 96% | Selaras |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET 2020-2024** | | | | | | | **RENCANA KERJA SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **KETERANGAN** |
| **KODE** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2020** | **Target 2021** | **Target 2022** | **Target 2023** | **Target 2024** | **KODE** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2023** |
|  | kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti |  |  |  |  |  |  | kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti |  |  |
| 03.05 | Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti | 0 | 91% | 93% | 96% | 100% | 03.05 | Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti | 96% | Selaras |
| 03.06 | Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti | 0 | 91% | 93% | 96% | 100% | 03.06 | Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti | 96% | Selaras |
| 03.07 | Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti | 0 | 91% | 93% | 96% | 100% | 03.07 | Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti | 96% | Selaras |
| 03.08 | Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti | 0 | 91% | 93% | 96% | 100% | 03.08 | Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti | 96% | Selaras |
| 04 | Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas |  |  |  |  |  | 04 | Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas |  | Selaras |
| 04.01 | Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet, rapat, | 0 | 91% | 92% | 93% | 94% | 04.01 | Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin | 93% | Tidak selaras\*\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET 2020-2024** | | | | | | | **RENCANA KERJA SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **KETERANGAN** |
| **KODE** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2020** | **Target 2021** | **Target 2022** | **Target 2023** | **Target 2024** | **KODE** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2023** |
|  | atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden |  |  |  |  |  |  | dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden |  |  |
| 04.02 | Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden | 93% | Selaras |
| 04.02 | Persentase naskah kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden RI | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 04.03 | Persentase naskah kepresidenan yang disetujui Presiden RI | 100% | Nomenklantur tidak selaras, namun target selaras |
| 04.03 | Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari stakeholders | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 04.04 | Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari stakeholders | 100% | Selaras |
| 05 | Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas |  |  |  |  |  | 05 | Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas |  | Selaras |
| 05.01 | Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara akurat | 0 | 97% | 98% | 99% | 100% | 05.01 | Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara akurat | 99% | Selaras |
| - | - |  |  |  |  |  | 05.02 | Persentase Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, | 90% | Tidak selaras\*\*\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET 2020-2024** | | | | | | | **RENCANA KERJA SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **KETERANGAN** |
| **KODE** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2020** | **Target 2021** | **Target 2022** | **Target 2023** | **Target 2024** | **KODE** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2023** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang disetujui oleh Presiden |  |  |
| 06 | Terwujudnya layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah yang berkualitas |  |  |  |  |  | 06 | Terwujudnya layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah yang berkualitas |  | Selaras |
| 06.01 | Persentase rekomendasi penilaian pejabat fungsional penerjemah yang diselesaikan secara akurat | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 06.1 | Persentase rekomendasi penilaian pejabat fungsional penerjemah yang diselesaikan secara akurat | 100% | Selaras |
| 06.02 | Tingkat kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 06.02 | Tingkat kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penerjemah | 90% | Nomenklantur selaras; Target tidak selaras\*\*\*\* |
| 07 | Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.01 | Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 07.02 | Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 07.03 | Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 08 | Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET 2020-2024** | | | | | | | **RENCANA KERJA SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **KETERANGAN** |
| **KODE** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2020** | **Target 2021** | **Target 2022** | **Target 2023** | **Target 2024** | **KODE** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2023** |
|  | Perekonomian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.1 | Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 08.2 | Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 08.3 | Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau 100 dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perekonomian yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 09 | Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.01 | Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 09.02 | Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan 100 perundang-undangan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET 2020-2024** | | | | | | | **RENCANA KERJA SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **KETERANGAN** |
| **KODE** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2020** | **Target 2021** | **Target 2022** | **Target 2023** | **Target 2024** | **KODE** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2023** |
| 09.03 | Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau 100 dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kemaritiman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01 | Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10.02 | Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan 100 perundang-undangan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10.03 | Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Terwujudnya pengelolaan dukungan kerja kabinet yang berkualitas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01 | Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET 2020-2024** | | | | | | | **RENCANA KERJA SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **KETERANGAN** |
| **KODE** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2020** | **Target 2021** | **Target 2022** | **Target 2023** | **Target 2024** | **KODE** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2023** |
| 11.02 | Persentase penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11.03 | Persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11.04 | Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11.05 | Persentase kepuasan peserta diklat fungsional penerjemah | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Tabel berikut menunjukkan nilai akhir % keselarasan sasaran program Renja K/L mitra kerja dengan sasaran Renstra K/L mitra kerja. Untuk menentukan nilai akhir tersebut, dilakukan pembobotan dengan nilai maksimal 100, dengan rincian bobot Sasaran Program 50 dan bobot Indikator Kinerja Program 50. Dengan demikian, capaian Direktorat Pendanaan Bilateral pada IKU % keselarasan sasaran program Renja K/L mitra kerja dengan sasaran Renstra K/L mitra kerja pada tahun 2022 adalah 95%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jumlah | Nilai Keselarasan | Rata-rata Nilai keselarasan | Hasil Pembobotan | Nilai Akhir  \* |
| **Sasaran Program** | | | | | 95 |
| Program Dukungan Manajemen | 1 | 100 | 100 | 50 |
| Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden | 6 | 600 |
| Total | 7 | 700 |
| **Indikator Kinerja Program** | | | | |
| Program Dukungan Manajemen | 8 | 800 | 90 | 45 |
| Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden | 27 | 2350 |
| Total | 35 | 3150 |

Catatan \*): Nilai akhir dikonversi ke dalam nilai %

#### Indikator Kinerja 4

##### % keselarasan sasaran program Renja K/L mitra kerja dengan RKA mitra kerja

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai mitra kerja Sekretariat Kabinet (Setkab), Direktorat Pendanaan Bilateral mempunyai kerjasama yang baik dengan Setkab dan Direktorat Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan, serta instansi terkait lainnya dalam seluruh rangkaian proses penyusunan Renja dan RKA K/L Setkab TA 2023. Kerjasama yang baik ini tercermin dari adanya keselarasan antara Renja Setkab TA 2023 dan RKA K/L Setkab TA 2023 yang mencapai 100% sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini. Dalam hal ini, keselarasan 100% tersebut terwujud pada setiap level, mulai dari Program, Sasaran Program sampai dengan Indikator Kinerja Program.

#### Sandingan Rencana Kerja TA 2023 dan RKA K/L Sekretariat Kabinet TA 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE** | **RENCANA KERJA SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **RKA K/L SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **KETERANGAN** |
| **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2023** | **Alokasi (Rp)** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Volume/Satuan** | **Alokasi (Rp)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program Dukungan Manajemen** |  | **308.229.378.000** | **Program Dukungan Manajemen** |  | **308.229.378.000** | **Selaras (100%)** |
| 01 | Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet |  |  | Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet |  |  | Selaras (100%) |
| 01.01 | Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet | 83% |  | Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet | 83% |  | Selaras (100%) |
| 01.02 | Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet | WTP |  | Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet | WTP |  | Selaras (100%) |
| 01.03 | Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabinet | BB (75) |  | Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabinet | BB (75) |  | Selaras (100%) |
| 01.04 | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet | A (81,60) |  | Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet | A (81,60) |  | Selaras (100%) |
| 01.05 | Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet | 86,5 |  | Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Kabinet | 86,5 |  | Selaras (100%) |
| 01.06 | Nilai hasil monev keterbukaan informasi publik | Menuju Informatif (88) |  | Nilai hasil monev keterbukaan informasi publik | Menuju Informatif (88) |  | Selaras (100%) |
| 01.07 | Persentase tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan melalui website dan media sosial | 93% |  | Persentase tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan melalui website dan media sosial | 93% |  | Selaras (100%) |
| 01.08 | Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan | 93% |  | Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan | 93% |  | Selaras (100%) |
|  | **Program Penyelenggaraan Layanan** |  | **44.062.850.000** | **Program Penyelenggaraan Layanan** |  | **44.062.850.000** | Selaras |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE** | **RENCANA KERJA SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **RKA K/L SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **KETERANGAN** |
| **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2023** | **Alokasi (Rp)** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Volume/Satuan** | **Alokasi (Rp)** |
|  | **kepada Presiden dan Wakil Presiden** |  |  | **kepada Presiden dan Wakil Presiden** |  |  | (100%) |
| 01 | Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi |  |  | Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi |  |  | Selaras (100%) |
| 01.01 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dimanfaatkan | 96% | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dimanfaatkan | 96% | Selaras (100%) |
| 01.02 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti | 96% |  | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti | 96% |  | Selaras (100%) |
| 01.03 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan | 96% |  | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang dimanfaatkan | 96% |  | Selaras (100%) |
| 01.04 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | 96% |  | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | 96% |  | Selaras (100%) |
| 01.05 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimanfaatkan | 96% |  | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimanfaatkan | 96% |  | Selaras (100%) |
| 01.06 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang | 96% |  | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti | 96% |  | Selaras (100%) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE** | **RENCANA KERJA SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **RKA K/L SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **KETERANGAN** |
| **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2023** | **Alokasi (Rp)** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Volume/Satuan** | **Alokasi (Rp)** |
|  | ditindaklanjuti |  |  |  |  |  |  |
| 01.07 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dimanfaatkan | 96% |  | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dimanfaatkan | 96% |  | Selaras (100%) |
| 01.08 | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti | 96% |  | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti | 96% |  | Selaras (100%) |
| 02 | Terwujudnya rekomendasi kebijakan Utusan Khusus Presiden dan layanan khusus Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden yang berkualitas |  |  | Terwujudnya rekomendasi kebijakan Utusan Khusus Presiden dan layanan khusus Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden yang berkualitas |  |  | Selaras (100%) |
| 02.01 | Persentase laporan layanan khusus yang disampaikan kepada Presiden | 60% |  | Persentase laporan layanan khusus yang disampaikan kepada Presiden | 60% |  | Selaras (100%) |
| 02.02 | Persentase laporan layanan khusus yang disampaikan kepada Wakil Presiden | 60% |  | Persentase laporan layanan khusus yang disampaikan kepada Wakil Presiden | 60% |  | Selaras (100%) |
| 02.03 | Persentase rekomendasi Utusan Khusus Presiden yang disetujui oleh Presiden | - |  | Persentase rekomendasi Utusan Khusus Presiden yang disetujui oleh Presiden | - |  | Selaras (100%) |
| 03 | Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi |  |  | Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi |  |  | Selaras (100%) |
| 03.01 | Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti | 96% |  | Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti | 96% |  | Selaras (100%) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE** | **RENCANA KERJA SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **RKA K/L SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **KETERANGAN** |
| **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2023** | **Alokasi (Rp)** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Volume/Satuan** | **Alokasi (Rp)** |
| 03.02 | Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti | 96% |  | Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti | 96% |  | Selaras (100%) |
| 03.03 | Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | 96% |  | Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | 96% |  | Selaras (100%) |
| 03.04 | Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | 96% |  | Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti | 96% |  | Selaras (100%) |
| 03.05 | Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti | 96% |  | Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti | 96% |  | Selaras (100%) |
| 03.06 | Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti | 96% |  | Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti | 96% |  | Selaras (100%) |
| 03.07 | Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti | 96% |  | Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti | 96% |  | Selaras (100%) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE** | **RENCANA KERJA SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **RKA K/L SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **KETERANGAN** |
| **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2023** | **Alokasi (Rp)** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Volume/Satuan** | **Alokasi (Rp)** |
| 03.08 | Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan & program pemerintah di Bidang Kemaritiman & Investasi yang ditindaklanjuti | 96% |  | Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditindaklanjuti | 96% |  | Selaras (100%) |
| 04 | Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas |  | Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas |  | Selaras (100%) |
| 04.01 | Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden | 93% |  | Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden | 93% |  | Selaras (100%) |
| 04.02 | Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden | 93% |  | Persentase tingkat kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden | 93% |  | Selaras (100%) |
| 04.03 | Persentase naskah kepresidenan yang disetujui kepada Presiden RI | 100% |  | Persentase naskah kepresidenan yang disetujui kepada Presiden RI | 100% |  | Selaras (100%) |
| 04.04 | Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari stakeholders | 100% |  | Persentase dokumen terjemahan yang tidak mendapatkan komplain dari stakeholders | 100% |  | Selaras (100%) |
| 05 | Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas |  |  | Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas |  |  | Selaras (100%) |
| 05.01 | Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara akurat | 99% |  | Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara akurat | 99% |  | Selaras (100%) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE** | **RENCANA KERJA SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **RKA K/L SEKRETARIAT KABINET TA 2023** | | | **KETERANGAN** |
| **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Target 2023** | **Alokasi (Rp)** | **Sasaran Program/Indikator Kinerja Program** | **Volume/Satuan** | **Alokasi (Rp)** |
| 05.02 | Persentase Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang disetujui oleh Presiden | 90% |  | Persentase Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang disetujui oleh Presiden | 90% |  | Selaras (100%) |
| 06 | Terwujudnya layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah yang berkualitas |  | Terwujudnya layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah yang berkualitas |  | Selaras (100%) |
| 06.1 | Persentase rekomendasi penilaian pejabat fungsional penerjemah yang diselesaikan secara akurat | 100% |  | Persentase rekomendasi penilaian pejabat fungsional penerjemah yang diselesaikan secara akurat | 100% |  | Selaras (100%) |
| 06.02 | Tingkat kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penerjemah | 90% | Tingkat kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penerjemah | 90% | Selaras (100%) |

* + - 1. **Indikator Kinerja 5**

##### % Daftar kegiatan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan untuk proses Loan Agreement dalam rangka pembiayaan RKP

Terkait dengan target penyusunan dokumen Daftar Kegiatan, sepanjang tahun 2022 Direktorat Pendanaan Bilateral telah memproses Daftar Kegiatan yang terdiri atas 14 (empat belas) proyek pinjaman luar negeri bilateral (tabel 3.7). *Executing Agency* dari delapan proyek tersebut yaitu Kementerian Perhubungan (2 proyek), Kementerian Komunikasi dan Informatika (1 proyek), Kementerian Pertahanan (2 proyek), Kementerian PUPR (5 proyek), Kementerian Ketenagakerjaan (1 proyek), Kementerian Kelautan dan Perikanan (1 Proyek), Badan Siber dan Sandi Negara (1 proyek), dan PT. PLN (1 proyek).

**Tabel 3. 7 Daftar Kegiatan 2022 Mitra Pembangunan Pendanaan Bilateral**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Proyek** | **Instansi** | **Usulan Nilai** | **Indikasi Pendanaan** | **Tgl DK** |
| 1 | Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities for Airforce Hospital Suhardi Hardjolukito - Yogyakarta | Kementerian Pertahanan | EUR 9,95  Juta | Austria | 14 Januari  2022 |
| 2 | Karian Dam - Serpong Water Conveyance System (KSCS) Project | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | USD 207.725.000 | Korea | 14 Januari  2022 |
| 3 | Additional Loan Karian Dam Project | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | USD 40.351.000 | Korea | 21 Februari  2022 |
| 4 | Strengthening of e-Government Infrastructure (Pembangunan Pusat Data di Batam) | Kementerian Komunikasi dan Informatika | USD 160  Juta | Korea | 11 Maret  2022 |
| 5 | Implementation Project of Public Transportation Project | Kementerian Perhubungan | USD 40 Juta | AFD  Perancis | 30 Maret  2022 |
| 6 | Outer Ring Fishing Port Development (Eco Fishing Port) | Kementerian Kelautan dan Perikanan | USD 105  Juta | AFD  Perancis | 22 April  2022 |
| 7 | Development of Semarang-Demak Toll Road Project Integrated with Sea Dike 1A, 1B, 1C | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | USD 676  Juta | Tiongkok | 20 Mei 2022 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Proyek** | **Instansi** | **Usulan Nilai** | **Indikasi Pendanaan** | **Tgl DK** |
| 8 | Development of Vocational Training Centers-Banyuwangi | Kementerian Ketenagakerjaan | EUR 10,8  Juta | Austria | 30  September 2022 |
| 9 | Jenelata Dam Construction Project | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | USD 237.862.427 | Tiongkok | 11 Oktober  2022 |
| 10 | Establishment of Infectious Hospital for Air Force - Jakarta | Kementerian Pertahanan | EUR 53,46  Juta | Austria | 18 Oktober  2022 |
| 11 | Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project (Phase 2) (II) | Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | JPY 87.918  Juta | Jepang | 26 Oktober  2022 |
| 12 | Additional Loan for Asahan No.3 Hydroelectric Power Plant Construction Project | PT. PLN | JPY 13.430  Juta | Jepang | 26 Oktober  2022 |
| 13 | Patimban Access Toll Road Project | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | USD 312  Juta / JPY  42.120 Juta | Jepang | 9 November  2022 |
| 14 | Strengthening Cyber Security Ecosystem in Indonesia | Badan Siber dan Sandi Negara | USD 250  Juta | Spanyol | 13  Desember 2022 |

Dari ke-14 (empat belas) daftar kegiatan yang disampaikan Kementerian PPN/Bappenas, seluruhnya kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Tindak lanjut tersebut berupa undangan rapat tindak lanjut, formal request, serta pembahasan *draft Agreement*. Tabel 3.8 menunjukkan korespondensi tindak lanjut Daftar Kegiatan yang diproses oleh Direktorat Pendanaan Bilateral oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2022. Dengan demikian, dari delapan daftar kegiatan yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan seluruhnya (100 %) telah ditindaklanjuti.

**Tabel 3. 8 Tindak Lanjut Daftar Kegiatan 2022 Mitra Pembangunan Direktorat Pendanaan Bilateral**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Proyek** | **Bentuk Tindak Lanjut** | **Tanggal** |
| 1 | Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities for Airforce Hospital Suhardi Hardjolukito - Yogyakarta | Telah ditandatangani Credit Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan Unicredit Bank Austria AG | 20 Mei 2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Proyek** | **Bentuk Tindak Lanjut** | **Tanggal** |
| 2 | Karian Dam - Serpong Water Conveyance System (KSCS) Project | Penyampaian Formal Request Direktur Jenderal PPR Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Republik Korea (Bilateral Promotional Loan EDPF untuk proyek Karian Dam - Serpong Water Conveyance System (KSCS)) | 12 Februari  2022 |
| 3 | Additional Loan Karian Dam Project | Penyampaian surat Official submission of draft LA for Additional Loan Karian Dam Project dari Direktur Pinjaman dan Hibah Kemenkeu kepada Pemerintah Korea | 26 Juli 2022 |
| 4 | Strengthening of e- Government Infrastructure (Pembangunan Pusat Data di Batam) | Penyampaian surat Official submission of draft LA for Strengthening e-Gov Infrastructure Project dari Direktur Pinjaman dan Hibah Kemenkeu kepada Pemerintah Korea | 26 Juli 2022 |
| 5 | Implementation Project of Public Transportation Project | Rapat Interkementerian Lanjutan Membahas Konsep Credit Facility Agreement dalam rangka Pembiayaan Kegiatan National Mass Transit Program “MASTRAN” | 23 Juni 2022 |
| 6 | Outer Ring Fishing Port Development (Eco Fishing Port) | Telah ditandatanganinya Loan Agreement (LA) untuk proyek Outer Ring Fishing Port Development (Eco Fishing Port) | 23 Desember  2022 |
| 7 | Development of Semarang-Demak Toll Road Project Integrated with Sea Dike 1A, 1B, 1C | Pembahasan Draft Loan Agreement dalam rangka pembiayaan Kontrak Kegiatan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Paket 1A dan Paket 1C | 4 Oktober  2022 |
| Rapat Interkem Persiapan Negosiasi draft LA CEXIM untuk pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak paket 1 B | 22 November  2022 |
| 8 | Development of Vocational Training Centers-Banyuwangi | Formal Request to Finance The Development of Maritime Vocational Training Center in Banyuwangi disampaikan Direktur Jenderal PPR Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Austria | 20 Oktober  2022 |
| 9 | Jenelata Dam Construction Project | Rapat Penyusunan dokumen PBC Application pembiayaan kegiatan Jenelata Dam Construction Project | 18 Oktober  2022 |
| 10 | Establishment of Infectious Hospital for Air Force - Jakarta | Formal Request to Finance the Establishment of Infectious Hospital for Air Force - Jakarta disampaikan Direktur Jenderal PPR Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Austria | 27 Oktober  2022 |
| 11 | Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project (Phase 2) (II) | Penyampaian Official Request for the Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project (Phase 2)  (II) dari Direktur Jenderal PPR Kementerian Keuangan kepada Duta Besar Jepang | 10 November  2022 |
| 12 | Additional Loan for Asahan No.3 Hydroelectric Power Plant Construction Project | Penyampaian Surat Pemilihan Terms and Conditions of Japanese ODA Loan untuk Proyek Additional Loan for Asahan No.3 Hydroelectric Power Plant Construction Project | 8 November  2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Proyek** | **Bentuk Tindak Lanjut** | **Tanggal** |
| 13 | Patimban Access Toll Road Project | Rapat Interkem Pembahasan Draft Loan Agreement (LA) Pinjaman Kegiatan JICA “Patimban Access Toll Road Project” | 7 Desember  2022 |
| 14 | Strengthening Cyber Security Ecosystem in Indonesia | Rapat Pembahasan Konfirmasi dan Tindak Lanjut atas Penerbitan Daftar Kegiatan Strengthening Cyber Security Ecosystem in Indonesia dari Pinjaman Pemerintah Spanyol pada BSSN | 28 Desember  2022 |

#### Indikator Kinerja 6

##### Persentase (%) ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup pendanaan bilateral dan kredit ekspor terhadap proyek- proyek on-going

Indikator Kinerja 6 (IK6) diukur melalui ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup pendanaan bilateral. Terdapat 4 (empat) Laporan Pemantauan Pelaksanaan dan Kinerja Kegiatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Bilateral yang harus dikeluarkan oleh Direktorat Pendanaan Bilateral selama tahun 2022, yakni Laporan Pemantauan Pinjaman Luar Negeri Bilateral Triwulan IV Tahun 2021 dan Laporan Pemantauan Pinjaman Luar Negeri Bilateral Triwulan I, II, III Tahun 2022 (jangka waktu Oktober 2021 s.d September 2022). Pada tahun 2022, Direktorat Pendanaan Bilateral telah menyelesaikan keseluruhan laporan tersebut pada 45 proyek sebagaimana ditunjukan pada tabel 3.9. Dengan demikian target ketersediaan informasi pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pendanaan bilateral telah terealisasi seluruhnya (100%).

***Tabel 3. 9* Daftar Pemantauan dan Evaluasi Proyek *On-Going***

**Mitra Pembangunan Pendanaan Bilateral**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Proyek** | **Instansi** | **Masa Laku** | **Nilai Pinjaman (Juta**  **USD)** | **Sumber Pendanaan** |
| 1 | **2010 66 471** - Emission Reduction in Cities: Solid Waste Management | Kementerian PUPR | 02/05/2013  s/d 30/06/2022 | 82,40 | Jerman (KfW) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Proyek** | **Instansi** | **Masa Laku** | **Nilai Pinjaman (Juta**  **USD)** | **Sumber Pendanaan** |
| 2 | **3010 00 736 -** The Development of Regional Water Supply System Wosusokas | Kementerian PUPR | 17/02/2021  s/d 31/12/2026 | 100,80 | Jerman (KfW) |
| 3 | **2099 18 111 -** Development of Teaching Hospital Hasanuddin University | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 01/11/2017  s/d 01/11/2022 | 33,20 | Jerman (KfW) |
| 4 | **30 500** - Development of Teaching Hospital Brawijaya University | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 30/12/2021  s/d 30/09/2027 | 42,70 | Jerman (KfW) |
| 5 | **ECFA02.10.2019 -** Upgrading Medical Equipment for Army Hospital Indonesian Army of Gatot Subroto | Kementerian Pertahanan | 02/10/2019  s/d 02/10/2022 | 130 | Austria |
| 6 | **237.193 -** Upgrading Medical Equipments for Army Hospitals Putri Hijau | Kementerian Pertahanan | 30/06/2020  s/d 30/06/2022 | 9,00 | Austria |
| 7 | **238.43 -** Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities for Naval Hospitals dr. Ramelan | Kementerian Pertahanan | 11/12/2020  s/d 11/07/2022 | 9,65 | Austria |
| 8 | **238.38 -** Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities for Air Force Hospitals  M. Sutomo | Kementerian Pertahanan | 11/12/2020  s/d 11/12/2022 | 11,58 | Austria |
| 9 | **238.523** - Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities For Army Hospital Udayana | Kementerian Pertahanan | 10/01/2022  s/d 09/04/2023 | 7.72 | Austria |
| 10 | **238.457 -** Upgrading Medical Equipments And Supporting Facilities For Naval Hospitals dr. R.Oetojo Sorong | Kementerian Pertahanan | 10/01/2022  s/d 09/01/2024 | 9.65 | Austria |
| 11 | **238.793 -** Upgrading Medical Equipments And Supporting | Kementerian Pertahanan | 20/05/2022  s/d | 9.60 | Austria |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Proyek** | **Instansi** | **Masa Laku** | **Nilai Pinjaman (Juta**  **USD)** | **Sumber Pendanaan** |
|  | Facilities For Air Force Hospitals dr. S. Hardjolukito |  | 20/04/2024 |  |  |
| 12 | **237.575 -** Development Maritime Vocational Training Center Medan | Kementerian Ketenagakerja an | 21/02/2020  s/d 30/04/2023 | 14,30 | Austria |
| 13 | **238.271** - Development Maritime Vocational Training Center Serang | Kementerian Ketenagakerja an | 11/08/2020  s/d 31/12/2023 | 17,20 | Austria |
| 14 | **238.511 -** Development Maritime Vocational Training Center Makassar | Kementerian Ketenagakerja an | 25/02/2021  s/d 31/03/2024 | 14,50 | Austria |
| 15 | **22461800 -** Scaling Up BMKG Climate and Weather Service Capacity (SUS) | BMKG | 25/01/2019  s/d 31/07/2024 | 24,40 | Perancis (Natixis) |
| 16 | **22461500 -** Development of Maritime Meteorological Information System (MMS 1) | BMKG | 23/07/2019  s/d 31/07/2025 | 49,40 | Perancis (Natixis) |
| 17 | **22461900 -** Development of Maritime Meteorological Information System (MMS 2) | BMKG | 19/12/2019  s/d 30/11/2025 | 71,50 | Perancis (AFD) |
| 18 | **CID 1077 02L -** Procurement of Multipurposes Research Vessels | BRIN | 08/06/2021  s/d 08/06/2027 | 101,75 | Perancis (AFD) |
| 19 | **2018 14 TTL 471 -** Toll Road  Development of Cileunyi- Sumedang-Dawuan Phase III | Kementerian PUPR | 18/10/2018  s/d 18/10/2023 | 130,38 | RR  Tiongkok |
| 20 | **INA-20 -** Development of Sewerage System in Batam Island Project | Badan Pengusahaan Batam | 29/12/2014  s/d 31/12/2022 | 50,00 | Korea |
| 21 | **INA-19 -** Construction of Karian Multipurpose Dam Project | Kementerian PUPR | 14/02/2012  s/d 14/06/2022 | 100,00 | Korea |
| 22 | **INA-22 -** Engineering Services for Multipurpose Dams, Rivers, and Coastal | Kementerian PUPR | 15/02/2019  s/d 15/01/2024 | 31,70 | Korea |
| 23 | **INA-23 -** Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation Project for Western Region of Indonesia | Kementerian PUPR | 06/09/2019  s/d 06/09/2025 | 98,00 | Korea |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Proyek** | **Instansi** | **Masa Laku** | **Nilai Pinjaman (Juta**  **USD)** | **Sumber Pendanaan** |
| 24 | **INA-24 –** Development and Improvement of Indonesian Aids to Navigation | Kementerian Perhubungan | 27/04/2021  s/d 27/06/2025 | 67,26 | Korea |
| 25 | **IP-565 -** Metropolitan Sanitation Management Investment Program: Engineering Services for Sewerage System Development in DKI Jakarta | Kementerian PUPR | 23/06/2014  s/d 23/06/2023 | 13,63 | Jepang (JICA) |
| 26 | **IP-567 -** Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir II | Kementerian PUPR | 23/06/2014  s/d 23/12/2024 | 34,33 | Jepang (JICA) |
| 27 | **IP-573 -** Rentang Irrigation Modernization Project | Kementerian PUPR | 27/07/2017  s/d 27/07/2026 | 334,31 | Jepang (JICA) |
| 28 | **IP-574 -** Komering Irrigation Project (Phase 3) | Kementerian PUPR | 27/07/2017  s/d 27/07/2025 | 110,17 | Jepang (JICA) |
| 29 | **IP-575 -** Bali Beach Conservation Project (Phase 2) | Kementerian PUPR | 27/07/2017  s/d 27/07/2025 | 68,30 | Jepang (JICA) |
| 30 | **IP-579 -** Jakarta Sewerage Development Project (Zone 6) Phase 1 | Kementerian PUPR | 06/02/2020  s/d 06/02/2027 | 214,71 | Jepang (JICA) |
| 31 | **IP-580 -** Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL) in Central Sulawesi | Kementerian PUPR | 22/04/2020  s/d 22/04/2026 | 193,85 | Jepang (JICA) |
| 32 | **IP-581 -** Jakarta Sewerage Development Project (Zone 1) | Kementerian PUPR | 28/09/2020  s/d 28/09/2027 | 418,84 | Jepang (JICA) |
| 33 | **IP-582 -** Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities (Phase 2) | Kementerian PUPR | 31/03/2020  s/d 31/12/2023 | 50,58 | Jepang (JICA) |
| 34 | **IP-532 -** Asahan Hydroelectric Power Plant | PT. PLN | 26/06/2008  s/d 31/12/2022 | 191,57 | Jepang (JICA) |
| 35 | **IP-560 -** Tulehu Geothermal Power Plant Project (E/S) | PT. PLN | 23/10/2013  s/d 23/10/2022 | 35,37 | Jepang (JICA) |
| 36 | **IP-561 -** Indramayu Coal Fired | PT PLN | 23/10/2013 | 11,96 | Jepang |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Proyek** | **Instansi** | **Masa Laku** | **Nilai Pinjaman (Juta**  **USD)** | **Sumber Pendanaan** |
|  | Power Plant Project (E/S) |  | s/d 23/10/2022 |  | (JICA) |
| 37 | **IP-572 -** Hululais Geothermal Power Plant Poject (E/S) | PT. PLN | 14/10/2016  s/d 14/10/2025 | 4,55 | Jepang (JICA) |
| 38 | **IP-576 -** Development of World Class University with Socio Entrepreneurial Spirit at Universitas Gajah Mada | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekonologi | 13/03/2018  s/d 13/03/2025 | 57,58 | Jepang (JICA) |
| 39 | **IP-563 -** Jabodetabek railways Capacity Enhancement - Phase I | Kementerian Perhubungan | 23/06/2014  s/d 23/06/2026 | 113,10 | Jepang (JICA) |
| 40 | **IP-569 -** Engineering Services for Jakarta MRT East - West Line Project (Phase I) | Kementerian Perhubungan | 31/03/2016  s/d 31/12/2024 | 13,30 | Jepang (JICA) |
| 41 | **IP-577 -** Patimban Port Development Project (I) | Kementerian Perhubungan | 13/03/2018  s/d 13/03/2026 | 824,10 | Jepang (JICA) |
| 42 | **IP-568 -** Professional Human Resources Development IV | Kementerian PPN/  Bappenas | 23/06/2014  s/d 23/06/2023 | 49,03 | Jepang (JICA) |
| 43 | **IP-571 -** Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Phase I (Stage II) | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 31/03/2016  s/d 31/03/2022 | 711,65 | Jepang (JICA) |
| 44 | **IP-578 -** Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project (Phase 2) (I) | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 24/04/2019  s/d 23/04/2025 | 485,29 | Jepang (JICA) |
| 45 | **IP-557 -** Lumut Balai Geothermal Power Plant Project | PT. Pertamina | 25/10/2011  s/d 25/10/2023 | 186,89 | Jepang (JICA) |

Terdapat pemantauan dan evaluasi dilakukan pula pada proyek-proyek *on going* yang dibiayai melalui Kredit Ekspor (KE) dan Kredit Swasta Asing (KSA) di tahun 2022 yang terdiri dari pengadaan alat utama di Kepolisian Indonesia dan Kementerian Pertahanan. Berikut ini merupakan rincian kegiatan yang dibiayai melalui LPKE/KSA.

1. Pengadaan alat utama khusus Kepolisian Republik Indonesia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sumber Pinjaman** | **Tahun Alokasi** | **Jumlah Alokasi (Juta USD)** | **Total Komitmen Pinjaman (Juta USD)** |
| 1 | LPKE/KSA | 2011 | 7,0 | 5,9 |
| 2 | LPKE/KSA | 2016 | 315,9 | 268,6 |
| 3 | LPKE/KSA | 2019 | 399,8 | 339,8 |
|  | **Total** | | **722,7** | **614,3** |

1. Pengadaan alat utama sistem persenjataan Kementerian Pertahanan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Unit Organisasi** | **Jumlah Alokasi (juta USD)** | **Total Komitmen Pinjaman (juta USD)** |
| 1 | Mabes TNI | 64,0 | 54,3 |
| 2 | TNI AD | 604,4 | 504,9 |
| 3 | TNI AL | 1.208,6 | 966,2 |
| 4 | TNI AU | 2.581,5 | 2.028,9 |
|  | **Total** | **4.458,5** | **3.554,3** |

Selain itu, Direktorat Pendanaan Bilateral juga secara langsung melakukan pemantauan terhadap program yang langsung berada pada koordinasi Direktorat, yaitu *Field Support Services Project* yang dibiayai dari hibah Kanada dan Kegiatan Program Compact-2 yang memasuki tahapan akhir penyiapan program. Secara umum, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam penyiapan kegiatan/proyek di dalam program Compact-2 saat ini sudah berjalan dengan baik dan lancar, hal ini dibuktikan dengan telah tercapainya target-target rencana kegiatan Tahun 2022. Tim Persiapan dan Pengembangan Program Compact-2 juga secara rutin menyampaikan laporan perkembangan kegiatan yang dapat digunakan sebagai metode untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Proses pemantauan dan evaluasi kegiatan Field Support Services Project (FSS Project) dilakukan melalui Progress Report yang disampaikan kepada pihak Bappenas secara berkala serta rapat-rapat koordinasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Tim FSS Project juga menyampaikan data-data perkembangan disbursement setiap triwulan serta laporan atas pelaksanaan kegiatan.

Secara rutin Direktorat Pendanaan Bilateral juga menyampaikan Laporan Perkembangan Kegiatan – Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LPK-PHLN) setiap triwulanan yang disampaikan kepada Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana. Hal ini dilakukan sebagai pengejawantahan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2012 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah.

#### Indikator Kinerja 7

##### % ketersediaan hasil analisis terhadap pemantauan lapangan dan evaluasi proyek- proyek pendanaan bilateral dan kredit ekspor

Sepanjang tahun 2022, Direktorat Pendanaan Bilateral telah melakukan 8 (delapan) kali pemantauan lapangan, di antaranya 5 (lima) proyek di pulau Jawa, 1 (satu) proyek di pulau Sumatera dan 2 (dua) proyek di pulau Sulawesi sesuai tabel 3.10 di bawah. Dari 8 (delapan) kali kunjungan lapangan tersebut, tersedia 8 (delapan) laporan kunjungan lapangan yang memuat hasil analisis dan rekomendasi untuk masing-masing proyek yang dikunjungi sehingga terdapat 100 % ketersediaan hasil analisis terhadap pemantauan lapangan dan evaluasi proyek- proyek pendanaan bilateral.

**Tabel 3. 10 Summary Pemantauan Lapangan 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Proyek** | **Tempat dan Tanggal**  **Pemantauan** | **Ringkasan Temuan** |
|  | Construction of Karian |  | **Karian Multipurpose Dam**   * Terdapat sejumlah bidang lahan yang belum dibebaskan, PPK lahan telah melakukan percepatan pembebasan situs makam, tempat ibadah, lahan BUMN dan lahan sekolah dengan proses inventarisasi dan relokasi eksisting.   **Additional Loan Karian Dam**   * Pengajuan formal request untuk additional loan karian dam terhambat proses penyusunan Framework Arrangement 2022-2026. Penandatanganan FA 2022-26 akan dipercepat sebelum berakhirnya masa efektif INA-19   **Karian Dam – Serpong Water Conveyance System**   * Terdapat perubahan rute pada STA 36 sampai dengan STA 53 karena ada penolakan dari warga Bumi Serpong Damai (BSD). Hal ini mengakibatkan penambahan panjang pipa hingga STA 57 dengan titik akhir yang sama, yaitu WTP Villa Mutiara. Diusulkan agar pembangunan Karian Dam – Serpong Water Conveyance System dibagi menjadi 3 seksi:   Seksi 1: Karian Dam hingga ± STA 15 Seksi 2: ± STA 15 hingga ± STA 36 (Ciarab)  Seksi 3: ± STA 36 (Ciarab) hingga WTP Villa Mutiara |
| 1 | Multipurpose Dam Project | Lebak, Banten, 21 |
|  | (INA-19) | Juli 2022 |
|  | Additional Loan Karian |  |
|  | Dam |  |
|  | Karian Dam – Serpong |  |
|  | Water Conveyance System |  |
| 2 | Development of Semarang – Demak Toll Road Project Integrated with Sea Dike | Semarang, 25 – 26  Juli 2022 | * Proses pembebasan lahan untuk tanah musnah, setelah diterimanya gugatan uji materiil terhadap Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah, khususnya Pasal 15 (1), oleh Mahkamah Agung. Diperlukan eskalasi isu pada level Eselon I, dan/atau Menteri terkait, untuk dapat mempercepat penetapan mekanisme pembebasan lahan yang terindikasi tanah musnah berdasarkan aturan yang berlaku sehingga pembayaran dapat segera dilakukan, dan proses pembebasan lahan dapat dimulai untuk pekerjaan konstruksi yang ditargetkan pada Bulan September 2022 * Mekanisme pembayaran kepada kontraktor lokal agar tidak terjadinya keterlambatan penerimaan pembayaran seperti kasus pada proyek-proyek sebelumnya, termasuk untuk pembayaran uang   muka sebesar 10% dari nilai kontrak yang telah mencakup proporsi loan 85%. Mekanisme |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Proyek** | **Tempat dan**  **Tanggal Pemantauan** | **Ringkasan Temuan** |
|  |  |  | pembayaran kontraktor agar dapat diatur dalam Loan Agreement, sehingga perlu mengkomunikasikan hal ini dengan Kementerian Keuangan, sebagai focal point, untuk menyesuaikan pasal-pasal yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran kontraktor sebelum dimulainya tahap loan negotiation.   * kendala teknis terhadap desain tanggul laut dikarenakan daya dukung tanah yang rendah. Sehingga dilakukannya inovasi desain tanggul laut dengan menggunakan kombinasi cerucuk dan matras bambu serta, menggunakan metode PVD. Desain ini telah dilakukan pada trial embankment untuk memvalidasi nilai parameter desain dengan kondisi riil.Trial embankment saat ini ditargetkan   selesai pada Januari 2023. |
| 3 | Patimban Port Development Project (I) (IP-577) Patimban Port Development Project (II) (IP-583) | Patimban, Subang, Jawa Barat, 4  November 2022 | **Patimban Port (I)**   * Terminal peti kemas di Pelabuhan Patimban belum terutilisasi dengan baik dan dinilai belum bisa menarik investasi badan usaha. Sementara, Kementerian Perhubungan berencana untuk mendanai Terminal Peti Kemas (III) dengan skema KPBU. Diperlukan adanya dorongan bisnis hulu ke hilir yang dapat meningkatkan utilitas terminal peti kemas di Pelabuhan Patimban, sehingga dapat menarik investasi badan usaha. Salah satu usulan adalah mengubah terminal peti kemas menjadi terminal multipurpose.   **Patimban Port (II)**   * Terjadi perbedaan antara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang diajukan oleh penyedia jasa. Setelah dilakukan negosiasi, harga untuk paket 5 dan 6 disepakati sebesar JPY 73.666.222.575, sementara nilai total pinjaman untuk IP-583 hanya sebesar JPY 70.195.000.000. kekurangan jumlah pinjaman tersebut menyebabkan kebutuhan pendanaan tambahan untuk pelaksanaan paket 5 pinjaman IP-583. Bappenas telah memberikan pertimbangan dan rekomendasi tertulis terkait penggunaan IP-577 untuk membiayai paket 5 IP-583. Kebutuhan pendanaan untuk paket 5 IP-583 akan dipenuhi melalui sisa alokasi pinjaman kegiatan civil works   IP-577. |
| 4 | Development of Maritime Vocational Training Center  - Medan  (237575) | Medan, Sumatera Utara. 15-17  November 2022 | **Pelaksanaan dan perkembangan proyek**   * Proyek Development of Maritime Vocational Training Center - Medan dilaksanakan di area Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan. Dalam kerja sama dengan Austria,   dilakukan pengembangan dan pembangunan gedung untuk Kejuruan Pariwisata dan Kejuruan |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Proyek** | **Tempat dan**  **Tanggal Pemantauan** | **Ringkasan Temuan** |
|  |  |  | *Joinery*. Adapun di BBPVP Medan turut terdapat kejuruan lainnya seperti kejuruan salon, ilmu ukur (*surveyor*), barista dan lainnya.   * Pelaksanaan komponen pekerjaan telah diselesaikan sepenuhnya dan saat ini proses pelatihan kejuruan pariwisata dan *joinery* di BBPVP Medan telah berlangsung.   **Hal-hal yang perlu diperhatikan**   * Austria memberikan sistem pembelajaran serta pengadministrasian secara digital, yaitu Sitos (untuk pembelajaran daring/e-learning) dan Socrates (administrasi database). Pengadministrasian secara digital ini turut mencakup pelacakan (*tracing*) terhadap lulusan dari pelatihan. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan turut mengeluarkan sistem untuk kedua hal melalui Sisnaker. Saat ini terdapat kendala dalam mengintegrasikan sistem dari Austria ke sistem Sisnaker sehingga untuk saat ini BBPVP Medan masih menggunakan kedua sistem tersebut secara paralel. * Bagian dari materi pengajaran adalah pelaksanaan magang (*internships*) di industri seputar provinsi Sumatera Utara yang menjadi mitra BBPVP Medan dengan sistem on-off magang di perusahaan selama beberapa waktu untuk materi pembelajaran dikelas dan sesudahnya kembali melanjutkan magang. Kendalanya pihak industri cenderung kurang mendukung peserta magang untuk menerapkan kurikulum pembelajaran on-off dan lebih menyukai program magang tanpa jeda (off) * BBPVP Medan tidak menjadi BLU, sehingga hasil karya dari pelatihan yang diadakan tidak dapat diperjualbelikan sehingga konsep Teaching Factory tidak bisa diterapkan. * BBPVP diharapkan perlu membuat *life cycle cost* (LCC) *analysis* untuk peralatan yang menjadi aset BBPVP. Dalam dokumen tersebut perlu didetailkan mengenai rencana perawatan, penyediaan suku cadang dan juga depresiasi dan re-investasi kembali. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlanjutan dan kelancaran pelaksanaan pelatihan di BBPVP Medan.   **Optimalisasi pemanfaatan hasil proyek**   * Direktorat Pendanaan Bilateral menyarankan agar metode pembelajaran *e-learning* turut dilengkapi dengan video-video pembelajaran, baik video pembelajaran di kelas ataupun video penjelasan mengenai modul. Dengan demikian, siswa di waktu luar pembelajaran dapat kembali mengakses materi pembelajaran dalam bentuk video. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Proyek** | **Tempat dan**  **Tanggal Pemantauan** | **Ringkasan Temuan** |
|  |  |  | * Publikasi terkait kegiatan pelatihan saat ini adalah melalui media sosial. Ke depannya, pihak manajemen BBPVP Medan tengah mengembangkan berbagai skema untuk menarik lebih banyak peserta pelatihan serta penyiapan aspek pasca pelatihan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan membuat suatu forum komunikasi, dimulai dari yang paling sederhana yaitu grup WhatsApp (WA) yang berisikan kepala daerah, karang taruna, serta asosiasi kepemudaan sebagai sarana untuk pemberian informasi pelatihan. * BBPVP Medan telah bekerja sama dengan 13 pemerintah daerah di wilayah Sumatera Utara dalam suatu bentuk MoU kerjasama yang ditandatangani oleh kepala daerah (walikota/bupati/camat) untuk memberikan kuota pelatihan serta tanggung jawab pemberian penempatan untuk kerja sebagai timbal balik dari pemerintah daerah yang bekerja sama. Selain MoU, kerjasama turut tertuang dalam bentuk rencana aksi termasuk dengan pasca pelatihan sehingga perencanaan tenaga kerja dapat lebih optimal. * Selain dengan pemerintah daerah, BBPVP Medan turut menyampaikan bahwa pihak industri di Sumatera Utara saat ini semakin aktif untuk dapat terlibat dalam hal pemberian peserta pelatihan serta penyediaan lapangan kerja pasca pelatihan. Hal ini turut perlu dijaga dan dikembangkan. * Turut terdapat skema kerjasama dengan BBPVP lainnya terkait dengan kurikulum yang tidak   tersedia di BBPVP Medan. |
| 5 | ERiC I – TPA Sidoarjo dan TPA Malang  (2010 66 471) | Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang, Jawa Timur, 23-26  November 2022 | **Pelaksanaan dan perkembangan Proyek**   * Kegiatan ini berlokasi di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Sidoarjo. Kunjungan lapangan dilakukan di TPA yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo (TPA Griyo Mulyo) dan di Kota Malang (TPA Supit Urang). * Kegiatan yang dilaksanakan adalah upaya optimalisasi/pembangunan dan pengadaan alat pengolahan sampah serta bangunan pendukung lainnya dalam hal pengelolaan sampah. * Kedua lokasi TPA yang dilakukan kunjungan lapangan dilengkapi dengan sistem sanitary landfill yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat air limbah yang dihasilkan dari timbulan sampah. Air hasil olahan diharapkan sudah sesuai baku mutu layak dari standar Jerman sehingga dapat dialirkan ke badan air penerima. Turut terdapat area pengolahan sampah menjadi pupuk   kompos (composing plant) yang hasilnya dapat diberdayakan untuk masyarakat. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Proyek** | **Tempat dan**  **Tanggal Pemantauan** | **Ringkasan Temuan** |
|  |  |  | * Dari aspek kemajuan pelaksanaan, kedua TPA yang menjadi lokasi tinjauan sudah terlaksana 100% baik untuk kegiatan fisik serta dengan keuangannya.   **Hal-hal yang perlu diperhatikan**   * Biaya operasi (Operational Expenditure / Opex) di kedua TPA meningkat setidaknya hampir 2 (dua) kali lipat setelah dilaksanakan kegiatan ERiC. Untuk di TPA Griyo Mulyo biaya Opex mencapai 19 Miliar Rupiah per tahun sedangkan APBD hanya mampu membiayai setengahnya. Adapun untuk TPA Supit Urang biaya Opex mencapai 14,7 Miliar Rupiah per tahun. * Operasional pengelolaan sampah di kedua TPA termasuk dengan susunan lapisan new landfill, baku mutu lindi dan pemilahan serta pengomposan dilakukan dengan mengacu kepada standar mutu Jerman, salah satunya pemisahan sampah organik dan non organik sejak dari hulu. Dalam pelaksanaannya terdapat kesulitan dalam mencapai standar baku mutu ideal tersebut akibat perbedaan sistem pengelolaan sampah di hulu dimana sebagian besar sampah rumah tangga yang dikirim ke TPA tercampur antara sampah organik dan non organik. Hal ini menyebabkan pekerjaan memilah sampah menjadi lebih berat baik bagi mesin-mesin maupun tenaga kerja pemilah sampah * Terdapat kendala dalam perawatan mesin dikarenakan suku cadang mesin (spare parts) perlu dipesan dari luar negeri dan umumnya membutuhkan waktu cukup lama serta biaya tambahan. * Residu dari pengelolaan sampah yang terbuang ke landfill masih mencapai 90% dikarenakan pemilahan dan komposting hanya berdasarkan asal sampahnya sehingga untuk sampah organik masih banyak yang terbuang menjadi residu. Lebih lanjut lagi, pemilahan masih memanfaatkan tenaga manusia sehingga masih terdapat faktor error terdapat sampah-sampah yang tidak terpilah seluruhnya. Sebagai informasi, jumlah SDM pemilah di TPA Griyo Mulyo terdapat sebanyak 14 orang dan untuk di TPA Supit Urang sebanyak 12 orang. SDM pemilah ini merupakan pemulung sekitar sebelum kegiatan ERiC dilaksanakan. * Secara umum, kedepannya untuk kedua TPA dan juga untuk dua TPA lainnya yang menjadi bagian program dari ERiC perlu memperhatikan alokasi pembiayaan pemda, diharapkan operasional tetap dapat berjalan optimal setidaknya sampai masa pengembalian pinjaman luar negeri selesai.   **Optimalisasi pemanfaatan hasil proyek**  TPA Griyo Mulyo (Kab. Sidoarjo) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Proyek** | **Tempat dan**  **Tanggal Pemantauan** | **Ringkasan Temuan** |
|  |  |  | * Terdapat rencana pemanfaatan limbah menjadi energi memanfaatkan *Refuse Derived Fuel* (RDF). Dalam kunjungan lapangan diinformasikan bahwa sudah ada pembahasan terkait penjualan RDF ke PT. PLN, namun proses tersebut mengalami kendala akibat belum selesainya regulasi payung berupa Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur. Lebih lanjut lagi, belum ada tipping fee untuk pengelola RDF nantinya. Konsep business model pemanfaatan RDF masih belum resmi untuk pengelola RDF serta masih menunggu hasil diskusi dengan PT. PLN terkait penjualan RDF. Untuk pembiayaan direncanakan berasal dari APBD. * Hasil pilahan belum dapat dijual karena status TPA masih dalam proses menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hasil komposting sementara disalurkan kepada Dinas Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat umum dengan cara mengajukan surat. * Ada perencanaan retribusi sampah dengan harga sekitar Rp. 35.000,00 untuk perkilogramnya. * Terdapat rencana pemanfaatan TPA Griyo Mulyo untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga mampu menghasilkan revenue yang dapat dimanfaatkan untuk biaya Opex. * Terdapat pula rencana kerjasama dengan perusahaan-perusahaan agar sampah yang ada dapat dikelola di TPA Griyo Mulyo   TPA Supit Urang (Kota Malang)   * Terdapat rencana kerja sama terkait pemanfaatan gas metan untuk warga sekitar dengan sumber dana dari APBD Pemerintah Kota Malang. Diproyeksikan gas metan dapat dibagikan kepada 100 Kartu Keluarga (KK) secara gratis menggunakan pihak ketiga. Gas metan akan berasal dari landfill dan composting yang dialirkan menggunakan pipa. * Terdapat rencana pemanfaatan RDF seperti di TPA Griyo Mulyo akan tetapi masih dalam pembahasan potensi penerapan serta penyusunan regulasi payung di tingkat daerah (Peraturan Daerah / Perda). * Akan dikembangkan skema agar TPA Supit Urang dapat menjadi BLUD sehingga mampu   menghasilkan *revenue* yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional |
| 6 | Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL) | Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah 28 – 30 November  2022 | * Risiko terhadap bencana pada saat masa konstruksi perlu diperhitungkan dalam analisis oleh Kementerian PUPR sehingga risiko tersebut dapat diantisipasi. . Risiko bencana alam di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala sangat besar sehingga diperlukan langkah-   langkah/ antisipasi dalam mitigasi bencana dalam bentuk perencanaan wilayah tersebut. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Proyek** | **Tempat dan**  **Tanggal Pemantauan** | **Ringkasan Temuan** |
|  | The Programme for The Reconstruction of Palu 4 Bridges in Central Sulawesi Province |  | * Peningkatan sinergi antara Bappenas, Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lain dalam hal penanganan bencana, perencanaan wilayah tangguh bencana, pemulihan infrastruktur Kota Palu. * Pembayaran kepada kontraktor memerlukan waktu lama dari masa pengajuan pembayaran sehingga sangat berdampak pada cash flow kontraktor dan menurunnya performa pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Hal ini perlu diakomodir dengan peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pihak JICA. * Setelah masa pemeliharaan selesai dapat dilakukan serah terima kepada Pemerintah Daerah untuk dicatatkan sebagai aset Pemerintah Daerah. * Jika beberapa lingkup kegiatan Jembatan Palu 4 yang sekarang dapat dikerjakan melalui paket A2 dengan lebih cepat maka sisa anggaran dapat diusulkan untuk pemanfaatan ke arah memperindah Jembatan Palu 4 untuk ikon Kota Palu. * Selain pekerjaan Bina Marga, terdapat pekerjaan Sumber Daya Air dan Cipta Karya yang didanai oleh Loan IP-580. Beberapa pekerjaan di bawah Sumber Daya Air masih dalam proses lelang, hal ini dapat menjadi perhatian bersama bahwa ketercapaian kegiatan Loan IP-580 IRSL dapat terjadi ketika output/sasaran pada seluruh kegiatan tercapai sehingga dibutuhkan koordinasi dari ketiga implementing agency tersebut dalam pembagian kerja, manajemen   waktu, dan pemanfaatan dana agar berjalan secara efisien. |
| 7 | Hasanuddin University Hospital Development Project (Ln-28458) | Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, 28-30  November 2022 | **Pelaksanaan dan perkembangan proyek**   * Proyek Development of Teaching Hospital Hasanuddin University telah dilaksanakan di bawah tanggung jawab Kemendikbudristek. Saat ini proyek sedang dalam persiapan menuju closing, tetapi terkendala oleh beberapa hal. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah penyelesaian komponen pekerjaan dan kelengkapan dokumen serta penyelesaian permasalahan dengan konsultan sehingga closing dapat selesai paling lambat pada 31 Desember 2022. * Masa berlaku loan ini sampai dengan 31 Desember 2022, akan tetapi terdapat beberapa kendala teknis seperti antara lain kelengkapan dokumentasi sebagai bukti syarat pembayaran. Hal ini mengakibatkan progres fisik pekerjaan konstruksi hingga awal bulan November Realisasi 99,93% dan realisasi penyerapan anggaran terhadap PAGU adalah sebesar 49% dengan target pencapaian   bulan Desember akan mencapai sebesar 100%. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Proyek** | **Tempat dan**  **Tanggal Pemantauan** | **Ringkasan Temuan** |
|  |  |  | **Hal-hal yang perlu diperhatikan**   * Terkait dengan *output* proyek, Gedung BCD output proyek telah selesai dilaksanakan akan tetapi terdapat ruangan di gedung BCD tepatnya di ruang lantai dasar bagian lobby yang tidak menjadi bagian lingkup pekerjaan loan yang masih belum direnovasi. * PIU sudah bisa mulai merencanakan penyelesaian proyek hingga 31 Desember 2022 termasuk rencana mitigasi, seperti contoh apabila commissioning test tidak bisa dilakukan. Usulan apapun terkait proyek bisa direncanakan lebih awal sebelum loan closing, termasuk apabila terdapat kegiatan setelah loan closing sudah perlu direncanakan untuk sumber pendanaannya. * Apabila testing dan commissioning tidak bisa dilaksanakan, mitigasi risiko dilakukan dengan mekanisme bank guarantee. Perlu dibedakan taking over certificate dengan financial closure. Pihak konsultan pun perlu turut terinformasi akan hal ini.   **Optimalisasi pemanfaatan hasil proyek**   * Diharapkan Unhas dapat melakukan renovasi ruangan Gedung BCD dari anggaran Unhas. Renovasi tersebut diperlukan agar gedung BCD dapat ter-deliver agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Desain yang dibuat oleh konsultan menurut hemat kami tidak sesuai dengan standar rumah sakit sebagai contoh hand-railing yang dibuat dari kayu dengan model bulat dan tidak rapi sehingga terkesan murah. * Perlu adanya rencana penyelesaian administrasi dengan pihak konsultan. Awalnya konsultan terkontrak sampai 31 Oktober 2022 akan tetapi dikarenakan keterlambatan pelaksanaan progres fisik maka konsultan perlu diperpanjang. Setiap komponen dalam proyek ini saling terkait satu sama lain sehingga apabila terjadi keterlambatan kegiatan fisik maka akan berdampak pada perpanjangan konsultan supervisi. Penyelesaian administrasi antara PIU Unhas dengan pihak konsultan tersebut diharapkan dapat dimulai dari sekarang untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek. * Menurut hemat kami, pelaksanaan proyek pengembangan rumah sakit Unhas memiliki kendala dalam koordinasi dan komunikasi antara pihak PIU dengan pihak konsultan dan penyedia. Kedepannya untuk proyek pinjaman luar negeri perlu dipastikan manajemen pelaksanaan proyek   termasuk mekanisme komunikasi dan koordinasi. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Proyek** | **Tempat dan**  **Tanggal Pemantauan** | **Ringkasan Temuan** |
|  |  |  | * Ada pesan khusus dari sektor (Kementerian Kesehatan) bahwa diharapkan pengembangan Rumah Sakit Daerah dapat segera diselesaikan sehingga penanganan di rumah sakit dapat menjadi lebih cepat serta rumah sakit mampu memiliki kapasitas dan kemampuan dalam mengatasi kasus-kasus darurat berhubungan dengan nyawa, termasuk penanganan ibu hamil untuk mengurangi risiko   kecacatan dan stunting. |
| 8 | Development of World Class University with Socio-Entrepreneurial Spirit at Universitas Gadjah Mada (IP-576) | Yogyakarta, 23  Desember 2022 | * Secara umum, progres untuk pembangunan gedung telah mencapai 100% dan seluruh gedung tersebut telah mulai beroperasional. Pihak PIU UGM menyampaikan bahwa setelah Provisional Hand Over (PHO), gedung dapat langsung dimanfaatkan untuk kegiatan mahasiswa. Pihak Project Implementing Unit (PIU) UGM optimis bahwa nilai Economic Internal Rate of Return (EIRR) serta Benefit Cost Ratio yang semula direncanakan pada tahap awal perencanaan proyek dapat tercapai. * Terdapat beberapa penyesuaian spesifikasi alat untuk paket 5 dan paket 9. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh PIU dan proyek ditargetkan selesai pada Bulan Agustus 2023. Hal ini telah sesuai dengan rencana awal kegiatan yaitu durasi pembangunan selama 8 tahun dan proyek masih berada dalam kurun waktu penarikan pinjaman yaitu sampai dengan Maret 2025, sehingga   tidak terdapat potensi delay untuk kegiatan ini. |

#### Indikator Kinerja 8

##### % rekomendasi pengendalian dan pelancaran rencana kegiatan pendanaan bilateral yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait

Selama tahun 2022, terdapat 20 (dua puluh) kegiatan yang memerlukan tindak lanjut pengendalian dan pelancaran yang dibiayai pendanaan bilateral dan terdapat 19(sembilan belas) rekomendasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendanaan Bilateral yang terdiri dari, 6(enam) rekomendasi perpanjangan masa berlaku pinjaman, 7(tujuh) rekomendasi realokasi dana kategori pinjaman, 2(dua) rekomendasi perpanjangan masa berlaku hibah, dan 4(empat) rekomendasi terkait amandemen hibah. Dari 19(sembilan belas) rekomendasi tersebut, seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga pelaksana kegiatan, dan 1(satu) kegiatan yang masih memerlukan rekomendasi Bappenas yaitu, usulan realokasi dana Loan JICA IP-578, yang saat ini masih dalam proses penyiapan internal Bappenas, sebagaimana tercantum pada tabel 3.11 di bawah.

Sehingga persentase rekomendasi pengendalian dan pelancaran rencana kegiatan pendanaan bilateral yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga yaitu, sebesar 95% atau telah mencapai target.

#### Tabel 3. 11 Rekomedasi Pengendalian dan Pelancaran Kegiatan Pendanaan Bilateral

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Proyek** | **Rekomendasi Bappenas** | **Tindak Lanjut K/L Terkait** |
| **A.** | **Rekomendasi Perpanjangan Masa Laku Pinjaman Luar Negeri** | | |
| 1. | **IP-568**  Professional Human Resource Development IV (PHRD-IV) | Perpanjangan masa berlaku pinjaman sampai dengan Juni 2026 untuk mengoptimalkan dana pinjaman bagi pembiayaan beasiswa Pendidikan pascasarjana bergelar dan non gelar di luar negeri. | Telah dilaksanakan amandemen Loan Agreement sehingga dana pada pinjaman dapat digunakan sampai dengan waktu yang direkomendasikan.  Bappenas, selaku *Executing Agency*, mengoptimalkan dana kegiatan dengan menambah output kegiatan berupa penambahan total 66 peserta program non-gelar, dan 280 peserta bergelar sampai dengan Juni 2026. |
| 2. | **IP-532** Asahan No. | Perpanjangan masa | Usulan Perpanjangan masa laku |
|  | 3 Hydroelectric | berlaku pinjaman | pinjaman kegiatan akan diusulkan |
|  | Power Plant | direkomendasikan setelah | oleh PT.PLN setelah diketahuinya |
|  | Construction | kuartal II Tahun 2022 untuk | ketercapaian progress proyek |
|  | Project | memperoleh gambaran | pada kuartal II tahun 2022. Hal ini |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kemajuan terkini proyek. | telah ditindaklanjuti oleh PT.PLN melalui surat usulan di bawah. |
| 3. | Perpanjangan masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 untuk memastikan keberlanjutan pembangunan PLTA Asahan No. 3 dan penyesuaian dengan rencana pembiayaan pinjaman baru Additional Loan PLTA Asahan No.3 | Telah dilaksanakan amandemen Loan Agreement (LA) JICA No. IP-  532 dengan perpanjangan masa berlaku pinjaman hingga 31 Desember 2023 dan PT.PLN melanjutkan progress kegiatan pembangunan PLTA Asahan No. 3 khususnya untuk pembangunan transmisi. |
| 4. | **INA-20** The  Development of Sewerage System in Batam Island | Perpanjangan masa berlaku selama 2(dua) tahun sehingga pinjaman berakhir pada 30 Juni 2024 menimbang progress ketercapaian proyek 90,8%  yang membutuhkan 19 (sembilan belas) bulan waktu penyelesaian dan *first repayment* pada 20 Oktober 2024. | Usulan perpanjangan masa berlaku pinjaman telah diterima oleh lender (EDCF KEXIM) dan BP Batam telah melanjutkan progress proyek dengan addendum kontrak dan progress konstruksi yang telah dimulai kembali pada bulan Januari 2023. |
| 5. | **INA-19**  Construction of Karian Multipurpose Dam Project | Perpanjangan waktu *Project Completion Date* (PCD) hingga 10 Maret 2023 dan *Final Disbursement Date* (FDD) hingga dengan 14 Maret 2023 untuk pemrosesan pencairan dana dan administrasi kontrak  sehingga adanya  keberlanjutan kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman baru dengan target penandatanganan LA tersebut pada Desember 2022. | Perpanjangan waktu PCD dan FDD telah diterima oleh lender (KEXIM EDCF) dan Kementerian PUPR telah melanjutkan proses pembayaran konsultan dan proses addendum kontrak. |
| 6. | **Ln-28458**  Development of Teaching Hospital Hasanuddin University | Perpanjangan masa berlaku loan hingga 15 Mei 2023 dalam rangka penyelesaian administrasi proyek. | Telah berlaku Amandemen II Separate Agreement sebagaimana No Objection Letter (NOL) KfW pada tanggal 12 Agustus 2022. Bersamaan dengan penawaran perpanjangan masa laku pinjaman selama 6 bulan (loan closing date 15 November 2022 menjadi 15 Mei 2023) dari KfW tanpa adanya |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | penambahan biaya apapun kepada Pemerintah Indonesia. |
| **B.** | **Rekomendasi Realokasi Dana Pinjaman Luar Negeri** | | |
| 7. | **IP-568**  Professional Human Resource Development IV (PHRD-IV) | Realokasi dana ditujukan untuk mengakomodasi permintaan yang tinggi akan perencana yang berkualitas dengan  mengalihkan dana kontijensi sebesar JPY 292 juta ke kategori (A) Program Studi Luar Negeri. | Telah dilaksanakan amandemen Loan Agreement sehingga dana pada pinjaman dapat digunakan untuk menambah output kegiatan.  Bappenas, selaku *Executing Agency*, menambah output kegiatan berupa penambahan total 66 peserta program non-gelar, dan 280 peserta bergelar. |
| 8. | **INA-19**  Construction of Karian Multipurpose Dam Project | Realokasi dana untuk pekerjaan konsultan dan *civil works* dari kontijensi dan *Hydromechanical Works* sesuai dengan penambahan durasi jasa konsultan dari Mei hingga Desember 2022. | Kementerian Keuangan telah memproses amandemen LA terkait relokasi dana tersebut dan Kementerian PUPR mengoptimalkan pinjaman INA-19 untuk pembayaran jasa konsultan. |
| 9. | **IP-532** Asahan No.  3 Hydroelectric Power Plant Construction Project | Realokasi dana dari kontijensi untuk dapat mengoptimalkan dana yang tersedia pada pinjaman IP-  532 selaras menunggu berlakunya pinjaman baru. Relokasi dana kontijensi sebesar JPY 1.936 juta ke kategori (A) Civil Works and Equipment Works senilai JPY 18.844 juta dan kategori (B) senilai JPY 92 juta. | Kementerian Keuangan telah memproses amandemen LA terkait relokasi dana tersebut dan PT.PLN melanjutkan kegiatan konstruksi pembangunan PLTA Asahan No.3 dengan tambahan dana tersebut selagi menunggu berlakunya pinjaman baru untuk *Additonal Loan Asahan No.3.* |
| 10. | **IP-583** Patimban Port Development Project (II) | Realokasi dana untuk mengalihkan seluruh dana kontijensi pada IP-583 untuk kategori Civil Works untuk membiayai kontrak Paket 5 dapat dihargai oleh Bappenas dan pemrosesan kontrak dapat dilakukan secara paralel dengan amandemen loan agreement. | Kementerian Perhubungan melanjutkan proses kontrak Paket 5. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | **IP-567**  Countermeasure for Sediment in Wonogiri Multipurpose Dam Reservoir (II) | Realokasi dana sebesar JPY 262 juta untuk Kategori C Consulting Services dari kategori (B) Watershed Conservation dan (D) Contingencies untuk penyesuaian nilai kontrak jasa konsultan berupa pengawasan perkuatan *downstream overflow dike* sampai dengan Desember 2024 (masa berlaku pinjaman) dengan optimalisasi tenaga ahli dan telah berakhirnya pekerjaan Watershed Conservation. | Kementerian Keuangan telah menyampaikan amandemen realokasi Loan Agreement berdasarkan rekomendasi Bappenas dan realokasi tersebut telah berlaku efektif.  Kementerian PUPR memproses amandemen kontrak dan pembayaran jasa konsultan terkait pengawasan d*ownstream overflow dike*. |
| 12. | **IP-578**  Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Phase 2(II) | Bappenas telah memberikan beberapa masukkan terkait revisi Peraturan Menteri  Koordinator Bidang  Perekonomian Nomor 5/2021 yang mengatur pagu pinjaman pembangunan MRT Jakarta Utara-Selatan fase 1 dan fase 2. Hal ini berkaitan dengan usulan realokasi dana IP-578. | Kementerian Perhubungan telah melakukan permohonan revisi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5/2021. |
|  |  | Namun, terkait surat rekomendasi realokasi yang dimaksud, saat ini masih dalam proses internal Bappenas. |  |
| 13. | **INA-20** The  Development of Sewerage System in Batam Island | Realokasi dana dari porsi anggaran Rupiah Murni menjadi porsi PHLN dengan menggunakan dana  kontijensi perlu mempertimbangkan kebutuhan yang ada pada saat ini dan indikasi kebutuhan sebelumnya. Sehingga BP Batam perlu melakukan konfirmasi  mengenai kebutuhan- kebutuhan akan hal tersebut. | BP Batam telah menyelenggarakan rapat dengan Bapppenas dan Kementerian Keuangan terkait anggaran dan realokasi dana, dengan surat konfirmasi yang akan dikirimkan oleh BP Batam selanjutnya. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.. | **Ln-28458**  Development of Teaching Hospital Hasanuddin University | Realokasi dana untuk penambahan anggaran konstruksi untuk penyelesaian Gedung B, C, dan D RS Unhas sebesar EUR 564 ribu. | Telah disampaikan usulan penambahan anggaran konstruksi untuk penyelesaian Gedung B, C, dan D RS Unhas sebesar EUR 564.789,98 (ekivalen Rp8.429.701.220) akan dibiayai dari sisa anggaran komponen Equipment sebesar EUR 80.318,36, Telemedicine sebesar EUR 64.789,98, dan realokasi Contingency sebesar EUR 419.681,64. |
| **C.** | **Rekomendasi Perpanjangan Masa Laku Hibah Luar Negeri** | | |
| 15. | **PN27472**  Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem (BCCPGLE) | Perpanjangan hibah  dengan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diharapkan untuk melakukan percep*atan implementasi, menyusun exit strategy*, serta penyusunan dokumen penutupan proyek dan menyampaikan dokumen pendukung lainnya. | KLHK akan melaksanakan perpanjangan proyek pada tahun 2023 melalui:   * Pencapaian 4 (empat) indikator   *output* proyek.   * Penguatan *exit strategy* pasca proyek berakhir untuk memastikan keberlangsungan program. * Penguatan kelembagaan pengelola ekosistem Leuser. * Dukungan kegiatan pengelolaan ekosistem Leuser. |
| 16. | **201166255**  **Forest Program II:** Development of Biodiversity Conservation and Integrated Watershed Management | Perpanjangan masa laku hibah hingga 31 Desember 2023 dan periode  pengakhiran kegiatan hingga 31 Maret 2024 tanpa penambahan biaya (*no cost extension*) dapat diterima, dengan catatan bahwa pemangku kepentingan segera melaksanakan Annual Work Plan, KLHK melakukan percepatan implementasi kegiatan, *menyusun exit strategy*, serta menyampaikan dokumen pendukung lainnya. | Pelaksanaan kegiatan hibah dilanjutkan untuk mencapai indikator outcome yang belum tercapai, yaitu:   * Peningkatan permodalan peserta program melalui pemberian akses legal sumber daya hutan serta *argoforestry*. * Peningkatan kuantitas dan kualitas air pada *landscape* tertentu/terpilih di wilayah kerja program. |
| **D**. | **Rekomendasi Terkait Amandemen/Letter of Intent Hibah** | | |
| 17. | **Australia - Indonesia Partnership for Justice Phase 2** | Perpanjangan hibah selama 3(tiga) tahun dengan fokus kerja sama eksisting dan tambahan hibah sebesar | Kesepakatan perpanjangan telah dituangkan dalam Exchange of Letter (EoL). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **(AIPJ 2)** | AUD 8 juta (ekiv RP 82,5 juta). |  |
| 18. | **Bilateral Development Cooperation Framework - Amendment 3** | Penambahan alokasi hibah USAID Indonesia sebesar USD 116.390.688. | Telah dilaksanakan Amandemen BDCF. |
| 19. | **Kemitraan Indonesia - Australia untuk Infrastruktur (KIAT)** | Perubahan *Subsidiary Arrangement* Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT). | Telah dilaksanakan Amandemen  *Subsidiary Arrangement.* |
| 20. | **Polri- USDOJ/CITAP** | Tanggapan terkait *Letter of Intent between the Indonesian National Police and US Department of Justice on Law Enforcement Development Assistance*.  *Letter of Intent* untuk kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan kerja sama/hibah eksisting. | Tanggapan diterima oleh POLRI dan saat ini dalam proses penyusunan LoI. |

* + - 1. **Indikator Kinerja 9**

##### % rekomendasi hasil telaah/analisis pendanaan bilateral dan kredit ekspor yang diterima oleh Deputi

Indikator ini dipergunakan untuk mengukur persentase dari jumlah rekomendasi yang telah dihasilkan sebagaimana hasil telaah/analisis dari pelaksanaan proyek yang dibiayai melalui pendanaan bilateral dan kredit ekspor. Rekomendasi dapat dikatakan dimanfaatkan apabila hasilnya telah diterima oleh Deputi. Selama tahun 2022, terdapat 5 (lima) kegiatan tealaahan atau analisis yang dilakukan Direktorat Pendanaan Bilateral, yaitu:

* + - * 1. Kajian Pengembangan Model Delivery Inovatif sebagai bentuk Lesson Learned dari Proyek Hibah Luar Negeri
        2. Evaluasi Peran Usaha Nasional dalam Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Pinjaman Luar Negeri Bilateral
        3. Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri untuk Pembangunan dan Pengembangan Ibu Kota Negara ‘Nusantara’,
        4. Panduan Sederhana Pemilihan Skema Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri,
        5. Analisis Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam Proyek PHLN.

Dalam hal ini, 3 (tiga) kegiatan yang disebutkan terakhir bersifat *quick study*. Kelima kegiatan ini pada dasarnya dilakukan untuk mendukung pembuatan kebijakan Inovasi pembangunan.

#### 3.1.1.9 a. Kajian Pengembangan Model Delivery Inovatif sebagai bentuk Lesson Learned dari Proyek Hibah Luar Negeri.

Kajian ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Pemerintah Kanada. Dalam kajian ini, fokus telaah diarahkan pada identifikasi *delivery model* pembiayaan inovatif, salah satunya melalui *blended finance*, kesesuaian model delivery inovatif tersebut dengan peraturan perundangan dan sistem yang berjalan di Indonesia, serta menganalisis peluang replikasi dalam proyek dan kegiatan yang lebih luas dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Dari hasil analisis, disimpulkan bahwa dalam pengembangan model delivery yang inovatif, masih terdapat kekurangan dalam informasi serta promosi dan peningkatan inklusivitas terhadap *blended finance* pada proyek-proyek yang mendorong tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Meski masih terdapat kekurangan informasi dan promosi, beberapa proyek yang bertujuan untuk mencapai TPB sudah cukup besar, terutama yang melibatkan model delivery yang inovatif. Selain itu, sumber daya untuk mobilisasi dana melalui model delivery yang inovatif saat ini sudah tersedia dan dapat dimobilisasi, jika kesimpulan pada poin pertama sudah tercapai. Namun, untuk memobilisasi ini, perlu ada stimulus untuk ekspansi proyek-proyek potensial sehingga pemangku kepentingan lain dapat terlibat dan ikut serta.

#### 3.1.1.9 b. Evaluasi Peran Usaha Nasional dalam Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Pinjaman Luar Negeri Bilateral

Direktorat Pendanaan Bilateral juga melakukan Evaluasi mengenai Peran Usaha Nasional dalam Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Pinjaman Luar Negeri Bilateral. Telaah ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis realisasi peran usaha nasional dalam proyek infrastruktur yang dibiayai pinjaman luar negeri.
2. Menganalisis struktur kelembagaan, tata kelola, transfer teknologi dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur melalui pinjaman luar negeri yang melibatkan peran usaha nasional.
3. Menganalisis faktor-faktor penghambat dan tantangan dalam realisasi peran usaha nasional dalam pelaksanaan proyek-proyek pinjaman pada sektor infrastruktur serta mengetahui pembelajaran dari pelaksanaan proyek tersebut.
4. Menghasilkan rekomendasi tindak lanjut untuk peningkatan peran usaha nasional dalam pelaksanaan proyek-proyek pinjaman luar negeri khususnya di bidang infrastruktur.

Dari hasil evaluasi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran perusahaan nasional sudah berjalan dengan cukup baik dan ternyata jumlah perusahaan nasional yang terlibat dalam proyek infrastruktur yang dibiayai pinjaman luar negeri bilateral yang menjadi sampel kegiatan evaluasi ini lebih banyak dari perkiraan sebelumnya. Secara proporsi, perusahaan nasional mendapatkan *share* yang cukup adil dan berimbang sehingga suara perusahaan nasional juga memiliki pengaruh dalam pelaksanaan proyek. Hasil evaluasi ini memberikan 7 (tujuh) rekomendasi untuk mendorong peningkatan peran perusahaan nasional serta kualifikasi perusahaan sehingga dapat ikut serta dalam proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai pinjaman luar negeri. Selain itu, rekomendasi juga berfokus untuk mengidentifikasi serta berbagi informasi yang dapat meningkatkan keterlibatan perusahaan nasional ke depan.

#### 3.1.1.9 c. Penyusunan Quick Study lainnya

Selain dari telaah dalam bentuk kajian dan evaluasi, Direktorat Pendanaan Bilateral juga melakukan telaah lain yang bersifat quick study, diantaranya; (i) Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri untuk Pembangunan dan Pengembangan Ibu Kota Negara ‘Nusantara’, (ii) Panduan Sederhana Pemilihan Skema Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri, (iii) Analisis Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam Proyek PHLN.

Telaah-telaah ini masing-masing membahas mengenai peran pembiayaan dan pendanaan pembangunan dalam konteks dan kerangka spesifik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat. Dalam telaah Pemanfaatan Pinjaman untuk Pembangunan IKN, fokus lebih dibahas pada membedah peraturan perundangan yang berlaku mengenai pembiayaan pembangunan IKN. Studi juga secara cepat mengeksplorasi kemungkinan pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan untuk pembangunan dan pengembangan IKN. Identifikasi terhadap PHLN dan mitra pembangunan yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan membangun IKN juga menjadi salah satu fokus serta bahasan utama dalam studi ini.

Terkait telaah mengenai Panduan Sederhana Pemilihan Skema Pembiayaan PLN, fokus pada studi lebih kepada pemberian panduan bagi para K/L dalam menentukan skema pembiayaan paling ideal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta mendukung agenda pembangunan nasional. Studi memberikan pandangan dalam menentukan skema ideal bagi para executing agency dalam membiayai proyek-proyek pembangunan berdasarkan banyak faktor yang mungkin mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya panduan sederhana pemilihan skema pinjaman luar negeri ini, diharapkan efisiensi pelaksanaan pemanfaatan pinjaman luar negeri serta efektivitas pencapaian hasil kerja sama dengan mitra

pembangunan dapat terus ditingkatkan. Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Kementerian / Lembaga terkait dan mitra pembangunan turut diharapkan dapat menyusun strategi kerja sama, dokumen program dan pedoman pelaksanaan kegiatan yang menjadi acuan kerja lebih lanjut.

Sementara itu, dalam telaah mengenai Analisis Kebijakan TKDN dalam Proyek PHLN lebih berfokus pada bagaimana optimalisasi pemanfaatan produk-produk yang berasal dari dalam negeri pada proyek PHLN sehingga dapat mendukung kemandirian dalam produk-produk Indonesia, serta bagaimana memanfaatkan dana yang berasal dari PHLN untuk mendukung dan membeli produk-produk dalam negeri.

Sebagaimana dijelaskan di bagian awal, rumus IKU ini menyatakan bahwa rekomendasi dapat dikatakan dimanfaatkan apabila hasilnya telah diterima oleh Deputi. Selama tahun 2022, kelima hasil tealaahan ini telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan. Dengan demikian, target IKU persentase rekomendasi hasil telaah/analisis pendanaan bilateral dan kredit ekspor yang diterima oleh Deputi telah terealisasikan 100%.

#### Indikator Kinerja 10

##### % prakarsa pengembangan pendanaan bilateral dan kredit ekspor yang diterima dan didukung oleh stakeholders terkait

Indikator ini untuk mengukur usulan inovasi untuk skema pendanaan mitra pembangunan Bilateral dan/atau melalui kredit ekspor. Prakarsa pengembangan pendanaan bilateral mencakup pengembangan berbagai skema kerjasama pembangunan antara Pemerintah Indonesia dan para mitra pembangunan bilateral untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan sehingga dapat meringankan beban APBN. Sumber data analisis meliputi sejumlah dokumen antara lain:

1. Dokumen Laporan Prakarsa Pendanaan Bilateral dan Kredit Ekspor
2. RKP (Rencana Kerja Pemerintah)
3. MoU (*Memorandum of Understanding*) antara pemerintah Indonesia dengan mitra pembangunan
4. CPS (*Country Priority Strategy*)

Selama tahun 2022, Direktorat Pendanaan Bilateral telah menginisiasi 6 (enam) kesepakatan bilateral dengan mitra pembangunan. Proses penyusunan kesepakatan- kesepakatan tersebut telah melibatkan para pemangku kepentingan terkait. Keenam kesepakatan bilateral tersebut terdiri dari:

* 1. *Joint Communique Indonesia – Australia 2022*
  2. Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (AIPTIS)
  3. GIA antara USAID dan Bappenas 2.2
  4. *Grant Implementation Agreement* (GIA) antara USAID dan Bappenas
  5. *Minutes of Meeting (MoM) on Bilateral Meeting between Indonesia and Austria on Financial Cooperation*
  6. *Knowledge Partnership Platform ('KPP") Australia Indonesia*, atau "KONEKSI" (Kolaborasi Pengetahuan dan Inovasi Australia Indonesia)

Sesuai dengan penjelasan pada tabel 3.12 di bawah, keenam kesepakatan ini telah ditandatangani sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian IKU % capaian prakarsa pengembangan pendanaan bilateral yang diterima dan didukung oleh stakeholders terkait terpenuhi 100%.

**Tabel 3. 12 Penandatanganan Kesepakatan Bilateral Tahun 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kesepakatan** | **Mitra** | **Waktu dan Pihak Penandatangan** | **Keterangan** |
| 1 | *Joint Communique Indonesia – Australia 2022* | DFAT  Australia dan Kementerian PPN/Bappen as serta seluruh K/L *Executing Agency* program Kerja Sama Australia | 27 Januari 2022  **Pemerintah RI:**  Scenaider C.H. Siahaan,  *Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN / Bappenas*  **Pihak Australia:**  Duta Besar Ridwaan Jadwat,  *First Assistant Secretary, Southeast Asia Maritime Division, Department of Foreign Affairs and Trade Australia* | *Senior Official Meeting on Development Cooperation* (SOM) merupakan forum tertinggi Indonesia – Australia untuk merumuskan kerja sama pembangunan bilateral.  Dalam SOM tahun 2022 pihak Australia diketuai oleh Duta Besar Ridwaan Jadwat, First Assistant Secretary, Southeast Asia Maritime Division, Department of Foreign Affairs and Trade Australia, sedangkan pihak Indonesia, pimpinan SOM adalah Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas.  Beberapa hal yang dibahas dalam SOM adalah   1. *Covid-19 Response* dari Australia kepada Indonesia; 2. Strategi Re-Desain Transformasi Ekonomi Nasional dan Perkembangan Pelaksanaan *Economic Cooperation Program* IA- CEPA (ECP IA-CEPA); 3. Kesepahaman menuju penandatanganan *Subsidiary Arrangement* (SA) program kerja sama yang baru, di antaranya *Australia-Indonesia Partnership Towards Inclusive Society* (AIPTIS); 4. Presidensi Indonesia di G20. |
|  |  |  |  | Dalam SOM Pihak Indonesia dan Pihak Australia telah mencapai kesepahaman sebagai berikut: |
|  |  |  |  | a. Mengakui dampak nyata dan berkelanjutan kerja sama pembangunan bilateral antara lain dukungan yang komprehensif dan cepat dalam penanganan covid-19 di Indonesia serta melanjutkan penanganan dampak covid-19 menuju pemulihan bersama dengan menggunakan instrument bilateral yang ada termasuk kemitraan pembangunan. |
|  |  |  |  | b. Melanjutkan kemitraan pembangunan yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kapasitas Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang, sejalan dengan agenda Transformasi Ekonomi. |
|  |  |  |  | c. Memulai pelaksanaan beberapa program kerja sama baru yang telah dibahas pada SOM 2018 yaitu *Australia-Indonesia Health Security Partnership (AIHSP), Australia-Indonesia Partnership on Disaster Risk Management (SIAP SIAGA) dan IA-CEPA Economic Cooperation Program* (Katalis). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kesepakatan** | **Mitra** | **Waktu dan Pihak Penandatangan** | **Keterangan** |
|  |  |  |  | 1. Menyelesaikan proses desain untuk membangun platform Kemitraan Pengetahuan (sebagai pengembangan program *Knowledge Sector Initiative* yang berakhir tahun ini) dan mengembangkan program kerja sama yang mendukung upaya untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. 2. Program kerja sama baru Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (AIPTIS) sebagai kemitraan unggulan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial telah siap diluncurkan dan dilaksanakan. 3. Australia menyatakan dukungannya pada Kepresidenan G20 Indonesia pada tahun 2022 beserta tema dan agenda prioritasnya. 4. *Senior Officials Meeting* selanjutnya akan dilaksanakan pada awal tahun 2023 dan Indonesia akan menjadi tuan rumah. |
| 2 | Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (AIPTIS) | DFAT  Australia, Kementerian  PPN/Bappen as | 8 Februari 2022  **Pemerintah RI:**  Himawan Hariyoga, | Tujuan dari Kegiatan ini adalah untuk mendukung kemakmuran Indonesia dengan memperkuat peran masyarakat sipil di bidang kesetaraan gender, hak- hak disabilitas, dan inklusi sosial bagi orang-orang yang termarjinalkan, dalam kemitraan dengan Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan terkait lainnya.  AIPTIS berupaya agar dapat berkontribusi pada kemakmuran Indonesia dengan mendukung tujuan pembangunan "tidak ada seorangpun yang tertinggal": lebih banyak orang yang termarjinalkan berpartisipasi dan mendapat manjaat dan pembangunan sosial bndaya, ekonomi, dan politik Indonesia. Kegiatan ini akan membangun kemajuan di bidang kesetaraan gender, hak disabilitas, inklusi sosial, dan penguatan masyarakat sipil, disamping itu juga berupaya mengatasi ketidaksetaraan gender dan eksklusi sosial yang terus-menerus terjadi, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kegiatan ini juga akan menanggapi dampak langsung dari pandemi Virus Corona 2019 (Covid-19) yang secara tidak proporsional berdampak kepada perempuan dan masyarakat yang mengalami marjinalisasi, sehingga dapat mengancam perkembangan positif yang telah dicapai dalam beberapa dekade terakhir. |
|  |  |  | *Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas* |
|  |  |  | **Pihak Australia:** |
|  |  |  | Kirsten Bishop, |
|  |  |  | *Minister Counsellor Governance and Human Development Department of Foreign Affairs and Trade* |
| 3 | GIA antara USAID dan Bappenas tentang Pelaksanaan dari hasil jangka | USAID,  Kementerian PPN/Bappen | 23 Maret 2022  **Pemerintah RI:** | Tujuan dari kegiatan/proyek ini adalah untuk membantu upaya Pemerintah RI dalam: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kesepakatan** | **Mitra** | **Waktu dan Pihak Penandatangan** | **Keterangan** |
|  | menengah 2.2. Kapasitas publik dan privat dan komitmen untuk memperluas pertumbuhan ekonomi diperkuat  *(Portfolio Economic Growth)* | as, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomia n | Himawan Hariyoga  Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas.  **Pihak USAID:**  *Thomas P. Crehan*  *Director of Economic Growth and Education Office* | 1. Meningkatkan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang berorientasi pasar dan reformasi regulasi, dengan memperkuat pada pengembangan dan pemberdayaan sector swasta yang memungkinkan adanya dukungan analisis dan penelitian ekonomi; 2. Melakukan dan membangun keterlibatan sector swasta untuk berkolaborasi dalam mencapai hasil pembangunan yang relevan melalui platform di seluruh bidang focus teknis dengan perusahaan, investor, Yayasan swasta, Lembaga keuangan dan asosiasi bisnis. |
| 4 | Grant Implementation Agreement (GIA) antara USAID dan Bappenas tentang Pelaksanaan dari hasil jangka menengah:   * 1. Memajukan reformasi tata kelola pemerintahan.   2. Meningkatkan partisipasi publik yang lebih berpengetahuan dan aktif, dan | USAID,  Kementerian PPN/Bappen as, Kementerian Dalam Negeri | 19 Oktober 2022  **Pemerintah RI:**  Taufik Hanafi,  *Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas*  **Pihak USAID:**  Jeffery P. Cohen  *Mission Director, USAID* | Tujuan dari kegiatan/proyek ini adalah membantu Pemerintah RI untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua dengan meningkatkan tata Kelola pemerintahan untuk pembangunan di Papua.  Proyek meliputi penguatan kapasitas dan pemberian bantuan teknis sebagai berikut:   * Penguatan kapasitas pemerintah provinsi di bidang: 1) proses perencanaan pembangunan daerah, 2) proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan penggunaan dana Otsus, 3) penggunaan teknologi informasi dan pengelolaan dana. * Pengembangan model pendampingan, dalam lingkup pembuatan modul dan kurikulum pendampingan perencanaan dan penganggaran pembangunan bagi aparatur pemprov di wilayah Papua. * Pendampingan Pemprov dalam melibatkan Orang Asli Papua (OAP)/Local |
|  |  |  | champion/Perwakilan OAP dalam proses perencanaan pembangunan. |
|  | 1.c. Meningkatkan hak-hak dan toleransi. |  | * Bantuan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang tugas dan fungsinya terkait dengan perencanaan di tingkat pusat dan daerah serta pelajar Papua dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan Papua. |
|  | (KOLABORASI) |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kesepakatan** | **Mitra** | **Waktu dan Pihak Penandatangan** | **Keterangan** |
| 5 | **Minutes of Meeting** (MoM) on Bilateral Meeting between Indonesia and Austria on Financial Cooperation | Austria Federal Ministry of Finance | 27 Oktober 2022 Indonesia:  Direktur Pendanaan Bilateral Kementerian PPN/Bappenas  Austria:  Head of department Export Financing and International Export Promotion Policy | Tujuan dari pertemuan bilateral adalah untuk mendiskusikan isu-isu procedural dalam implementasi MoU Kerjasama Keuangan Indonesia-Austria.  Hal-hal yang dibahas antara lain:   1. Preparatory Measures pada Grant/TA yang mendampingi proyek pinjaman Austria 2. Aplikasi prosedur dalam Annex 1 dan 2 moU 3. Status proyek ongoing dan proyek potensial |
| 6 | *Knowledge Partnership Platform ('KPP") Australia Indonesia*, atau "KONEKSI"  (Kolaborasi Pengetahuan dan Inovasi Australia Indonesia) | DFAT  Australia, Kementerian PPN/Bappen as, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  Riset dan Teknologi | 21 Desember 2022  **Pemerintah RI:**  Taufik Hanafi,  *Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas*  **Pihak Australia:**  Kirsten Bishop, | Tuiuan Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan penggunaan solusi berbasis pengetahuan untuk kebijakan dan teknologi yang inklusif dan berkelaniutan melalui kemitraan strategis antara organisasi Australia dan Indonesia.  Kegiatan ini akan mendukung dua hasil pada tahun 2027, sebagar berikut:   * Organisasi Australia dan Indonesia telah meningkatkan kerja sama dan saling pengetian melalui kemitraan pengetahuan; * Solusi inovatif untuk kebijakan dan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan dihasilkan oleh kemitraan pengetahuan. |
|  |  |  | *Minister Counsellor Governance and Human Development Department of Foreign Affairs and Trade* |

#### Indikator Kinerja 11

##### % tercapainya target penyiapan Program Compact II terhadap rencana kerja tahunan

Selama tahun 2022 Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Pendanaan Bilateral dan tim teknis *Compact Development Team* (CDT) telah banyak dilakukan aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan dan mengembangkan Program Compact-2 sesuai dengan arahan Kementerian PPN/Bappenas. Kegiatan 2022 fokus pada Tahap Pengembangan Proyek berdasarkan pada proposal proyek yang sebelumnya telah disampaikan Kementerian PPN/Bappenas pada 5 Juli 2021 kepada MCC.

Proposal Proyek Program Compact-2 dikembangkan berdasarkan *Concept Note* yang telah disepakati pada tahun 2020 serta melalui rangkaian *desk review*, FGD, konsultasi publik, dan pertemuan dengan pemangku kepentingan di sektor pemerintahan, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil baik di tingkat pusat maupun daerah dan telah disepakati dalam Rapat Tim Pengarah pada 10 Juni 2021 bertemakan Pembiayaan Infrastruktur dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan judul:

* + - * 1. Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penyiapan Proyek serta Pembiayaan Inovatif untuk Infrastruktur
        2. Akses Pembiayaan bagi UMKM untuk Mendukung Peningkatan Partisipasi UMKM dalam Rantai Nilai

Pada 26 Oktober 2021, Bappenas menerima surat balasan dari pihak MCC pada yang menyampaikan bahwa Indonesia sudah *eligible* untuk memasuki tahap persiapan berikutnya dari Persiapan Program Compact-2 yaitu Tahap Pengembangan Proyek. Tahap ini berlangsung hingga pelaksanaan *Investment Management Committee* (IMC) Meeting MCC bulan September 2022 yang ditandai dengan penyampaian *Investment Memo* yang berisi mengenai deskripsi kegiatan serta alokasi budget berdasarkan proposal proyek yang disampaikan pada tahun sebelumnya. Pada Rapat IMC *Meeting* telah diputuskan untuk menyetujui Program Compact-2 Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar US$ 649 juta dan merekomendasikan untuk lanjut ke Tahap Negosiasi dan Penandatanganan Perjanjian Hibah.

Pada tabel di bawah ini dijabarkan secara ringkas perbandingan komponen kegiatan dari Proposal Proyek 2021 dan *Investment Memo* IMC *Meeting* 2022 Tahap Pengembangan Proyek selesai dilakukan pada tahun 2022.

**Tabel 3. 13 Perbandingan Proposal Proyek 2021 dan Investment Memo IMC Meeting**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Proposal Proyek 2021** | ***Investment Memo* 2022** |
| Pembiayaan Infrastruktur | 1. Pengembangan Pedoman Manajemen Investasi Publik (PIMG) dan Platform Digital 2. Desain dan Pelembagaan *Project Preparation Facility* (PPF) 3. Pengembangan Instrumen Pembiayaan dan Infrastruktur Pasar 4. Penerapan Konsep dan *Pilot Project* | ***Advancing Transport and Logistic Accessibility Services* (ATLAS) *project***   1. *Transport Planning Reform* 2. *Good Practice Infrastructure Projects* 3. *Public Investment Management Guidelines* 4. *Project Preparation and Delivery Facility* 5. *Support Services* |
| ***Financial Market Development Project* (FMDP)**   1. *Capacity Building / Technical Assistance* 2. *Transaction Advisory Services* 3. *Blended Finance Delivery Mechanism* |
| Pembiayaan UMKM | 1. Pengembangan Sistem Penilaian Tingkat Risiko Pembiayaan UMKM 2. Pengembangan *Platform Supply Chain Finance* 3. Dukungan untuk *Fintech Data Center* dan *Fraud Detection System* 4. Skema Inovatif Pembiayaan Rantai Nilai di Provinsi Target 5. Skema Inovatif Pembiayaan untuk UMK Perempuan di Provinsi Target 6. Program Literasi Digital & Keuangan Responsif-gender di Provinsi Target 7. Program Kesiapan Investor Responsif-gender untuk UKM Transformasional dan Start-ups. | ***Access to Finance for Women- owned / Micro-, Small and Medium Enterprises Project***   1. *Gender Inclusive Value Chain Finance* 2. *Digital and Financial Literacy Enhancements* 3. *MSME Capacity Enhancement* 4. *Augmenting Government Data on MSMEs* |

Pada tahun 2022, selain melakukan rangkaian aktivitas pengembangan substansi program juga dilakukan aktivitas-aktivitas administratif-manajerial yang fokus pada penyusunan dan negosiasi Perjanjian Hibah Compact-2 (*Grant Agreement*), pengembangan model kelembagaan dan tata kelola, pengembangan model penyaluran dana, serta implementasi hibah persiapan *Compact Development Fund* (CDF).

Pencapaian kegiatan-kegiatan Persiapan dan Pengembangan Compact-2 berdasarkan tahun 2022 secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3. 14 Pencapaian kegiatan-kegiatan Persiapan dan Pengembangan Compact-2 tahun 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan / Keluaran** | **Target 2022** | **Realisasi 2022** | **Keterangan** |
| **A. Pengembangan Proyek 2021 *Workstream* Pembiayaan Infrastruktur** | | | | |
| 1. | Penyusunan *Project Concept Note* proyek percontohan infrastruktur transport *demand- side* di 5 provinsi prioritas | 100% | 100% | Proyek percontohan telah disetujui dan akan dilanjutkan dengan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) pada 2023 |
| 2. | Penyusunan *pipeline* proyek percontohan transaksi *blended finance delivery mechanism supply-side* | 100% | 80% | Finalisasi *pipeline* ditargetkan selesai Januari/Februari 2023 sebelum penandatanganan *Grant Agreement* Compact |
| 3 | *Due Diligence Mission Demand- side*, mencakup kegiatan kunjungan lapangan ke daerah, FGD dan konsultasi publik, serta rapat bilateral dengan pemangku kepentingan kunci | 100% | 100% | Telah dilaksanakan pada Maret-April dan Oktober 2022 |
| 4. | *Due Diligence Mission Supply- side* mencakup FGD dan konsultasi publik, serta rapat bilateral dengan pemangku kepentingan kunci | 100% | 50% | Telah dilaksanakan pada Juni 2022, *mission* yang direncanakan bulan Desember 2022 diundur menjadi awal 2023. |
| 5. | Finalisasi Proyek dan Kegiatan Pembiayaan Infrastruktur dalam *Investment Memo* untuk persetujuan Board MCC | 100% | 100% | Pengembangan Proyek Pembiayaan Infrastruktur telah disetujui oleh MCC dengan alokasi hibah sebesar US$ 446 juta |
| **B. Pengembangan Proyek 2021 *Workstream* Pembiayaan UMKM** | | | | |
| 1. | *Due Diligence Mission* | 100% | 100% | Dilaksanakan pada Juni dan Desember 2022 |
| 2. | Finalisasi Proyek dan Kegiatan Pembiayaan UMKM dalam *Investment Memo* untuk persetujuan Board MCC | 100% | 100% | Pengembangan Proyek Pembiayaan Infrastruktur disetujui oleh MCC dengan alokasi hibah sebesar US$ 135 juta |
| **C. Pengembangan Kelembagaan dan *Fund Channeling*** | | | | |
| 1. | Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia 2 (LWA MCAI-2) | 100% | 100% | Penerbitan Permen PPN/Bappenas No  5 Tahun 2022 tentang Pembentukan LWA MCAI-2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan / Keluaran** | **Target 2022** | **Realisasi 2022** | **Keterangan** |
| 2. | Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) MCAI-2 | 100% | 100% | Penerbitan SK Menteri PPN/Bappenas 147 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Anggota MWA MCAI-2 |
| 3. | Pembentukan Satuan Kerja (Satker) MCAI-2 | 100% | 50% | Saat ini masih dalam pembahasan dengan Biro Hukum dan Biro Renortala Bappenas, serta Kementerian Keuangan |
| 4. | Negosiasi, dan Finalisasi Draft Perjanjian Hibah Compact-2 | 100% | 100% | Negosiasi Perjanjian Hibah Compact-2 telah dilaksanakan pada November 2022 |
| 5. | Penandatanganan Perjanjian Hibah Compact-2 | 100% | 90% | Draft perjanjian telah disepakati kedua belah pihak namun penandatanganannya akan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan forum tingkat tinggi yang dihadiri Menteri Keuangan RI dan Menteri Luar Negeri AS. |
| 6. | Implementasi hibah persiapan *Compact Development Fund* (CDF) | 100% | 100% | Pengadaan, pelaksanaan, dan serah terima BAST hibah CDF tercapai |
| **Realisasi Total** | | | **90%** |  |

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkup kegiatan Program Compact-2 selama tahun 2022 telah meraih pencapaian sebesar 90% terhadap target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022.

#### Perbandingan Capaian Kinerja 2021-2022

Secara umum, inikator kinerja tahun 2022 telah tercapai. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022 ini terdapat indikator kerja yang mengalami kenaikan serta beberapa indikator kinerja yang mengalami penurunan. Di tahun 2022 ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja baru yang sebelumnya tidak ada di indikator kinerja tahun 2021. Tabel berikut ini merupakan perbandingan capaian kinerja Direktorat Pendanaan Bilateral pada tahun 2022 dan tahun 2021.

**Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian Kinerja 2021 dan 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja 2022** | **Realisasi 2022** | **Realisasi 2021** |
| 1 | Persentase (%) keselarasan bidang pada project pipeline pendanaan bilateral dan kredit ekspor tahunan dengan prioritas dan/atau dengan major project RPJMN | 100% | 100%\*) |
| 2 | Persentase (%) rekomendasi rencana penarikan PHLN yang digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif | 93,89% | 84% |
| 3 | Persentase (%) keselarasan sasaran program Renja K/L mitra kerja dengan sasaran Renstra K/L mitra kerja | 95% | -\*\*) |
| 4 | Persentase (%) keselarasan sasaran program Renja K/L mitra kerja dengan RKA mitra kerja | 100% | -\*\*) |
| 5 | Persentase (%) Daftar kegiatan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan untuk proses *Loan Agreement* dalam rangka pembiayaan RKP | 100% | 100% |
| 6 | Persentase (%) ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup pendanaan bilateral dan kredit ekspor terhadap proyek-proyek on-going | 100% | 100%\*) |
| 7 | Persentase (%) ketersediaan hasil analisis terhadap pemantauan lapangan dan evaluasi proyek-proyek pendanaan bilateral dan kredit ekspor | 100% | 100%\*) |
| 8 | Persentase (%) rekomendasi pengendalian dan pelancaran rencana kegiatan pendanaan bilateral yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait | 95% | 100% |
| 9 | Persentase (%) rekomendasi hasil telaah/analisis pendanaan bilateral dan kredit ekspor yang diterima oleh Deputi | 100% | 100%\*) |
| 10 | Persentase (%) prakarsa pengembangan pendanaan bilateral dan kredit ekspor yang diterima dan didukung oleh stakeholders terkait | 100% | 100%\*) |
| 11 | Persentase (%) tercapainya target penyiapan Program Compact II terhadap rencana kerja tahunan | 90% | 100% |

Keterangan:

\*) Indikator kinerja 2021 tidak mencakup lingkup kredit ekspor

\*\*) Tidak tercakup dalam Indikator Kinerja 2021

#### Capaian Kinerja Lainnya

* + - 1. **Koordinasi Penyusunan Proposal Kegiatan Kerjasama Keuangan dan Kerjasama Teknis untuk mendapatkan Pendanaan Pemerintah Jerman**

Pada tahun 2022, proses penyepakatan proyek-proyek Kerjasama Pembangunan Indonesia-Jerman yang normalnya dilakukan melalui mekanisme Pertemuan Negosiasi Bilateral diganti dengan mekanisme surat usulan dan penetapan komitmen pendanaan melalui pertukaran surat (Exchange Letter). Proses ini ditempuh karena pertemuan negosiasi bilateral tidak dapat diselenggarakan sehubungan dengan padatnya agenda forum internasional, Presidensi G20 Indonesia dan Keketuaan G7 Jerman.

Direktorat Pendanaan Bilateral mengkoordinasikan persiapan usulan proposal kegiatan- kegiatan dari K/L untuk disampaikan kepada Pemerintah Jerman dengan tujuan mendapatkan pendanaan khususnya hibah. Bappenas telah menyampaikan usulan proyek kerjasama kepada Kedutaan Besar Jerman pada pertengahan bulan Desember 2022.

Sebagai respon atas usulan Bappenas pihak Pemerintah Jerman melalui Verbale Note tanggal 22 Desember 2022 menyampaikan konfirmasi komitmen pendanaannya. Komitmen pendanaan dari Pemerintah Jerman tersebut dalam bentuk 14 proyek Technical Cooperation (TC) senilai EUR 43,5 juta dan 6 proyek Financial Cooperation (FC) senailai EUR 312,7 juta.

#### Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (stakeholder) Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pendanaan Pembangunan

Pada tahun 2022, Direktorat Pendanaan Bilateral melakukan survey untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) yang mencakup kegiatan konsultasi, pendampingan dan fasilitasi. Responden yang terlibat dalam kegiatan ini adalah mitra Direktorat Pendanaan Bilateral yang berasal dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten), Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Mitra Pembangunan.

Survei ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para responden. Untuk mengukur tingkat kepuasan, kuesioner ini menggunakan metode likert dengan enam pilihan, yaitu mengukur persepsi seluruh peserta terhadap pernyataan yang disajikan mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Dalam hal ini, aspek-aspek yang ditanyakan dalam kuesioner tersebut mencakup akses layanan konsultasi (memuat kemudahan staf untuk dihubungi dan pelayanan yang tidak berbelit), waktu konsultasi (memuat kemudahan pengagendaan sesuai kesepakatan bersama hingga pelaksanaan konsultasi secara tepat waktu), materi konsultasi (memuat kejelasan penyampaian materi dengan didukung data dan informasi yang relevan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal), sumber daya manusia

(mengukur keramahan dan pengetahuan staf saat pelaksanaan konsultasi serta masukan yang diberikan untuk pemecahan masalah), integritas (melihat konsultasi diberikan tanpa imbalan dan berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku), serta sarana dan prasarana (mengukur kualitas penyelenggaraan koordinasi secara daring dan luring).

Berdasarkan hasil survey terhadap 51 responden dari mitra Direktorat Pendanaan Bilateral, total *score* yang didapat adalah 4.168 dari total score 4.590, sedangkan nilai rata-rata mencapai 277,87 dari nilai rata-rata tertinggi sebesar 306. Dengan menggunakan rumus pengukuran indikator kinerja Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pendanaan Pembangunan yaitu dengan mengalikan hasil pembagian nilai rata-rata survey/kuesioner dengan nilai rata-rata tertinggi, dengan weight factor 100, nilai akhir yang diperoleh Direktorat Pendanaan Bilateral adalah 90,81. Dengan demikian, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pendanaan Pembangunan secara keseluruhan melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu 88.

Secara umum, dilihat dari jawaban seluruh responden, aspek yang dapat dikatakan sudah baik yaitu Integritas dimana mayoritas responden menyatakan sangat puas dengan layanan staf Direktorat Pendanaan Bilateral yang tanpa pungutan/gratifikasi serta berpegang pada peraturan yang berlaku. Aspek yang masih memerlukan perbaikan yaitu waktu konsultasi, dimana beberapa responden menyatakan kemudahan pengagendaan dan ketepatan pelaksanaan konsultasi dapat lebih ditingkatkan.

#### Proses Persetujuan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN)

Penerbitan Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi, yang kemudian diubah dengan Perpres No. 108 tahun 2020, menyebabkan perubahan mekanisme dalam proses persetujuan penerimaan kredit luar negeri atau pinjaman komersial luar negeri (PKLN). Dengan terbitnya Perpres tersebut, proses persetujuan PKLN yang diusulkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang sebelumnya diatur dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri, kini kembali mengacu pada Keppres Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri. Sebagai konsekuensi dari penerapan Keppres No. 59 tahun 1972 tersebut, proses persetujuan PKLN dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan dengan melibatkan Kementerian PPN/Bappenas dan Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keppres No. 59/1972 yang menyatakan bahwa penerimaan kredit luar negeri oleh Badan Usaha Negara dan Badan Usaha Daerah harus mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan setelah mendengar pendapat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur BI.

Keterlibatan Bappenas dalam proses persetujuan PKLN memiliki nilai strategis dalam hal Bappenas dapat merealisasikan integrasi pendanaan khususnya untuk pelaksanaan proyek- proyek prioritas nasional, dan pendekatan *Holistic*, *Integrated*, *Thematic* and *Spatial* (HITS). Selain itu, Bappenas dapat turut mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui tata kelola yang lebih baik (transparan, akuntabel, tepat waktu/terukur).

Sesuai dengan SOP yang berlaku di Bappenas, Direktorat Pendanaan Bilateral dan Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan bertugas untuk mengoordinasikan proses pemberian pendapat Menteri PPN/Kepala Bappenas atas usulan PKLN yang diajukan BUMN. Dalam rangka penugasan ini, selama tahun 2022 terdapat 3 (tiga) usulan PKLN yang diproses Bappenas, yaitu (1) PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), (2) PT Pertamina (Persero), dan (3) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Berdasarkan hasil penilaian yang mencakup aspek: (1) Rencana Penggunaan PKLN; (2) Kondisi dan kemampuan keuangan perseroan; (3) Manfaat ekonomi; (4) Keselarasan dengan program pembangunan; dan (4) Kesesuaian dengan Regulasi, Menteri PPN/Kepala Bappenas merekomendasikan disetujuinya permohonan izin PKLN ketiga BUMN tersebut dengan sejumlah catatan. Dengan mempertimbangkan pendapat Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut serta pendapat Gubernur BI, Menteri Keuangan memberikan izin PKLN kepada ketiga BUMN tersebut dengan beberapa catatan. Dalam hal ini, beberapa catatan Menteri Keuangan dalam surat persetujuan PKLN tersebut selaras dengan catatan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Hal ini menunjukkan bahwa Bappenas mempunyai kinerja yang baik sehingga keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas dapat ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan.

**Tabel 3. 16 Daftar Usulan Pinjaman Komersial Luar Negeri 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tanggal Surat** | **Pengusul** | **Bentuk dan Nilai Usulan PKLN** | **Rencana Penggunaan** | **Pendapat Menteri PPN/ Kepala Bappenas** | **Keputusan Menteri Keuangan** |
| 1 | 8-2-2022 | PT  Indonesia  Asahan Aluminium | Penerbitan obligasi global dengan jumlah  USD 2 – 2,25 | 1. Sebesar USD 1,5-1,75 miliar untuk pembayaran kembali atas sebagian atau seluruh dari Surat Utang: | Merekomendasikan untuk menyetujui usulan PKLN Inalum dengan beberapa catatan sebagai berikut:   1. PT Inalum (Persero) memprioritaskan penggunaan PKLN untuk pembiayaan investasi/capex sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan Perseroan, dan melaporkan perkembangan realisasi pembiayaan investasi tersebut. 2. PKLN dilakukan dengan penuh kehati- hatian atas dasar kegiatan dan kemampuan keuangan PT Inalum (Persero), serta mitigasi terkait dinamika pasar. 3. Dana hasil penerbitan obligasi hanya dipergunakan untuk kegiatan yang telah direncanakan secara cermat sebelumnya dan disetujui oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Indonesia. 4. Pelaksanaan, penggunaan dan risiko penerbitan obligasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab PT Inalum (Persero). 5. Rekomendasi PKLN ini bukan merupakan bentuk Jaminan Pemerintah dan pengelolaan risiko *default* menjadi tanggung jawab PT Inalum (Persero)   secara korporasi. | Memberikan izin atas Permohonan PKLN PT Inalum (Persero) berupa penerbitan obligasi global dengan jumlah maksimal  sebesar USD 2 – 2,25 miliar, dengan |
|  |  | (Persero)/ Inalum | miliar | 1. USD 1,25 miliar yang akan   jatuh tempo pada tahun 2023;   1. USD 1,00 miliar yang akan jatuh tempo pada tahun   2028; dan/atau | catatan:  1. Proses penerbitan obligasi global oleh PT Inalum (Persero) dilakukan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. |
|  |  |  |  | c. USD 0,75 miliar yang akan jatuh tempo pada tahun 2048, yang seluruhnya diterbitkan pada tahun 2018, dan/atau surat utang lainnya yang diterbitkan tahun 2020. | 1. Pelaksanaan, penggunaan, dan risiko   gagal bayar obligasi global dimaksud sepenuhnya merupakan tanggung jawab PT Inalum (Persero).   1. Persetujuan PKLN ini bukan merupakan bentuk penjaminan Pemerintah. |
|  |  |  |  | 2. Sebesar USD 500-750 juta untuk belanja modal dan investasi Perseroan pada tahun 2022 yang telah tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan tahun 2022, termasuk untuk pembangunan *Smelter Grade Alumina Refinery* (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat sebesar USD 180 juta. | 4. Pelaksanaan dan penggunaan obligasi global dimaksud wajib dilaporkan kepada Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Format laporan dimaksud mengacu pada ketentuan kewajiban pelaporan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar beserta Peraturan turunannya. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tanggal Surat** | **Pengusul** | **Bentuk dan Nilai Usulan PKLN** | **Rencana Penggunaan** | **Pendapat Menteri PPN/ Kepala Bappenas** | **Keputusan Menteri Keuangan** |
| 2 | 30-3-2022 | PT  Pertamina (Persero) | USD 2,85 miliar dalam bentuk Coorporate Loan dan/atau Global Bond. | Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan investasi dan liability management (refinancing) | Menyetujui permohonan izin PKLN dengan beberapa catatan:   1. PKLN hanya dipergunakan untuk kegiatan yang telah direncanakan dan disetujui oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Indonesia, dan diprioritaskan untuk pembiayaan investasi/capex sehingga dapat mendukung upaya peningkatan ketahanan energi melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi, serta meningkatkan keandalan infrastruktur energi 2. PKLN dilakukan dengan penuh kehati- hatian atas dasar kegiatan dan kemampuan keuangan PT Pertamina serta mitigasi terkait dinamika pasar. 3. Pelaksanaan, penggunaan dan risiko PKLN sepenuhnya merupakan tanggung jawab PT Pertamina (Persero). 4. Rekomendasi PKLN ini bukan merupakan bentuk Jaminan Pemerintah dan pengelolaan risiko default menjadi tanggung jawab PT Pertamina secara korporasi. | Memberikan izin PKLN berupa pinjaman luar negeri dan/atau obligasi global dengan jumlah maksimal sebesar USD 2,85 miliar, dengan catatan:   1. Proses penerbitan pinjaman luar negeri dan/atau obligasi global oleh PT Pertamina (Persero) dilakukan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2. Pelaksanaan, penggunaan, dan risiko gagal bayar pinjaman luar negeri dan/atau obligasi global dimaksud sepenuhnya merupakan tanggung jawab PT Pertamina (Persero). 3. Persetujuan PKLN ini bukan merupakan bentuk penjaminan Pemerintah. 4. Pelaksanaan dan penggunaan pinjaman luar negeri dan/atau obligasi global dimaksud wajib dilaporkan kepada Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Format laporan dimaksud mengacu pada ketentuan kewajiban pelaporan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar   beserta Peraturan turunannya. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tanggal Surat** | **Pengusul** | **Bentuk dan Nilai Usulan PKLN** | **Rencana Penggunaan** | **Pendapat Menteri PPN/ Kepala Bappenas** | **Keputusan Menteri Keuangan** |
| 3 | 18  November 2022 | PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk | Penerbitan surat utang dan SUKUK kepada kreditor luar negeri sebesar USD 702.754.933,00  dengan rincian:   1. Surat Utang (USD 624.735.352) 2. SUKUK (USD   78.019.581) | Rencana penerbitan surat utang luar negeri ini merupakan tindak lanjut dari homologasi (pengesahan) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juni 2022 atas persetujuan Rencana Perdamaian antara Garuda dan para kreditornya tertanggal 17 Juni 2022.  Sesuai dengan ketentuan rencana perdamaian tersebut, Garuda diharuskan menerbitkan surat utang dan sukuk baru kepada kreditor luar negeri untuk melunasi utang eksisting kepada para kreditor, dengan nilai maksimal sebesar USD 825 juta. | Pada prinsipnya merekomendasikan untuk disetujuinya permohonan izin PKLN Garuda dengan beberapa catatan   1. PKLN hanya dipergunakan untuk kegiatan yang telah direncanakan dan disetujui oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Indonesia, yaitu sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Perdamaian antara Garuda dan para kreditor Garuda yang telah mendapatkan pengesahan (homologasi) Pengadilan Niaga pada tanggal 27 Juni 2022, serta sebagai salah satu upaya penyelamatan Garuda. 2. PKLN dilakukan dengan penuh kehati- hatian atas dasar kegiatan dan kemampuan keuangan Garuda serta mitigasi terkait dinamika pasar mengingat keadaan ekonomi dunia masih akan mengalami ketidakpastian yang cukup tinggi. 3. Pelaksanaan, penggunaan, dan risiko PKLN sepenuhnya merupakan tanggung jawab Garuda. 4. Rekomendasi PKLN ini bukan merupakan bentuk Jaminan Pemerintah dan pengelolaan risiko default menjadi tanggung jawab Garuda secara korporasi.. | Memberikan izin PKLN berupa penerbitan Surat Utang dan Sukuk Baru sebagai Rencana Perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga dengan jumlah maksimum Surat Utang Baru sebesar USD 624.735.352 dan Sukuk Baru sebesar USD 78.019.581, dengan catatan:   1. Proses penerbitan Surat Utang dan Sukuk Baru oleh PT Garuda dilakukan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2. Pelaksanaan, penggunaan, dan risiko gagal bayar Surat Utang dan Sukuk Baru dimaksud sepenuhnya merupakan tanggung jawab PT Garuda. 3. Persetujuan PKLN ini bukan merupakan bentuk penjaminan Pemerintah. 4. Pelaksanaan dan penggunaan Surat Utang dan Sukuk Baru dimaksud wajib dilaporkan kepada Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Format laporan dimaksud mengacu pada ketentuan kewajiban pelaporan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar   beserta Peraturan turunannya. |

#### Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022, Direktorat Pendanaan Bilateral juga didukung oleh anggaran dari sumber alokasi pada PPK DM I dan PPK DM III Kementerian PPN/Bappenas. Dukungan tersebut digunakan untuk penyewaan kantor Program Compact II, perjalanan dinas luar negeri Pimpinan, serta dukungan kegiatan Sekretariat PPK PPN XVI/Compact 2. Dengan demikian, jika sumber-sumber alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan Dit Pendanaan Bilateral tahun 2022 dijumlahkan, maka diperoleh angka realisasi sebesar Rp. 12.108.453.304 atau 99,93% dari total pagu sebesar Rp. 12.116.702.000 sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.17 berikut.

Perlu menjadi catatan bahwa dalam perbedaan pagu anggaran yang terjadi dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebesar Rp. 13.069.408.000 dan pagu yang terdapat dalam tabel

3.17 disebabkan karena pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2022 masih memasukkan pagu blokir dan sebelum terdapat pemotongan. Anggaran yang kemudian ditetapkan untuk digunakan oleh Dit. Pendanaan Bilateral pada tahun 2022 kemudian disesuaikan sehingga nampak sebagaimana pada tabel 3.17.

**Tabel 3. 17 Capaian Realisasi Anggaran tahun 2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Pagu Awal** | **Refocusing Pagu Akhir** | **Realisasi** | **%**  **Realisasi** |
| 1. | Kajian Pengembangan Pembiayaan Model Delivery Inovatif sebagai Lesson Learn Proyek Hibah Luar Negeri | 170.225.000 | 46.770.000 | 46.752.400 | 99,96 |
| 2. | Koordinasi Rencana Kegiatan Pendanaan Luar Negeri Bilateral | 469.234.000 | 588.156.000 | 587.369.311 | 99,87 |
| 3. | Koordinasi Penyusunan dan Pengembangan Kerjasama dan Pendanaan Bilateral serta Aktivitas Pengembangan Proyek | 433.923.000 | 352.558.000 | 352.345.190 | 99,94 |
| 4. | Koordinasi Peningkatan Kesiapan Pendanaan Luar Negeri Bilateral | 63.105.000 | 42.460.000 | 42.357.300 | 99,76 |
| 5. | Koordinasi Mitra Sekretariat Kabinet | 73.890.000 | 55.369.000 | 55.345.700 | 99,96 |
| 6. | Pemantauan Proyek-Proyek Yang Didanai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Bilateral | 333.670.000 | 289.837.000 | 289.222.172 | 99,79 |
| 7. | Evaluasi Peran Usaha Nasional dalam Proyek Insfrastruktur yang di biayai Pinjaman Luar Negeri | 56.300.000 | 56.245.000 | 54.979.700 | 97,75 |
| 8. | Koordinasi Persiapan dan Pengembagan Program Hibah Compact II | 9.132.653.000 | 8.348.899.00  0 | 8.345.378.000 | 99,96 |
| **Total Pagu A** | | **10.733.000.000** | **9.780.284.000** | **9.773.749.773** | **99,93** |
| 9. | Sewa Kantor Program Compact 2 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 999.220.320 | 99,92 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Anggaran Lintas Bidang Perjalanan Dinas | - | 536.408.000 | 536.019.687. | 99,93 |
| 11 | Sekretariat PPK PPN XVI-Compact 2 | 800.000.000 | 800.000.000 | 799.463.524 | 99,93 |
| **Total Pagu B** | | **1.800.000.000** | **2.336.408.000** | **2.334.703.531** | **99,93** |
| **TOTAL A + B** | | **12.533.000.000** | **12.116.692.00**  **0** | **12.108..453.30**  **4** | **99,93** |

#### Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 - 2022

Pada tahun 2022, Kementerian PPN/Bappenas termasuk unit kerja Direktorat Pendanaan Bilateral hanya mengalami 2 (dua) kali perubahan (*refocusing*) besaran anggaran kegiatan. Sementara itu, pada tahun sebelumnya, Direktorat Pendanaan Bilateral mengalami 4 (empat) kali penyesuaian anggaran. Namun demikian, Direktorat Pendanaan Bilateral berhasil mengelola seluruh kegiatan tahun 2022 dengan sangat baik dengan jumlah realisasi sama dengan tahun 2021, atau sangat mendekati angka 100%. Realisasi pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. 18 Realisasi Penyerapan Anggaran Direktorat Pendanaan Bilateral Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Pagu Kontrak Kinerja** | **Revisi** | **Realisasi** | **%**  **Realis asi** |
| 1 | Kajian Strategi Pemanfaatan | 400.640.000 | 114.300.000 | 114.258.850 | 99,96 |
|  | Sumber Pembiayaan Luar |  |  |  | % |
|  | Negeri Bilateral untuk |  |  |  |  |
|  | Optimalisasi Konten Lokal |  |  |  |  |
| 2 | Koordinasi Rencana Kegiatan | 736.634.000 | 437.382.000 | 437.218.997 | 99,96 |
|  | Kerjasama Pendanaan Bilateral |  |  |  | % |
| 3 | Koord. Penyusunan dan | 690.713.000 | 234.167.000 | 233.960.968 | 99,91 |
|  | Pengembangan Kerjasama |  |  |  | % |
|  | Pendanaan Bilateral serta |  |  |  |  |
|  | Aktivitas Pengembangan Proyek |  |  |  |  |
| 4 | Koordinasi Peningkatan Kesiapan Kerjasama Pendanaan Bilateral | 455.373.000 | 123.714.000 | 123.713.750 | 100% |
| 5 | Pemantauan proyek-proyek yang | 689.842.000 | 338.336.000 | 338.307.392 | 99,99 |
|  | dibiayai pinjaman luar negeri |  |  |  | % |
|  | bilateral |  |  |  |  |
| 6 | Evaluasi Perjanjian-Perjanjian | 344.290.000 | 112.133.000 | 112.110.470 | 99,98 |
|  | mengenai Kerjasama |  |  |  | % |
|  | Pembangunan dan Keuangan |  |  |  |  |
|  | antara Pemerintah Indonesia |  |  |  |  |
|  | dan Mitra-Mitra Pembangunan |  |  |  |  |

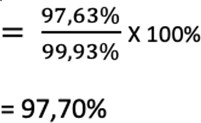
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Pagu Kontrak Kinerja** | **Revisi** | **Realisasi** | **%**  **Realis asi** |
| 7. | Koordinasi Penyiapan dan Pengembangan Program Hibah Compact 2 | 15.682.508.000 | 9.476.441.000 | 9.475.596.468 | 99,99  % |
|  | **Total Pagu** | **19.000.000.000** | **10.836.473.000** | **10.835.166.895** | **99,99**  **%** |

#### Analisis Efisiensi Anggaran

Dari total pagu akhir sebesar Rp 12.116.692.000,00, total realisasi anggaran Direktorat Pendanaan Bilateral pada tahun 2022 mencapai Rp 12.108.453.304 atau 99,93%. Dengan demikian, capaian realisasi anggaran pada tahun 2022 hampir sama dengan tahun 2021 yaitu 99,99%.

Sementara itu, rata-rata capaian Indikator Kinerja pada tahun 2022 mencapai 97,63% atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata target yaitu 87,7%.

Dengan membagi realisasi kinerja dengan realisasi penyerapan anggaran seperti terlihat pada gambar di bawah ini, efisiensi anggaran Direktorat Pendanaan Bilateral pada tahun 2022 mencapai 97,70%. Ini berarti penggunaan anggaran Direktorat Pendanaan Bilateral di TA 2022 dapat dianggap mendekati efisien 100%.



Secara umum, efisiensi anggaran dilakukan karena adanya kebijakan “blokir anggaran” di awal Tahun Anggaran 2022 atau “pemotongan anggaran” yang menyebabkan perlunya penyesuaian/efisiensi anggaran untuk setiap kegiatan. Untuk Tahun Anggaran 2022, jumlah pagu anggaran Direktorat Pendanaan Bilateral hanya disetujui 60% dari usulan anggaran yang diajukan sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran beberapa kegiatan dan komponen anggaran dengan cara realokasi atau pengurangan /pemotongan.

Alokasi anggaran Direktorat Pendanaan Bilateral pada TA 2022 dapat dikatakan sangat kurang mengingat pada tahun 2022 Direktorat Pendanaan Bilateral juga melaksanakan 2 (dua) penugasan tambahan yaitu: menjadi mitra/pengampu untuk Kementerian Sekretariat Kabinet dan melaksanakan Kegiatan Koordinasi Penyiapan Program Compact 2 yang akan didanai dari Hibah MCC Amerika Serikat dengan nilai USD 650 juta (ekuiv Rp10 triliun). Dengan adanya tambahan kedua kegiatan tersebut, jumlah anggaran yang tersedia menjadi sangat kurang dan kondisi ini diperparah dengan dengan adanya pemblokiran/penghematan anggaran. Hal ini menyebabkan pelaksanaan anggaran di Direktorat Pendanaan Bilateral menjadi sangat terbatas. Usulan penambahan anggaran sudah dilakukan 3 (tiga) kali namun tambahan anggaran baru terlaksana menjelang pelaksanaan anggaran selesai di akhir tahun.

Berikut ini berapa hal yang dilakukan Direktorat Pendanaan Bilateral dalam rangka penyesuaian dan efisiensi anggaran pada tahun 2022:

1. **Rapat/Pertemuan**. Kegiatan koordinasi melalui rapat/pertemuan dilakukan secara online/daring sehingga dapat menghemat anggaran untuk beberapa komponen kegiatan seperti paket meeting, uang harian meeting, transportasi (buat rapat yang dilakukan di luar kantor) serta konsumsi rapat (buat rapat yang dilakukan di dalam kantor);
2. **Perjalanan Dinas**. Efisiensi dilakukan dengan minimalisasi (selektif) kegiatan perjalanan dinas (perjadin) dengan cara:
   1. Menghadiri undangan secara online untuk kegiatan rapat di luar kantor/kota yang metode rapatnya dilakukan secara *hybrid*;
   2. Menghilangkan kegiatan perjadin atau penggabungan materi/substansi kegiatan yang dilakukan di daerah yang sama;
   3. Mengoptimalkan/mengurangi jumlah peserta perjadin, maupun jumlah hari perjalanan dinas yang dilakukan;
   4. Pemilihan moda transportasi atau meskapai penerbangan seperti penggunaan secara bersamaan dalam 1 mobil dan membatasi/melarang menggunakan meskapai Garuda untuk perjalanan udara;
3. **Perjadin Luar Negeri**. Efisiensi dilakukan dengan cara mengalihkan seluruh/sebagian sumber pembiayaan Perjadin Luar Negeri ke Biro Umum atau Mitra pembangunan Negara tujuan Perjadin Luar Negeri;
4. **Konsultan**. Untuk Kegiatan Koordinasi Penyiapan Program Compact 2, Komponen anggaran terbesar untuk kegiatan Koordinasi ini adalah gaji konsultan individu yang mencapai 60-70% dari pagu anggarannya. Dengan besarnya nilai dan lingkup kegiatan hibah yang akan diterima Pemerintah Indonesia, diperlukan konsultan-konsultan dengan kualifikasi tinggi, baik dari pengalaman maupun latar belakang pendidikannya yang menyebabkan harga/gaji per konsultannya cukup besarnya. Dengan adanya pemotongan anggaran, efisiensi yang dilakukan adalah dengan cara:
   1. Menurunkan kualifikasi konsultan (downgrade) yang akan direkrut tanpa mengurangi jumlah konsultan yang akan dikontrak karena keberadaan beberapa konsultan tersebut adalah bersifat wajib (mandatory) sesuai ketentuan dari MCC Amerika dan karena posisi tersebut memang dibutuhkan dalam penyiapan Program Compact tersebut;
   2. memanfaatkan hibah negeri Mitra Pembangunan untuk membiayai konsultan seperti konsutan kajian yang dilakasanakan;

Konsekuensi dengan adanya efisensi anggaran tersebut diantaranya:

1. Koordinasi tetap bisa dilaksanakan namun lebih aman untuk mencegah penyebaran Covid- 19 karena dapat dilakukan di mana pun;
2. Pengendalian atas konsultan yang dibiayai/digaji Mitra Pembangunan kadangkala tidak bisa dilakukan secara optimal karena konsultan tersebut hanya tunduk dan lebih mendengarkan kepada pemberi gaji;
3. *Downgrade* konsultan akan berpengaruh terhadap output yang dihasilkan khususnya dalam melakukan analisis dan pemahaman pekerjaan karena jam terbang (pengalaman) kerja yang masih kurang;
4. Koordinasi yang dilakukan dengan cara *online* (daring) akan berbeda dengan cara *offline*/tatap muka (luring), khususnya untuk diskusi atau pembahasan substansi yang perlu dilakukan secara fokus dan mendalam. Beberapa kejadian, peserta rapat melakukan rapat online secara paralel dengan rapat lain sehingga tidak fokus;
5. Keterbatasan informasi secara utuh dan menyeluruh. Pada saat perjadin dilaksanakan, sering sekali banyak diskusi dengan *stakeholder* lainnya mengenai hal-hal di luar materi yang dibicarakan dalam rapat atau informasi mengenai latar belakang permasalahan dapat diperoleh secara tatap muka diskusi santai yang tidak diperoleh informasi tersebut saat rapat *online*;

#### Langkah/upaya optimalisasi peningkatan efisiensi anggaran pada tahun anggaran mendatang

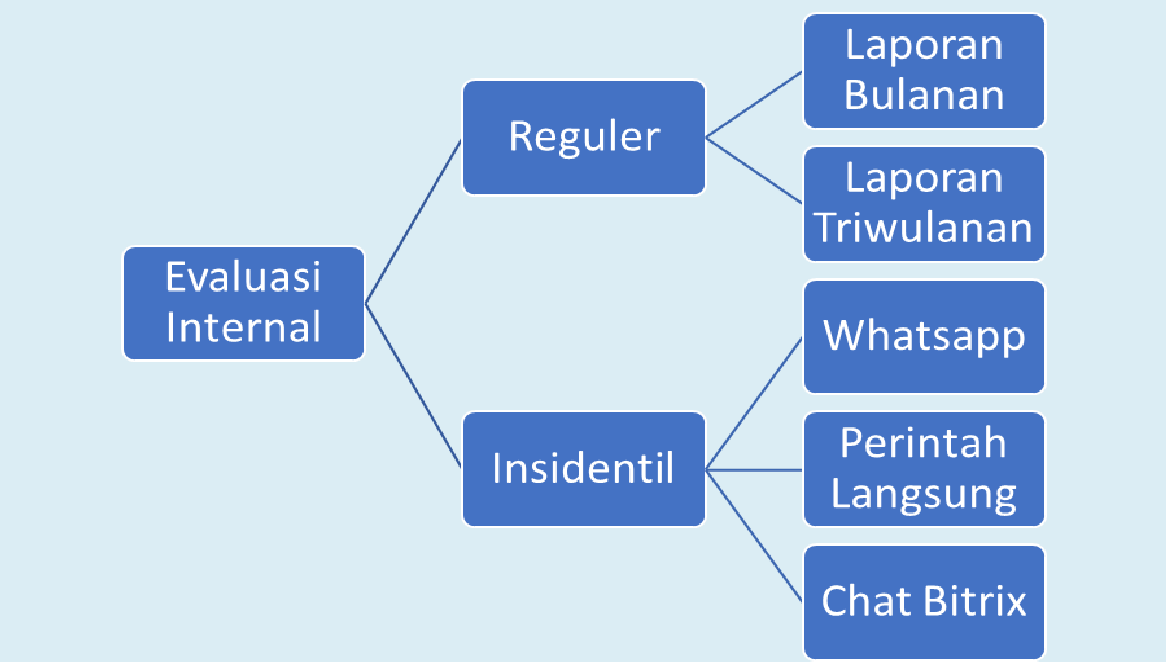
Pada tahun 2023, Direktorat Pendanaan Bilateral mendapat alokasi anggaran sebesar Rp

12,4 Miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp 623 Juta dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu sebesar Rp. 13,1 Miliar. Secara umum, upaya optimalisasi dan efisensi pada tahun 2023 akan dilakukan dengan cara yang sama dengan upaya efisiensi pada tahun 2022 dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku.

#### 3.2.7 Evaluasi Internal

Secara umum, terdapat 2 (dua) mekanisme evaluasi internal yang dilaksanakan di lingkungan Direktorat Pendanaan Bilateral, yaitu mekanisme reguler dan insidentil. Secara reguler, evaluasi internal dilakukan melalui pengelolaan dan penyampaian laporan kinerja bulanan melalui IDW dan Sistranas dan laporan kinerja triwulanan melalui *e-performance*. Sementara itu, evaluasi internal secara insidentil dilakukan melalui penggunaan platform media sosial seperti *Whatsapp*, fasilitas chat pada aplikasi IDW, maupun perintah langsung secara verbal dari pimpinan kepada pegawai untuk memonitor pelaksanaan kegiatan unit kerja masing-masing.

**Gambar 3. 1 Alur Evaluasi Internal**



Hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 Direktorat Pendanaan Bilateral memiliki beban kerja yang relatif berat yang ditunjukan antara lain dari jumlah korespondensi dengan mitra kerja yang mencapai 3200 korespondensi. Dari sisi substansi secara

umum pekerjaan tersebut telah terdistribusi secara proporsional kepada seluruh staf. Namun dengan kecenderungan meningkatnya beban pekerjaan di tim-tim tertentu, seperti Tim Mitra Setkab, masih diperlukan tambahan pegawai dengan kompetensi sesuai kebutuhan. Dari sisi administrasi, saat ini pengelolaan administrasi dan kesekretariatan dilaksanakan oleh staf non PNS sehingga belum dapat menjamin keberlanjutannya. Oleh karena itu di tahun depan diperlukan rekrutmen pegawai administrasi (sekretaris dan arsiparis) dengan status ASN.

Tabel 3. 19 **Daftar Korespondensi yang Dilaksanakan oleh Direktorat Pendanaan Bilateral berdasarkan Sumber Pendanaan selama Tahun 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sumber Pendanaan** | **Dokumen Masuk** | | **Dokumen Keluar** | | **Jumlah** |
| **MM** | **SM** | **MK** | **SK** |
| 1 | Amerika | 22 | 23 | 31 | 4 | 80 |
| 2 | Australia | 15 | 18 | 11 | 1 | 45 |
| 3 | Kanada | 1 | 4 | 1 | - | 6 |
| 4 | MCC | 24 | 36 | 68 | 71 | 199 |
| 5 | Jepang | 16 | 245 | 48 | 39 | 348 |
| 6 | Korea Selatan | 36 | 130 | 62 | 40 | 268 |
| 7 | RRT | 3 | 44 | 11 | 4 | 62 |
| 8 | Swiss | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Austria | 5 | 45 | 28 | 10 | 88 |
| 10 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Finlandia | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 |
| 12 | Perancis | 6 | 63 | 13 | 6 | 88 |
| 13 | Belanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Denmark | 0 | 15 | 7 | 2 | 24 |
| 15 | Hungaria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Britania Raya | 1 | 15 | 6 | 0 | 22 |
| 17 | Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Jerman | 29 | 63 | 29 | 19 | 140 |
| 19 | Norwegia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Kredit Ekspor | 1 | 6 | 3 | 0 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sumber Pendanaan** | **Dokumen Masuk** | | **Dokumen Keluar** | | **Jumlah** |
| **MM** | **SM** | **MK** | **SK** |
| 21 | New Zealand | 3 | 9 | 13 | 3 | 28 |
| 22 | Spanyol | 5 | 23 | 10 | 5 | 43 |
| 23 | Swedia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Lain-lain | 523 | 819 | 220 | 109 | 1.671 |
| Total Surat | | 718 | 1.578 | 570 | 319 | 3.270 |

Selain itu, isu lainnya yang dihadapi Direktorat Pendanaan Bilateral pada tahun 2022 adalah kurang maksimalnya pekerjaan konsultan. Pada tahun 2022 Direktorat Pendanaan Bilateral melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kanada untuk melaksanakan kegiatan kajian tentang Pengembangan *Model Delivery Inovatif* sebagai *Lesson Learnt* dari Proyek Hibah Luar Negeri. Mengingat kegiatan ini dibiayai hibah Pemerintah Kanada, seleksi konsultan baik internasional maupun nasional, dilaksanakan oleh pihak Kanada dengan melibatkan Direktorat Pendanaan Bilateral. Proses seleksi antara lain mencakup kegiatan review CV maupun wawancara virtual dengan para calon konsultan. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, terpilih 1 (satu) orang konsultan internasional dan 1 (satu) orang konsultan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat masalah dalam *delivery output* konsultan nasional. Tema dan lingkup pekerjaan pada kegiatan kajian ini ternyata terlalu luas untuk dikerjakan oleh satu orang konsultan nasional. Disamping itu, pelaksanaan kegiatan terhambat akibat adanya perbedaan *fiscal year* antara Kanada dan Indonesia sehingga kegiatan ini hanya bisa dilaksanakan selama 6 (enam) bulan saja1. Hal ini menjadi pelajaran yang baik bagi direktorat untuk menyusun perencanaan kegiatan yang lebih baik, misalnya dengan menetapkan tahapan seleksi yang lebih sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilakukan oleh konsultan serta mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi pekerjaan baik yang dapat dikendalikan maupun di luar kendali pelaksana kegiatan. Dengan demikian, *output* dapat tercapai sesuai dengan tujuan kegiatan.

1 *Fiscal year* Indonesia berlangsung dari bulan Januari hingga Desember pada tahun berjalan sementara Kanada berlangsung dari April ke Maret tahun berikutnya.

## BAB 4 PENUTUP

### Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2022 yang dilakukan oleh Direktorat Pendanaan Bilateral merupakan implementasi dari amanat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini diawali dengan penjelasan mengenai latar belakang, maksud, tujuan, dan dasar hukum dari penyusunan laporan kinerja diikuti dengan uraian mengenai tugas, fungsi, struktur organisasi, dan sumber daya manusia di lingkup Direktorat Pendanaan Bilateral. Potensi/peran dan permasalahan strategis juga dibahas pada bagian awal laporan ini.

Fokus laporan ini adalah memberikan gambaran dan analisis mengenai target kinerja Direktorat Pendanaan Bilateral selama tahun 2022 serta capaian masing-masing indikator. Dari uraian laporan diketahui bahwa secara umum capaian Direktorat Pendanaan Bilateral pada tahun 2022 mendekati seluruh target yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat kegiatan yang mengalami peningkatan pencapaian kinerja dari tahun 2021. Namun demikian, terdapat kegiatan yang mengalami penurunan kinerja akibat adanya dinamika pelaksanaan kegiatan.

Realisasi anggaran Direktorat Pendanaan Bilateral pada tahun 2022 juga telah mendekati target yang telah ditetapkan dan hampir sama dengan realisasi anggaran tahun 2021. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2022, capaian kinerja Direktorat Pendanaan Bilateral dapat dikategorikan memuaskan dengan efisiensi anggaran yang sangat baik.

### Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja di atas, Direktorat Pendanaan Bilateral akan mempertahankan kinerja yang telah baik dan meningkatkan kinerja pada tahun 2023 agar menjadi lebih optimal, efektif, efisien, dan akuntabel.

Jakarta, Januari 2023 Direktur Pendanaan Bilateral

Kurniawan Ariadi

# LAMPIRAN

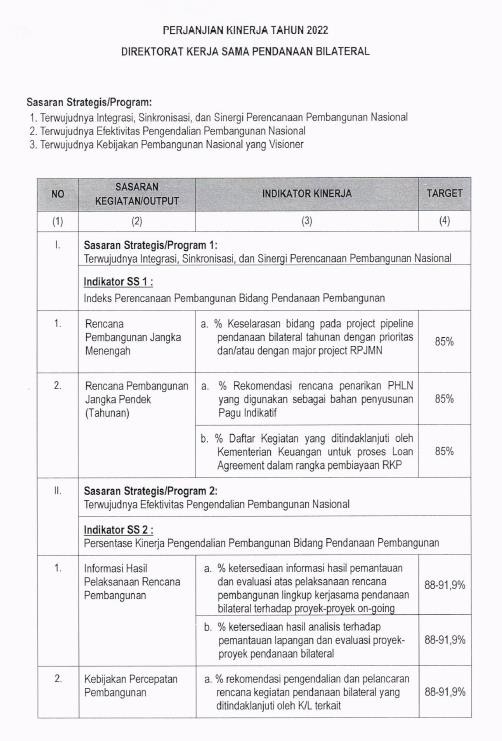
**DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT PENDANAAN BILATERAL**

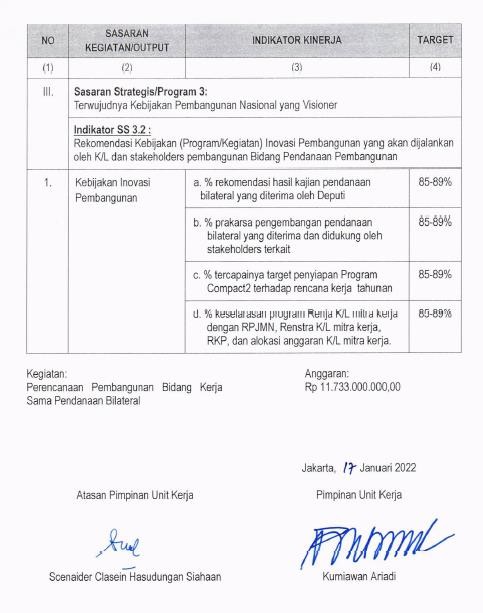
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NAMA** | **JABATAN** | **STATUS PEGAWAI** | | | |
| **PPNPN** | **PNS** | **CPNS** | **TOTAL** |
| 1 | Kurniawan Ariadi | Direktur |  | 1 |  | 1 |
| 2 | Mohamad Firda Fauzan | Perencana Ahli Madya (Koordinator) |  | 1 |  | 1 |
| 3 | Nursyaf Rullihandia S. | Perencana Ahli Madya (Koordinator) |  | 1 |  | 1 |
| 4 | Uthami Sary | Perencana Ahli Madya (Koordinator) |  | 1 |  | 1 |
| 5 | Mesi Purnamasari | Perencana Ahli Madya |  | 1 |  | 1 |
| 6 | Wiwit Widodo | Perencana Ahli Madya |  | 1 |  | 1 |
| 7 | Afrian Iskandar | Perencana Ahli Madya |  | 1 |  | 1 |
| 8 | Dimas Hartanto Effendy | Perencana Ahli Pertama |  | 1 |  | 1 |
| 9 | Rian Wicaksana | Perencana Ahli Pertama |  | 1 |  | 1 |
| 10 | Zahra Mufidah | Perencana Ahli Pertama |  | 1 |  | 1 |
| 11 | Deti Kusmalawati | Staf Perencana Tk. I |  | 1 |  | 1 |
| 12 | Ahmad Fitriyadi | Staf Perencana Tk. I |  | 1 |  | 1 |
| 13 | Rayhan Rahmanda Arifin | Calon Perencana Ahli Pertama |  |  | 1 | 1 |
| 14 | Krisdayanti Aprilia | Calon Perencana Ahli Pertama |  |  | 1 | 1 |
| 15 | Maurin Sitorus | Tenaga ahli national coordinator | 1 |  |  | 1 |
| 16 | Arie Damayanti | Tenaga ahli coordinating consultant  economist specialist | 1 |  |  | 1 |
| 17 | Ngakan Putu Miharjana | Tenaga ahli private sector development  specialist | 1 |  |  | 1 |
| 18 | Erny Murniasih | Tenaga ahli institution & fund channeling  specialist | 1 |  |  | 1 |
| 19 | Riza Iskandar | Tenaga ahli outreach/consultation lead | 1 |  |  | 1 |
| 20 | Rini Widiastuti | Tenaga ahli monitoring & evaluation | 1 |  |  | 1 |
| 21 | Sulaiman Abdul Rahman | Tenaga ahli pembiayaan infrastruktur dan  monitoring evaluasi | 1 |  |  | 1 |
| 22 | Vero Ardianto Anggoro Wibowo | Tenaga ahli program development 1 | 1 |  |  | 1 |
| 23 | Surya Pagi Asa | Tenaga ahli project development 3 | 1 |  |  | 1 |
| 24 | Moekti Ariebowo | Tenaga ahli environmental & social  performance specialist | 1 |  |  | 1 |
| 25 | Sita Wardhani Suparyono | Tenaga ahli ekonomi & data analisis | 1 |  |  | 1 |
| 26 | Muhammad Bhagasjati Kusuma | Tenaga program officer | 1 |  |  | 1 |
| 27 | Syifa Astarini Iskandar | Tenaga ahli muda komunikasi | 1 |  |  | 1 |
| 28 | Daniel Abet Nego | Tenaga ahli muda legal dan perundangan | 1 |  |  | 1 |
| 29 | Shinta Dewi Rizkia Aryandhani | Program Officer | 1 |  |  | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NAMA** | **JABATAN** | **STATUS PEGAWAI** | | | |
| **PPNPN** | **PNS** | **CPNS** | **TOTAL** |
| 30 | Amalia Dewi Bunga | Program Officer | 1 |  |  | 1 |
| 31 | Aditya Chandra | Program Officer | 1 |  |  | 1 |
| 32 | Fakhrinannisa Islah Birru | Program Officer | 1 |  |  | 1 |
| 33 | Andri Setiawan | Koordinator Administrasi dan  Pelaksanaan Anggaran | 1 |  |  | 1 |
| 34 | Abdullah Aflaha Aslam | Pengolah data | 1 |  |  | 1 |
| 35 | Ivan Andikhairi | Pengolah data | 1 |  |  | 1 |
| 36 | M. Fikri Annafi Yandril | Pengolah Data | 1 |  |  | 1 |
| 37 | Prasidya Darmayu Atina | Sekretaris | 1 |  |  | 1 |
| 38 | Annisa Rahma Chantika | Arsiparis | 1 |  |  | 1 |
| 39 | Farel Marsekal Nainggolan | Office manager Sekretariat Compact 2 | 1 |  |  | 1 |
| 40 | Dian Purwanti | Sekretaris | 1 |  |  | 1 |
| 41 | Nur Cahyani | Supervisor administrasi dan keuangan | 1 |  |  | 1 |
| 42 | Jojor Oktorina | Administrasi persuratan  Sekretariat Compact 2 | 1 |  |  | 1 |
| 43 | Subur | Pengolah Data | 1 |  |  | 1 |
| 44 | Agesti Nur Lestari | Pengolah Data | 1 |  |  | 1 |
| 45 | Astri Amirudin | Pengolah data | 1 |  |  | 1 |
| 46 | Gusjayadi | Arsip dan persuratan | 1 |  |  | 1 |
| 47 | Asri Wijayati | Administrasi | 1 |  |  | 1 |
| 48 | Irawanto | Kurir dan administrasi | 1 |  |  | 1 |
| 49 | Ade Hermawan | Administrasi Sekretariat Compact 2 | 1 |  |  | 1 |
| 50 | Nasrudin | Pramubakti | 1 |  |  | 1 |
| 51 | Iskandar | Pengemudi | 1 |  |  | 1 |
| 52 | Afif Ababil | Pengemudi |  |  |  |  |
| 53 | Nurcahyadi | Pengemudi |  |  |  |  |
| 54 | Agung Kurniawan | Security |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** | | **40** | **12** | **2** | **54** |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTUR PENDANAAN BILATERAL**

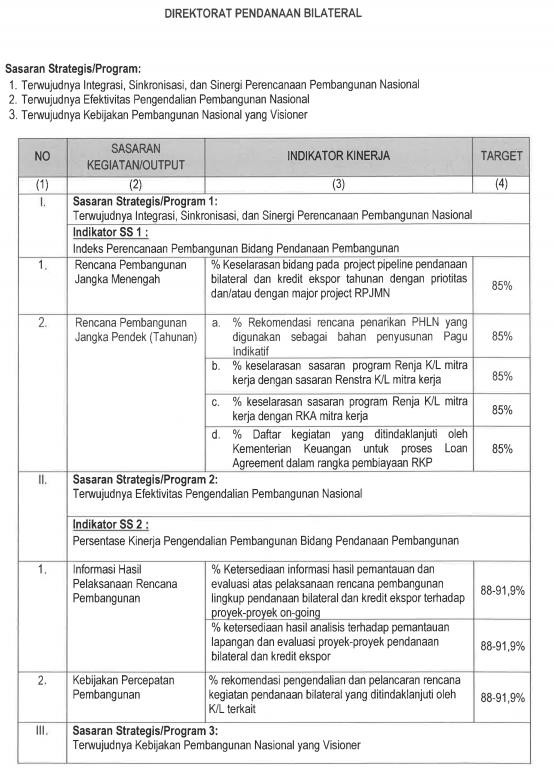


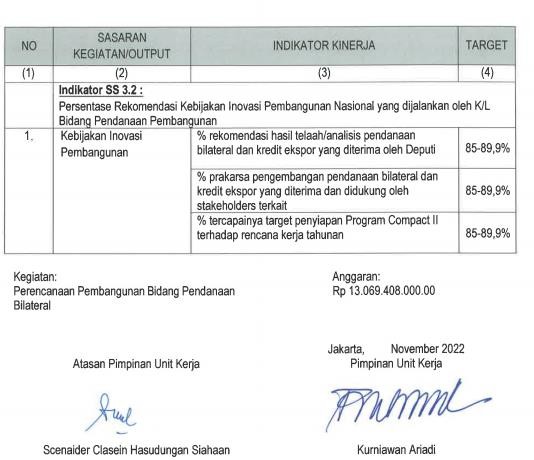




**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTUR PENDANAAN BILATERAL**







**KAMUS INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PENDANAAN BILATERAL TAHUN 2022**

1. **% Keselarasan bidang pada project pipeline pendanaan bilateral dan kredit ekspor tahunan dengan prioritas dan/atau dengan major project RPJMN**

|  |  |
| --- | --- |
| Sasaran Strategis | Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional |
| Sasaran Kegiatan/ Output | Rencana Pembangunan Jangka Menengah |
| Tujuan | Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan bidang dari project pipeline yang akan dibiayai melalui pendanaan bilateral dan kredit ekspor tahunan dengan PN atau MP dalam RPJMN |
| Definisi | Keselarasan Bidang: Melihat keterkaitan project pipeline dengan PN/MP *Project Pipeline*: Rencana proyek yang masuk dalam *trilateral meeting* Kredit Ekspor: (spesifik untuk Dit. Pendanaan Bilateral) |
| Formula |  |
| Periode | 1 (satu) Tahunan |
| Satuan | Dokumen |
| Pengumpul Data | Unit kerja pengampu pendanaan bilateral |
| Jenis Perhitungan | Rata-rata |
| Sumber data | 1. Matriks Project Pipeline Tahunan 2. Matriks Kredit Ekspor Tahunan 3. RPJMN 4. RKP |

1. **% Rekomendasi rencana penarikan PHLN yang digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif**

|  |  |
| --- | --- |
| Sasaran Strategis | Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional |
| Sasaran Kegiatan/ Output | Rencana Pembangunan Jangka Menengah |
| Tujuan | Indikator ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara jumlah rekomendasi proyek yang masuk dalam rencana penarikan proyek PHLN yang digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif tahun berikutnya dengan jumlah proyek yang masuk dalam pagu indikatif tahun berikutnya hasil pembahasan trilateral meeting |
| Definisi | Pagu Indikatif = ancar-ancar rencana pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga |
| Formula |  |
| Periode | Tahunan |
| Satuan | Dokumen |
| Pengumpul Data | Unit kerja pengampu pendanaan bilateral |
| Jenis Perhitungan | Rata-rata |
| Sumber data | 1. Matriks rekomendasi rencana penarikan PHLN tahun berikutnya 2. Matriks pagu indikatif PHLN tahun berikutnya hasil kesepakatan trilateral meeting |

1. **% Keselarasan sasaran program Renja K/L mitra kerja dengan sasaran Renstra K/L mitra kerja**

|  |  |
| --- | --- |
| Sasaran Strategis | Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional |
| Sasaran Kegiatan/ Output | Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) |
| Tujuan | Indikator ini disusun untuk mengukur keselarasan dari sasaran program di dalam Renja K/L dari Mitra Kerja Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas dengan sasaran dalam Renstra Mitra Kerja dari Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas tersebut |
| Definisi | Keselarasan: Sasaran yang disusun dalam Renja K/L merupakan sasaran yang dapat mencapai sasaran dalam Renstra K/L mitra kerja terkait |
| Formula |  |
| Periode | Tahunan |
| Satuan | Dokumen |
| Pengumpul Data | Direktorat Pendanaan Bilateral, Direktorat Pendanaan Multilateral, dan Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan |
| Jenis Perhitungan | Rata-rata |
| Sumber data | 1. Renja K/L 2. Renstra K/L 3. Aplikasi KRISNA Renja |

1. **% keselarasan sasaran program Renja K/L mitra kerja dengan RKA mitra kerja**

|  |  |
| --- | --- |
| Sasaran Strategis | Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional |
| Sasaran Kegiatan/ Output | Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) |
| Tujuan | Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keselarasan dari sasaran program yang telah direncanakan dalam Renja K/L dengan sasaran program yang tercantum di dalam dokumen RKA K/L |
| Definisi | Keselarasan: Sasaran yang sudah direncanakan dalam Renja K/L juga masuk ke dalam rencana penganggaran K/L dalam RKA |
| Formula |  |
| Periode | Tahunan |
| Satuan | Dokumen |
| Pengumpul Data | Unit kerja mitra K/L |
| Jenis Perhitungan | Rata-rata |
| Sumber data | 1. Renja K/L 2. RKA K/L 3. DIPA K/L |

1. **% Daftar kegiatan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan untuk proses Loan Agreement dalam rangka pembiayaan RKP**

|  |  |
| --- | --- |
| Sasaran Strategis | Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional |
| Sasaran Kegiatan/ Output | Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) |
| Tujuan | Indikator ini bertujuan untuk mengukur perbandingan jumlah Daftar Kegiatan (DK) pinjaman luar negeri yang ditindaklanjuti Kementerian Keuangan dalam rangka pemrosesan *Loan Agreement* dengan jumlah DK yang dikirimkan Bappenas ke Kementerian Keuangan dalam rangka pembiayaan RKP |
| Definisi | Daftar Kegiatan: adalah daftar rencana kegiatan yang telah tercantum di dalam DRPPLN dan siap untuk diusulkan kepada dan/atau dirundingkan dengan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri  Ditindaklanjuti: pemrosesan lebih lanjut DK Bappenas oleh Kementerian Keuangan dalam berbagai bentuk seperti rapat konfirmasi Daftar Kegiatan, pengiriman formal request kepada lender, dan pembahasan draft *loan agreement*. |
| Formula |  |
| Periode | Tahunan |
| Satuan | Dokumen |
| Pengumpul Data | Unit kerja pengelola kegiatan pinjaman |
| Jenis Perhitungan | Rata-rata |
| Sumber data | 1. Dokumen Daftar Kegiatan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Menteri Keuangan 2. Undangan rapat konfirmasi DK, surat tembusan *formal request* kepada Mitra Pembangunan, Salinan naskah *Loan Agreement* dari Kementerian Keuangan |

1. **% Ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup pendanaan bilateral dan kredit ekspor terhadap proyek-proyek on-going**

|  |  |
| --- | --- |
| Sasaran Strategis | Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional |
| Sasaran Kegiatan/ Output | Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan |
| Tujuan | Indikator ini dipergunakan untuk mengukur ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan rencana kegiatan (proyek *on-going*) yang dibiayai melalui pinjaman bilateral dan kredit ekspor |
| Definisi | Indikator ini diukur dari ketersediaan dokumen analisis pelaksanaan proyek berupa laporan pemantauan triwulanan proyek-proyek pinjaman bilateral on- going yang memuat informasi kemajuan pelaksanaan proyek, penyerapan pendanaan, tantangan/permasalahan yang dihadapi proyek serta upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencari solusi dari permasalahan proyek. |
| Formula |  |
| Periode | Tahunan |
| Satuan | Dokumen |
| Pengumpul Data | Unit kerja pengampu Pendanaan Bilateral |
| Jenis Perhitungan | Rata-rata |
| Sumber data | 1. Dokumen pemantauan dan evaluasi triwulanan proyek ongoing 2. Daftar proyek on going yang dibiayai oleh Pendanaan Bilateral dan Kredit Ekspor |

1. **% ketersediaan hasil analisis terhadap pemantauan lapangan dan evaluasi proyek-proyek pendanaan bilateral dan kredit ekspor**

|  |  |
| --- | --- |
| Sasaran Strategis | Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional |
| Sasaran Kegiatan/ Output | Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan |
| Tujuan | Indikator ini dipergunakan untuk mengukur ketersediaan dari hasil analisis terhadap pelaksanaan pemantauan lapangan dan evaluasi dari proyek-proyek yang dibiayai melalui pendanaan bilateral dan kredit ekspor yang menjadi objek pemantauan lapangan |
| Definisi | Untuk indikator ini diukur dari ketersediaan dokumen hasil analisisnya saja, tidak sampai melihat kepada hasil tindak lanjut dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan |
| Formula |  |
| Periode | Tahunan |
| Satuan | Dokumen |
| Pengumpul Data | Unit kerja pengampu pendanaan bilateral |
| Jenis Perhitungan | Rata-rata |
| Sumber data | 1. Dokumen laporan pemantauan dan evaluasi kunjungan lapangan proyek 2. Surat undangan pemantauan lapangan dan/surat tugas 3. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemantauan Lapangan |

1. **% rekomendasi pengendalian dan pelancaran rencana kegiatan pendanaan bilateral yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait**

|  |  |
| --- | --- |
| Sasaran Strategis | Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional |
| Sasaran Kegiatan/ Output | Kebijakan Percepatan Pembangunan |
| Tujuan | Untuk mengukur upaya percepatan pelaksanaan pembangunan nasional melalui proyek-proyek pendanaan bilateral yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang didanai melalui pendanaan bilateral |
| Definisi | * Rekomendasi pengendalian dan pelancaran yang dimaksud merupakan dokumen rekomendasi untuk memastikan kelancaran dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui pendanaan bilateral * Maksud dari ditindaklanjuti adalah rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh K/L terkait pada triwulan selanjutnya sehingga target tahunan dari kegiatan bisa tercapai |
| Formula |  |
| Periode | Tahunan dan Triwulanan |
| Satuan | Persentase |
| Pengumpul Data | Unit kerja pengampu pendanaan bilateral |
| Jenis Perhitungan | Rata-rata |
| Sumber data | 1. Usulan kegiatan/proyek on going yang memerlukan pengendalian dan pelancaran 2. Dokumen rekomendasi tindaklanjut pengendalian dan pelancaran kegiatan yang dibiayai oleh Pendanaan Bilateral |

1. **% rekomendasi hasil telaah/analisis pendanaan bilateral dan kredit ekspor yang diterima oleh Deputi**

|  |  |
| --- | --- |
| Sasaran Strategis | Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner |
| Sasaran Kegiatan/ Output | Kebijakan Inovasi Pembangunan |
| Tujuan | Indikator ini dipergunakan untuk mengukur persentase dari jumlah rekomendasi yang telah dihasilkan sebagaimana hasil telaah/analisis dari pelaksanaan proyek yang dibiayai melalui pendanaan bilateral dan kredit ekspor |
| Definisi | Rekomendasi dapat dikatakan dimanfaatkan apabila hasilnya telah diterima oleh Deputi |
| Formula |  |
| Periode | Tahunan |
| Satuan | Dokumen |
| Pengumpul Data | Unit kerja pengampu pendanaan bilateral |
| Jenis Perhitungan | Rata-rata |
| Sumber data | 1. Dokumen Rekomendasi Hasil Telaah/Analisis Pendanaan Bilateral dan Kredit Ekspor 2. Dokumen Hasil Telaah/Analisis Pendanaan Bilateral dan Kredit Ekspor |

1. **% prakarsa pengembangan pendanaan bilateral dan kredit ekspor yang diterima dan didukung oleh stakeholders terkait**

|  |  |
| --- | --- |
| Sasaran Strategis | Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner |
| Sasaran Kegiatan/ Output | Kebijakan Inovasi Pembangunan |
| Tujuan | Indikator ini untuk mengukur usulan inovasi untuk skema pendanaan mitra pembangunan Bilateral dan/atau melalui kredit ekspor. |
| Definisi | Prakarsa pengembangan pendanaan bilateral mencakup pengembangan berbagai skema kerjasama pembangunan antara Pemerintah Indonesia dan para mitra pembangunan bilateral untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan sehingga dapat meringankan beban APBN. |
| Formula |  |
| Periode | Tahunan |
| Satuan | Dokumen |
| Pengumpul Data | Unit kerja pengampu pendanaan bilateral |
| Jenis Perhitungan | Rata-rata |
| Sumber data | 1. Dokumen Laporan Prakarsa Pendanaan Bilateral dan Kredit Ekspor 2. RKP 3. MoU 4. CPS |

1. **% tercapainya target penyiapan Program Compact II terhadap rencana kerja tahunan**

|  |  |
| --- | --- |
| Sasaran Strategis | Terwujudnya Kebijakan Pembangunan Nasional yang Visioner |
| Sasaran Kegiatan/ Output | Kebijakan Inovasi Pembangunan |
| Tujuan | Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian dari persiapan *Program Compact* II sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen rencana penyiapan *Program Compact II* |
| Definisi | Dapat dikatakan tercapai apabila target-target yang telah direncanakan tiap tahunnya berhasil diselesaikan |
| Formula |  |
| Periode | Tahunan |
| Satuan | Dokumen |
| Pengumpul Data | Unit kerja penanggung jawab Program Compact II |
| Jenis Perhitungan | Rata-rata |
| Sumber data | 1. Dokumen rencana penyiapan program Compact II 2. Laporan Tahunan hasil persiapan program Compact II |